



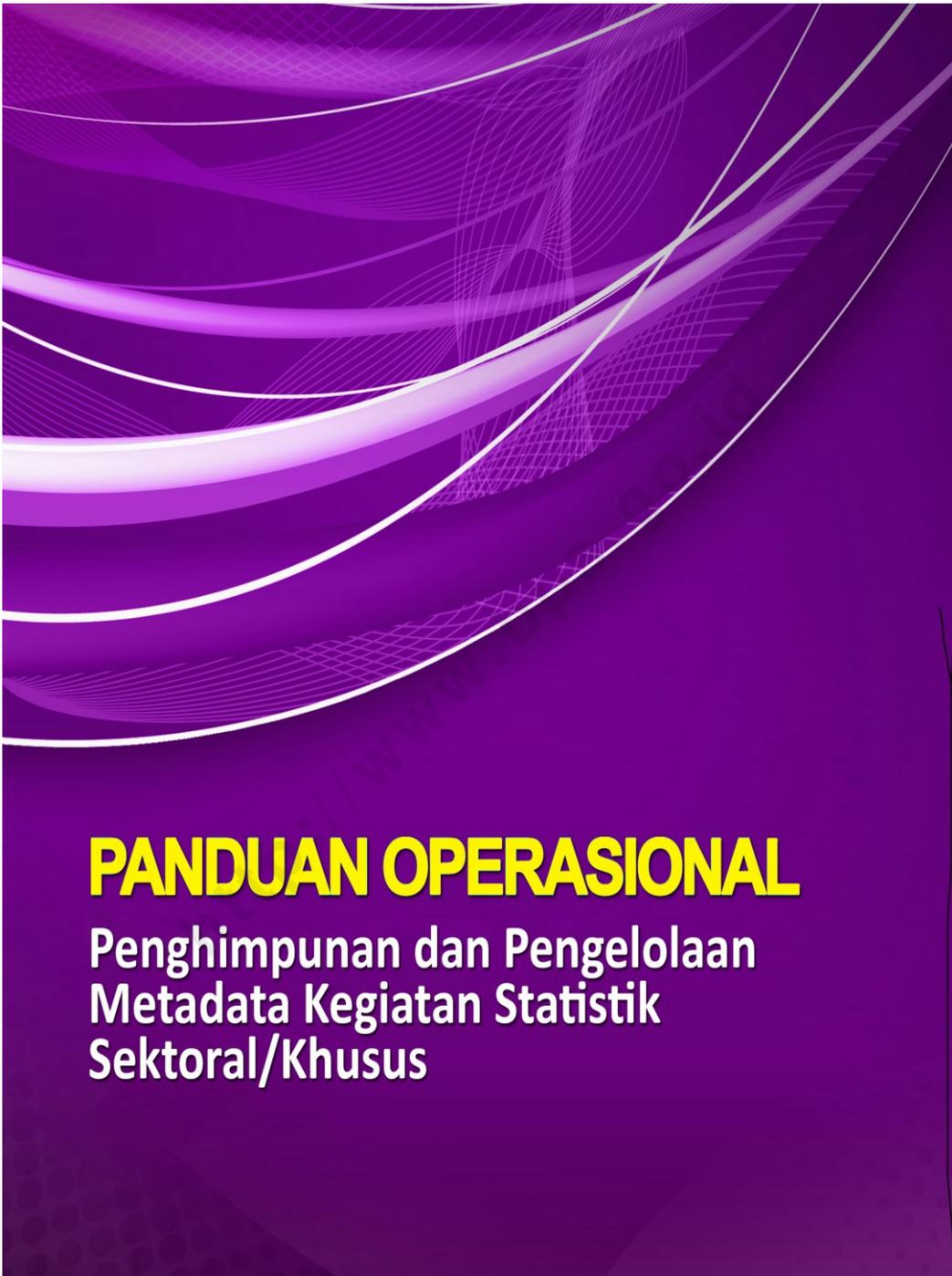
Katalog BPS: 1303073

PANDUAN OPERASIONAL

**Penghimpunan dan Pengelolaan
Metadata Kegiatan Statistik
Sektoral/Khusus**



BADAN PUSAT STATISTIK



PANDUAN OPERASIONAL

**Penghimpunan dan Pengelolaan
Metadata Kegiatan Statistik
Sektoral/Khusus**

**Panduan Operasional Penghimpunan dan Pengelolaan
Metadata Kegiatan Statistik Sektoral/Khusus**

No. Publikasi : 03210.1504

Katalog BPS : 1303074

Ukuran Buku : 17,6 x 25 cm

Jumlah Halaman : viii + 128

Naskah:

Subdirektorat Rujukan Statistik

Penyunting:

Subdirektorat Rujukan Statistik

Gambar Kulit:

Subdirektorat Rujukan Statistik

Diterbitkan oleh:

Badan Pusat Statistik

Dicetak oleh:

CV. NARIO SARI

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

KATA PENGANTAR

Statistik penting artinya bagi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan dalam pembangunan nasional. Memperhatikan pentingnya peranan statistik tersebut sehingga diperlukan langkah-langkah untuk mengatur penyelenggaraan sistem statistik nasional.

Penyelenggaraan kegiatan statistik menurut penyelenggaraannya dikategorikan menjadi kegiatan Statistik Dasar, Sektoral, dan Khusus. Kegiatan Statistik Dasar diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah, dan statistik khusus diselenggarakan oleh masyarakat.

Untuk mengoptimalkan penyediaan kebutuhan data maka penyelenggara kegiatan statistik perlu melakukan koordinasi dan kerjasama. Koordinasi yang tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik bahwa BPS bertindak selaku inisiator dalam rangka Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Standardisasi (KISS).

Selanjutnya instansi pemerintah yang akan menyelenggarakan kegiatan statistik diwajibkan untuk memberitahukan kepada BPS sebelum penyelenggaraan kegiatan statistik, mengikuti rekomendasi BPS, serta menyerahkan data dan metadata yang dihasilkan kepada BPS. Sedangkan lembaga swasta yang menyelenggarakan kegiatan statistik wajib menyerahkan sinopsis/metadata kepada BPS setelah kegiatan statistik tersebut selesai diselenggarakan.

Penghimpunan dan pengelolaan data beserta metadatanya oleh BPS dimaksudkan untuk menghindari terjadinya duplikasi dalam penyelenggaraan kegiatan statistik. Pengelolaan data dan metadata dilakukan dalam suatu Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).

Dalam rangka menunjang penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional, maka perlu disusun Buku Panduan Operasional Penghimpunan dan Pengelolaan Metadata Kegiatan Statistik Sektoral/Khusus. Buku ini secara operasional diharapkan dapat membantu penyelenggaraan kegiatan statistik.

Jakarta, Juni 2015
Kepala Badan Pusat Statistik



Dr. Suryamin, M.Sc

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. 1. Latar Belakang.....	1
1. 2. Dasar Hukum.....	3
1. 3. Tujuan.....	3
BAB II SISTEM STATISTIK NASIONAL	5
2. 1. Pengertian	5
2. 2. Keterkaitan Antar Lembaga	5
2. 3. Manfaat	8
2. 4. Forum Data dan Informasi Pembangunan	8
BAB III REKOMENDASI KEGIATAN SURVEI STATISTIK SEKTORAL	13
3. 1. Penyelenggara Kegiatan Survei Statistik Sektoral	13
3. 2. Prosedur Rekomendasi Kegiatan Survei Statistik Sektoral	14
3.2.1. Prosedur Rekomendasi Survei Statistik Sektoral di BPS.....	15
3.2.2. Prosedur Rekomendasi Survei Statistik Sektoral di BPS Provinsi	19
3.2.3. Prosedur Rekomendasi Survei Statistik Sektoral di BPS Kabupaten/Kota	22
BAB IV METADATA KEGIATAN STATISTIK	27
4. 1. Pengertian	27
4. 2. Metadata Kegiatan Statistik.....	28
4.2.1. Metadata Kegiatan Statistik Dasar	28
4.2.2. Metadata Kegiatan Statistik Sektoral	30
4.2.3. Metadata Kegiatan Statistik Khusus.....	31
4. 3. Manfaat	32

BAB V PENGHIMPUNAN METADATA KEGIATAN STATISTIK.....	35
5. 1. Formulir FS3	35
5. 2. Formulir FS2K	44
5. 3. Q-Metadata	50
BAB VI PENGELOLAAN METADATA KEGIATAN STATISTIK.....	59
6. 1. Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa)	59
6. 2. Panduan Penggunaan SIRuSa	59
LAMPIRAN.....	85

<http://www.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Alur Rekomendasi Survei Statistik Sektoral di BPS	15
Gambar 2.	Alur Rekomendasi Survei Statistik Sektoral di BPS Provinsi.....	19
Gambar 3.	Alur Rekomendasi Survei Statistik Sektoral di BPS Kabupaten/Kota	23
Gambar 4.	<i>Homepage</i> BPS	60
Gambar 5.	Tampilan Beranda Bagian Atas.....	61
Gambar 6.	Tampilan Beranda Bagian Tengah	61
Gambar 7.	Tampilan Beranda Bagian Bawah	62
Gambar 8.	Tampilan Daftar Metadata Statistik Dasar	63
Gambar 9.	Tampilan Metadata Statistik Dasar	64
Gambar 10.	Tampilan Daftar Indikator	65
Gambar 11.	Tampilan Indikator.....	65
Gambar 12.	Tampilan Daftar Variabel	66
Gambar 13.	Tampilan Metadata Variabel.....	67
Gambar 14.	Tampilan Daftar Kuesioner.....	68
Gambar 15.	Tampilan Kuesioner	69
Gambar 16.	Tampilan Daftar Metadata Statistik Sektoral	70
Gambar 17.	Tampilan Metadata Statistik Sektoral.....	71
Gambar 18.	Tampilan Daftar Metadata Statistik Khusus.....	72
Gambar 19.	Tampilan Metadata Statistik Khusus	73
Gambar 20.	Tampilan Solusi Statistik	74
Gambar 21.	Tampilan Tata Cara Pelaksanaan Survei	75
Gambar 22.	Tampilan Rekomendasi.....	76
Gambar 23.	Tampilan Glosarium.....	77
Gambar 24.	Tampilan Tentang Kami	78
Gambar 25.	Tampilan Tautan	79
Gambar 26.	Tampilan Unduh	80
Gambar 27.	Tampilan Pengaduan	81
Gambar 28.	Tampilan Peta Situs	82
Gambar 29.	Tampilan Login	82
Gambar 30.	Tampilan Dokumentasi	83

1. 1. Latar Belakang

Statistik penting artinya bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam pembangunan nasional untuk memajukan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Memperhatikan pentingnya peranan statistik tersebut sehingga diperlukan langkah-langkah untuk mengatur penyelenggaraan statistik nasional terpadu.

Dalam pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik diamanatkan bahwa kegiatan statistik diarahkan pada upaya mewujudkan dan mengembangkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien. Berbagai langkah yang ditujukan untuk memperjelas upaya tersebut ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan statistik. Selanjutnya ketentuan pelaksanaannya dituangkan dalam Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional.

Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. Dalam sistem tersebut, statistik dibedakan menjadi statistik dasar, sektoral, dan khusus. Statistik dasar diselenggarakan oleh BPS. Statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai lingkup tugas dan fungsinya. Statistik khusus diselenggarakan oleh masyarakat baik lembaga, organisasi, perorangan, maupun unsur masyarakat lainnya.

Penyelenggara kegiatan statistik perlu melakukan koordinasi dan kerjasama sehingga pelaksanaan tugas menjadi ringan dan penyediaan kebutuhan data menjadi optimal. BPS bertindak selaku inisiator dalam rangka Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Standardisasi (KISS) dan pusat rujukan statistik. Instansi pemerintah yang akan menyelenggarakan kegiatan statistik dan hasilnya akan dipublikasikan diwajibkan untuk memberitahukan kepada BPS sebelum penyelenggaraan kegiatan statistik, selanjutnya mengikuti rekomendasi BPS, serta menyerahkan data dan metadata hasil

penyelenggaraan kegiatan statistik kepada BPS selaku pusat rujukan statistik. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya duplikasi dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, mendorong diperolehnya hasil yang secara teknis dapat dipertanggungjawabkan, serta mengurangi keraguan pengguna data atas beberapa sajian jenis data yang sama tetapi angkanya berbeda. Penyelenggara kegiatan statistik khusus yang akan dipublikasikan wajib menyerahkan sinopsis/metadata kepada BPS setelah kegiatan statistik tersebut selesai diselenggarakan.

Langkah-langkah dalam KISS dilakukan dengan cara senantiasa mengadakan komunikasi timbal balik antara penyelenggara kegiatan statistik terkait pembidangan menurut jenis statistik yang telah ditetapkan dan disepakati, termasuk cara pengumpulan, pengolahan, penyebarluasan, pemanfaatan data yang dihasilkan, serta penyebaran responden untuk mengurangi beban bagi responden sehingga tingkat ketepatan dan akurasi data dapat terjamin.

Sistem Statistik Nasional diharapkan mampu memberikan umpan balik terhadap masukan untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem tersebut agar dapat terwujud Sistem Statistik Nasional yang lebih andal, efektif, dan efisien. Sistem Statistik Nasional ini dapat diterapkan di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dengan mengacu pada mekanisme yang telah ditetapkan.

Beberapa provinsi dan kabupaten/kota sudah membentuk forum data sebagai wadah yang memfasilitasi pembahasan tentang berbagai permasalahan data dan sekaligus mampu memberikan data dan informasi untuk perencanaan pembangunan secara komprehensif dan terpadu. Keberadaan forum data tersebut sangat penting perannya untuk mengimplementasikan KISS dalam Sistem Statistik Nasional.

Melalui forum data dapat terjalin koordinasi dan kerjasama dalam pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran statistik; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; pelaksanaan kegiatan statistik; penyebarluasan, pemanfaatan, dan pasyarakatan statistik; penyebaran responden untuk mengurangi beban bagi responden; serta penghimpunan dan pengelolaan data dan metadata yang dihasilkan dari penyelenggaraan kegiatan statistik sehingga sajian jenis data yang sama tetapi angkanya berbeda dapat disajikan kepada pengguna data dengan dilengkapi metadata yang dapat menjelaskan penyebab terjadinya perbedaan tersebut.

1. 2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan panduan penghimpunan dan pengelolaan metadata kegiatan statistik sektoral/khusus sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengatur prinsip-prinsip pelayanan yang baik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
7. Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Peningkatan Efektifitas Tugas dan Fungsi Unit Data dan Informasi di Kementerian dan Lembaga untuk Penyelenggaraan Data Pembangunan Berkelanjutan.
8. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional.
9. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Statistik Dasar.
10. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Survei Statistik Sektoral.
11. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemberitahuan Sinopsis Survei Statistik Khusus.
12. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah.

1. 3. Tujuan

Tujuan penyusunan panduan penghimpunan dan pengelolaan metadata kegiatan statistik sektoral/khusus sebagai berikut:

1. Mendukung terwujudnya Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.
2. Menjelaskan tata cara koordinasi dengan instansi/institusi penyelenggara kegiatan statistik sektoral/khusus di pusat maupun di daerah.

3. Menjelaskan mekanisme penghimpunan metadata kegiatan statistik sektoral/khusus di pusat maupun di daerah.
4. Menjelaskan tata cara pengelolaan metadata kegiatan statistik sektoral/khusus dalam suatu Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa) sebagai penunjang pelayanan sehingga dapat bermanfaat bagi pengguna data secara luas.

<http://www.bps.go.id>

2. 1. Pengertian

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 Pasal 1, Sistem Statistik Nasional (SSN) adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur kebutuhan data statistik, sumber daya, metode, sarana dan prasarana, ilmu pengetahuan dan teknologi, perangkat hukum, dan masukan dari Forum Masyarakat Statistik (FMS) yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. Sistem Statistik Nasional (SSN) akan menjadikan perstatistikan di Indonesia semakin handal. Hal ini merupakan arah dalam pengembangan statistik, baik yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Kesenambungan dan keselarasan statistik akan memudahkan para pengguna data memahami perstatistikan di Indonesia.

Berdasarkan tujuan pemanfaatannya, statistik di Indonesia dibagi menjadi tiga jenis, yaitu statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus (pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1997). Statistik dasar dan statistik sektoral pemanfaatannya terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, Statistik Khusus pemanfaatannya tidak terbuka untuk umum, tetapi setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengetahui dan memanfaatkannya.

Ketiga jenis statistik tersebut juga dapat dikenali berdasarkan penyelenggara kegiatan statistik. Statistik dasar diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Statistik sektoral diselenggarakan oleh kementerian/lembaga pemerintah sesuai lingkup tugas dan fungsinya, baik secara mandiri maupun bersama-sama dengan BPS. Sementara itu, statistik khusus diselenggarakan oleh masyarakat baik lembaga, organisasi, perorangan maupun unsur masyarakat lainnya secara mandiri maupun bersama-sama dengan BPS.

2. 2. Keterkaitan Antar Lembaga

Koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan statistik menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Statistik meliputi hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan statistik; serta pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran, hal ini demi mendukung terwujudnya sistem statistik nasional yang andal, efektif, dan efisien.

Dalam sistem statistik nasional terdapat tiga kelompok pendukung sistem yaitu

1. Pengelola

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999, Badan Pusat Statistik selaku pusat rujukan statistik. Unit Kerja yang diberikan tanggung jawab untuk pengelolaan rujukan statistik adalah Subdirektorat Rujukan Statistik pada Direktorat Diseminasi Statistik. Unit kerja ini berada di Jl. Dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta 10710, gedung 2 lantai 3, telepon (021) 3841195, 3842508, 3810291-4 ext. 3210, 3211, 3212, dan 3213. Pada tingkat provinsi pengelola rujukan statistik dilakukan oleh Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS), sementara itu, pada tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh seksi IPDS.

Pengelola Rujukan Statistik di tingkat pusat akan melakukan evaluasi, pemantauan, dan penyempurnaan Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa) agar dapat berjalan secara maksimal dan efisien. Sementara itu, pengelola di tingkat provinsi dan kabupaten/kota lebih dititik beratkan pada pelaksanaan pemberian rekomendasi kegiatan statistik. SIRuSa memberikan informasi mengenai seluruh kegiatan statistik dasar, statistik sektoral, maupun statistik khusus, baik yang sedang berjalan maupun yang telah selesai dilaksanakan.

2. Penyelenggara Statistik

Penyelenggara kegiatan statistik dapat dirinci menjadi tiga yaitu

a. *Subject Matter* di Badan Pusat Statistik

Subject Matter adalah unit penyelenggara kegiatan statistik di BPS yang berada di BPS Pusat maupun di BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota.

b. Kementerian/Lembaga Pemerintah

Kementerian/Lembaga pemerintah adalah unit penyelenggara kegiatan statistik sektoral, baik yang berada di Kementerian, Lembaga, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan kantor pemerintahan lainnya selain BPS. Kementerian/Lembaga pemerintah tersebut wajib melaporkan hasil kegiatan statistik sektoral yang telah dilakukan kepada BPS, baik yang telah selesai maupun yang sedang berjalan dengan mengirimkan dokumen laporan.

Melalui SIRuSa, kementerian/lembaga pemerintah dapat memperoleh informasi tentang metadata kegiatan statistik yang dilakukan unit kerjanya maupun oleh unit kerja yang lain di kementerian/lembaga pemerintah sendiri, metadata kegiatan statistik kementerian/lembaga pemerintah lain, serta informasi mengenai prosedur rekomendasi dalam penyelenggaraan kegiatan statistik.

c. Lembaga Swasta

Lembaga swasta adalah unit penyelenggara kegiatan statistik khusus, baik berupa badan atau lembaga penelitian milik swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi maupun kegiatan perorangan lainnya. Lembaga swasta wajib melaporkan sinopsis kegiatan statistik khusus yang telah dilakukannya, dengan mengirim dokumen laporan langsung ke BPS.

Melalui SIRuSa, lembaga swasta dapat memperoleh informasi tentang metadata kegiatan statistik khusus yang dilakukan unit kerjanya maupun oleh unit kerja yang lain di lembaga swasta sendiri, serta metadata kegiatan statistik lembaga swasta lain.

3. Pengguna

Kelompok ketiga adalah kelompok pengguna data statistik, kelompok ini terdiri dari pengguna internet maupun masyarakat umum.

a. Pengguna Internet

Pengguna internet adalah masyarakat umum di perusahaan, lembaga pendidikan, organisasi, maupun perorangan yang berkepentingan dengan suatu kegiatan statistik tertentu yang telah dikumpulkan oleh BPS dengan menggunakan fasilitas internet. Para pengguna dapat melakukan pencarian informasi mengenai berbagai kegiatan statistik baik statistik dasar, sektoral maupun khusus yang telah dilakukan oleh BPS, kementerian/lembaga pemerintah, maupun lembaga swasta, dalam *website* SIRuSa melalui internet.

b. Masyarakat Umum

Masyarakat umum adalah perusahaan, organisasi, maupun perorangan yang berkepentingan dengan suatu kegiatan statistik tertentu yang telah dilakukan oleh BPS, kementerian/lembaga pemerintah, maupun lembaga swasta, dengan

datang langsung ke BPS u.p Subdirektorat Rujukan Statistik, Direktorat Diseminasi Statistik BPS.

Masyarakat umum dapat melakukan pencarian informasi mengenai kegiatan statistik baik statistik dasar, sektoral maupun khusus yang telah dilakukan oleh BPS, kementerian/lembaga pemerintah, maupun lembaga swasta, dalam kunjungannya ke Subdirektorat Rujukan Statistik.

2. 3. Manfaat

Koordinasi dan kerjasama yang baik diantara ketiga kelompok pendukung Sistem Statistik Nasional akan memberikan dampak positif terhadap efektifitas dan efisiensi kegiatan perstatistikan di Indonesia. Pengguna statistik dasar tidak hanya dapat mengakses produk-produk yang dihasilkan oleh BPS, tetapi juga dapat memberikan saran dan pertimbangan yang akan digunakan sebagai masukan dalam penyempurnaan penyelenggaraan statistik dasar.

Pelaksanaan kegiatan Statistik Sektoral juga sangat membutuhkan kerja sama yang baik antara BPS sebagai pengelola/koordinator kegiatan statistik dan instansi pemerintah di luar BPS sebagai penyelenggara kegiatan statistik, sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Dengan diaplikasikannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 kaitannya dengan pelaksanaan Statistik Sektoral maka diharapkan tidak akan terjadi duplikasi dalam penyelenggaraan statistik dan hasilnya dapat dimanfaatkan secara optimal, serta dalam rangka menyusun *Metadatabase* Statistik Sektoral yang dapat diakses oleh semua pihak.

Melalui pelaksanaan pelaporan sinopsis Statistik Khusus (mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999) yang kemudian akan dirangkum dalam Metadata Statistik Khusus oleh BPS, diharapkan dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat pengguna statistik.

2. 4. Forum Data dan Informasi Pembangunan

Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 31 yang menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan

didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada era otonomi, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengatur berbagai aspek pembangunan sehingga membutuhkan data dan informasi pembangunan secara komprehensif dan terpadu. Data yang diperlukan tidak hanya di tingkat kabupaten/kota melainkan juga sampai di tingkat wilayah terkecil.

Sumber data yang digunakan diperoleh dari sensus, survei, dan kompilasi produk administrasi. Pelaksanaan sensus (sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi) dan survei berskala besar dilaksanakan oleh BPS secara reguler di seluruh wilayah Indonesia. Selain BPS, survei juga dilaksanakan oleh instansi lain baik ditingkat nasional maupun daerah untuk menghasilkan data sektoral. Keseluruhan data yang dihasilkan oleh berbagai sumber tersebut dapat digunakan untuk membuat perencanaan pembangunan yang optimal dan tanggap terhadap permasalahan krusial daerah, sehingga program maupun kegiatan yang direncanakan mudah diukur dan tidak bersifat normatif.

Penyediaan data untuk perencanaan pembangunan daerah masih menghadapi berbagai permasalahan, antara lain

1. Data tersebar di instansi sektoral;
2. Adanya kesenjangan data antara yang dibutuhkan dengan yang tersedia;
3. Adanya perubahan alur data sektoral sejak berlakunya otonomi daerah.

Perubahan alur data sektoral telah mengakibatkan data sektoral di tingkat provinsi dan nasional tidak lagi tersedia secara lengkap.

Untuk membahas permasalahan-permasalahan tersebut, sampai saat ini belum terdapat suatu wadah atau forum yang cukup mamadai baik di pusat maupun di daerah. Di pusat sudah ada upaya untuk mendorong pembentukan forum data melalui Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2014 tentang Peningkatan Efektifitas Tugas Dan Fungsi Unit Data dan Informasi di Kementerian dan Lembaga untuk Penyelenggaraan Data Pembangunan Berkelanjutan.

Forum data tersebut adalah wadah komunikasi data dan informasi lintas dan intra sektor, lintas dan intra daerah untuk mendukung keterpaduan pengelolaan data pembangunan berkelanjutan dan penguatan sistem satu Data Pembangunan Berkelanjutan.

Beberapa provinsi dan kabupaten/kota sudah ada forum sejenis ini seperti Forum Daerah Dalam Angka (DDA), Forum MDGs, dan Konsolidasi Regional (Konreg) PDRB. Namun demikian forum-forum tersebut sifatnya masih terbatas dalam hal berikut:

1. Tujuan forum yang hanya membahas program tertentu;
2. Masih berupa kelembagaan forum yang bersifat non formal;
3. Manfaat forum masih terbatas untuk sektor-sektor tertentu;
4. Keanggotaan belum mencakup seluruh SKPD dan tidak permanen.

Dengan adanya keterbatasan tersebut, maka perlu dibangun sebuah forum yang mampu memfasilitasi pembahasan tentang berbagai permasalahan data dan sekaligus mampu memberikan data dan informasi untuk perencanaan pembangunan secara komprehensif dan terpadu. Secara ideal, cakupan dan kenggotaan forum ini diharapkan lebih luas serta legalitasnya lebih kuat dibanding forum yang telah dibentuk dan berjalan di beberapa provinsi maupun kabupaten/kota selama ini. Forum ini dinamakan Forum Data dan Informasi Pembangunan Daerah atau disingkat Forum Data. Forum tersebut harus memiliki status kelembagaan formal dengan pengesahan surat keputusan kepala pemerintah daerah.

Apabila dalam satu daerah sudah terdapat lebih dari satu forum maka diharapkan forum data akan menjadi payung besar yang mampu mewadahi semua forum serta mencakup semua SKPD dan instansi vertikal di daerah.

Manfaat yang diharapkan dari terbentuknya forum data adalah

1. Terjadinya koordinasi dan komunikasi antar sektor dalam menyediakan dan memanfaatkan data;
2. Terciptanya jembatan antara penyedia data dengan pengguna data untuk mendiskusikan segi substansi, metodologi, konsep, dan penjelasan teknis yang digunakan oleh masing-masing instansi pemerintah pusat/daerah;

3. Tersedianya media diseminasi data dan informasi yang disiapkan oleh masing-masing instansi pemerintah pusat/daerah dan instansi vertikal;
4. Meningkatnya komitmen sektor dalam penyediaan data berkualitas tepat waktu;
5. Tersedianya media untuk advokasi kepada pengambil kebijakan untuk pemanfaatan data berkualitas bagi perencanaan pembangunan;
6. Tersedianya forum yang memberikan rekomendasi kegiatan untuk meningkatkan kualitas data yang dikumpulkan melalui *capacity building*.

<http://www.bps.go.id>

REKOMENDASI KEGIATAN SURVEI STATISTIK SEKTORAL

3. 1. Penyelenggara Kegiatan Survei Statistik Sektoral

Kegiatan statistik seperti survei tidak hanya dilakukan oleh BPS saja, tetapi juga dapat dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah lainnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, instansi pemerintah yang akan melakukan kegiatan statistik diwajibkan melaporkan kegiatan statistik yang akan dilaksanakan kepada BPS. Setelah diteliti dan diproses oleh BPS akan dikeluarkan suatu rekomendasi yang menyatakan kegiatan yang bersangkutan layak atau tidak untuk dilanjutkan.

Adanya pemberitahuan kegiatan statistik sektoral ke BPS diharapkan dapat membantu masyarakat umum dalam mencari data statistik yang diperlukan. *Information base* kegiatan statistik yang dikembangkan tidak hanya memuat Kegiatan Statistik Dasar tetapi juga mencakup kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga pemerintah selain BPS dan lembaga swasta. Peran aktif kementerian/lembaga pemerintah dalam melaporkan kegiatan statistik ke BPS sangat membantu BPS dalam mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang baik.

Instansi pemerintah yang wajib mengikuti rekomendasi atas penyelenggaraan survei statistik sektoral:

1. Pada prinsipnya, semua instansi pemerintah, baik kementerian maupun lembaga pemerintah yang memperoleh dana dari APBN dan atau APBD wajib memberitahukan, mengikuti rekomendasi, dan menyerahkan hasil penyelenggaraan survei mereka.
2. Proses ini tidak berlaku untuk instansi pemerintah lain yang karena undang-undang tidak masuk Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik.
3. Konsultan-konsultan yang bekerjasama dengan kementerian/lembaga pemerintah dalam melaksanakan survei wajib memberitahukan, mengikuti rekomendasi, dan menyerahkan hasil penyelenggaraan survei mereka. Suatu survei dikategorikan sebagai dilaksanakan oleh kementerian/lembaga pemerintah apabila kegiatan tersebut:

- a. Dilaksanakan sendiri oleh kementerian/lembaga pemerintah
 - b. Di sub kontrakkan kepada pihak lain (konsultan)
 - c. Didanai 50% atau lebih oleh pemerintah (APBD/APBD)
4. Survei yang dilakukan oleh konsultan independen di luar kementerian/lembaga pemerintah
- a. Jika sebuah perusahaan konsultan independen ditugaskan oleh suatu kementerian/lembaga pemerintah untuk menyelenggarakan suatu survei atas nama kementerian/lembaga pemerintah yang bersangkutan, maka survei yang dilaksanakannya tetap harus mengikuti rekomendasi dari BPS. Informasi yang harus diberikan ke BPS sama seperti jika instansi pemerintah tersebut menyelenggarakan survei sendiri.
 - b. Jika survei yang dilakukan merupakan inisiatif dari perusahaan konsultan tersebut sebagai bagian dari pelayanan mereka, akan tetapi diawasi dan didanai oleh kementerian/lembaga pemerintah maka survei tersebut juga harus mengikuti rekomendasi dari BPS.
 - c. Jika survei yang diselenggarakan dananya merupakan patungan antara perusahaan konsultan dan kementerian/lembaga pemerintah maka yang bertanggung jawab melaporkan dan meminta rekomendasi BPS adalah kementerian/lembaga pemerintah yang mendanai sebagian survei tersebut.

3. 2. Prosedur Rekomendasi Kegiatan Survei Statistik Sektoral

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, penyelenggara survei Statistik Sektoral wajib memberitahukan rencana penyelenggaraan surveinya kepada BPS, mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS, dan menyerahkan hasil penyelenggaraan survei yang dilakukannya kepada BPS (Undang-Undang Nomor 16 pasal 12 ayat 4 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 pasal 26).

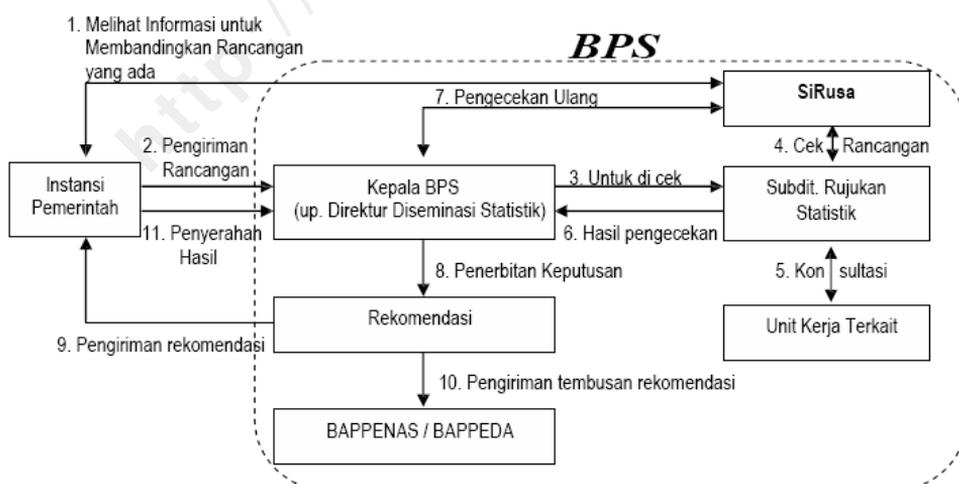
Pemberitahuan rancangan penyelenggaraan survei Statistik Sektoral kepada BPS dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan statistik tidak terjadi duplikasi penyelenggaraan survei dan hasil kegiatan statistik sektoral tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal serta dalam rangka menyusun Metadatabase Statistik Sektoral yang dapat diakses oleh semua pihak.

Pemberitahuan penyelenggaraan survei Statistik Sektoral disampaikan kepada Kepala BPS, Kepala BPS Provinsi, atau Kepala BPS Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila wilayah survei mencakup lebih dari satu provinsi, maka pemberitahuan rancangan disampaikan kepada:
Kepala BPS
u.p. Direktur Diseminasi Statistik
2. Apabila wilayah survei hanya mencakup satu provinsi atau beberapa kabupaten/kota dalam satu provinsi, maka pemberitahuan rancangan disampaikan kepada:
Kepala BPS Provinsi
u.p. Kepala Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS)
3. Apabila wilayah survei hanya mencakup satu kabupaten/kota, maka pemberitahuan rancangan disampaikan kepada:
Kepala BPS Kabupaten/Kota
u.p. Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS)
4. Apabila survei diselenggarakan oleh instansi pemerintah pusat di wilayah tertentu, maka pemberitahuan rancangan disampaikan kepada Kepala BPS dengan tembusan kepada Kepala BPS di wilayah yang akan dilakukan survei.

3.2.1. Prosedur Rekomendasi Survei Statistik Sektoral di BPS

Prosedur pemberitahuan dan rekomendasi survei statistik sektoral adalah



Gambar 1. Alur Rekomendasi Survei Statistik Sektoral di BPS

1. Melihat informasi pada *website* SIRuSa

Instansi pemerintah yang akan melakukan survei Statistik Sektoral lintas provinsi, sebelum mengirimkan rancangan kegiatan statistik kepada BPS perlu terlebih dahulu melihat informasi kegiatan statistik sektoral pada *website* SiRusa. Hal ini dimaksudkan untuk mengecek bahwa survei yang akan dilakukan oleh instansi pemerintah tersebut sudah atau belum pernah dilakukan oleh instansi lainnya.

2. Mengirim rancangan survei statistik sektoral

Jika survei yang akan dilakukan oleh instansi pemerintah sudah pernah dilakukan oleh instansi lainnya, maka disarankan untuk menggunakan hasil survei yang dilakukan oleh instansi lain tersebut dengan menghubungi *contact person*-nya atau memperluas cakupan sampel dari survei yang sudah pernah dilakukan oleh instansi lain tersebut.

Jika survei yang akan dilakukan oleh instansi pemerintah belum pernah dilakukan oleh instansi lainnya, maka instansi pemerintah tersebut dapat mengisi formulir pemberitahuan rancangan survei statistik sektoral (formulir FS3) yang dapat diperoleh di kantor BPS atau mengunduh dari *website* SIRuSa. Kemudian kirimkan formulir tersebut kepada Kepala BPS up. Direktur Diseminasi Statistik.

3. Menerima dan meneruskan rancangan survei

Formulir pemberitahuan rancangan survei statistik sektoral yang diterima oleh Direktur Diseminasi Statistik kemudian akan diteruskan kepada Subdirektorat Rujukan Statistik, Seksi Rekomendasi Statistik.

4. Melakukan pengecekan data pada SIRuSa

Formulir pemberitahuan rancangan survei statistik sektoral yang diterima oleh Seksi Rekomendasi Statistik akan dicek dengan informasi kegiatan statistik sektoral pada *website* SiRusa. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya duplikasi kegiatan statistik sektoral.

Apakah rancangan sudah ada di SIRuSa?

Jika rancangan survei belum ada di SIRuSa maka proses dilanjutkan dengan meneliti dan mengevaluasi rancangan survei tersebut.

Jika rancangan survei sudah ada di SIRuSa maka BPS akan memberikan saran kepada instansi pemerintah yang mengirimkan rancangan survei tersebut untuk melakukan perubahan terhadap rancangan surveinya. Perubahan dapat dilakukan pada cakupan wilayah survei, variabel yang akan disurvei, dan

lainnya. Namun jika instansi pemerintah tersebut tidak ingin melakukan perubahan rancangan surveinya maka BPS akan memberikan saran untuk menggunakan hasil survei yang dilakukan oleh instansi lain tersebut dengan menghubungi *contact person*-nya.

Apakah ingin melakukan perubahan rancangan?

Pemberitahuan perubahan rancangan survei dikirimkan kembali kepada BPS untuk diteliti dan dievaluasi kembali oleh Seksi Rekomendasi Statistik.

5. Meneliti dan mengevaluasi rancangan survei statistik sektoral dan Konsultasi Seksi Rekomendasi Statistik meneliti dan mengevaluasi rancangan survei statistik sektoral berkoordinasi dengan unit kerja terkait di BPS (*subject matter* BPS). Jika hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa rancangan survei tersebut layak untuk dilakukan maka Seksi Rekomendasi Statistik akan memberikan identitas nomor rekomendasi pada formulir FS3 dan membuat surat rekomendasi.

Jika hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa rancangan survei tersebut tidak layak untuk dilakukan maka Seksi Rekomendasi Statistik akan memberikan catatan mengenai ketidaklayakan survei tersebut dan membuat surat rekomendasi.

6. Menyerahkan hasil pengecekan rancangan

Seksi Rekomendasi Statistik menyerahkan surat rekomendasi dan formulir FS3 yang sudah diberi nomor registrasi rekomendasi kepada Direktur Diseminasi Statistik untuk ditandatangani.

7. Pengecekan Ulang

Direktur Diseminasi Statistik melakukan pengecekan ulang rancangan survei pada informasi kegiatan statistik sektoral pada *website* SiRusa dan meneliti formulir FS3.

Apakah rancangan layak?

Surat rekomendasi yang menyatakan suatu survei layak untuk dilakukan selanjutnya akan ditandatangani oleh Direktur Diseminasi Statistik. Surat rekomendasi dan formulir FS3 dikembalikan kepada instansi pemerintah penyelenggara survei.

Surat rekomendasi yang menyatakan suatu survei tidak layak untuk dilakukan selanjutnya akan ditandatangani oleh Direktur Diseminasi Statistik. Surat rekomendasi, laporan hasil pemeriksaan, dan formulir FS3 dikembalikan kepada instansi pemerintah penyelenggara survei.

Apakah ingin melakukan perubahan?

Survei direkomendasikan layak akan memperoleh nomor registrasi rekomendasi yang wajib dicantumkan pada kuesioner dan buku pedoman yang digunakan pada survei. Survei tidak dapat dilakukan sebelum surat rekomendasi diterima oleh instansi penyelenggara survei.

Survei yang direkomendasikan tidak layak tidak bisa dilanjutkan. Surat rekomendasi akan dilampirkan laporan hasil pemeriksaan BPS mengenai kriteria pemeriksaan dan permasalahannya. Survei yang direkomendasikan tidak layak dapat diajukan kembali formulir pemberitahuan surveinya setelah diperbaiki sesuai kriteria layak pada laporan hasil pemeriksaan BPS.

8. Menerbitkan surat rekomendasi survei statistik sektoral

Direktur Diseminasi Statistik akan menerbitkan surat rekomendasi untuk survei yang dinyatakan layak untuk dilakukan.

9. Pengiriman surat rekomendasi

Surat rekomendasi survei statistik sektoral dikirimkan ke instansi penyelenggara survei statistik sektoral yang bersangkutan.

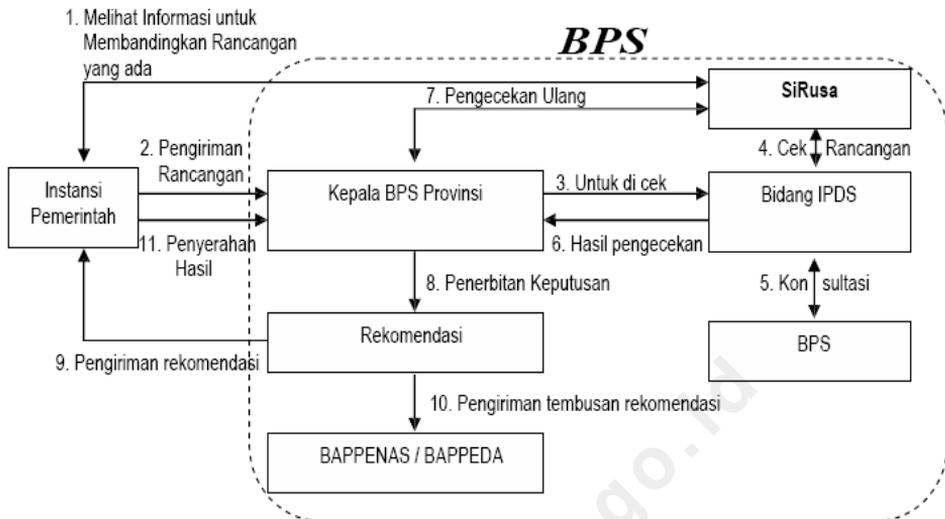
10. Pengiriman tembusan surat rekomendasi

Tembusan surat rekomendasi dikirimkan kepada Kepala BAPPENAS sesuai peraturan yang berlaku. Untuk survei yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah pusat di wilayah tertentu, maka surat rekomendasi ditembuskan kepada BPS dan BAPPEDA Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah dilakukannya survei. Surat rekomendasi disampaikan kepada instansi pemerintah yang bersangkutan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah penerimaan secara lengkap pemberitahuan rancangan survei.

Instansi pemerintah yang menyelenggarakan survei statistik sektoral dan hasilnya akan disebarluaskan atau dapat dimanfaatkan oleh pihak lain maka wajib menyerahkan hasil survei tersebut kepada BPS dengan melampirkan formulir FS3 yang sudah disempurnakan. Hasil survei yang wajib diserahkan kepada BPS berupa publikasi dalam bentuk hardcopy atau softcopy. Hasil survei diserahkan kepada BPS selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum disebarluaskan kepada pihak lain. Prosedur penyampaian hasil survei sama dengan prosedur penyampaian pemberitahuan rancangan survei.

3.2.2. Prosedur Rekomendasi Survei Statistik Sektoral di BPS Provinsi

Prosedur pemberitahuan dan rekomendasi survei statistik sektorال adalah



Gambar 2. Alur Rekomendasi Survei Statistik Sektoral di BPS Provinsi

1. Melihat informasi pada *website* SiRusa

Instansi pemerintah provinsi yang akan melakukan survei statistik sektorال di satu provinsi tertentu atau beberapa kabupaten/kota dalam satu provinsi, sebelum mengirimkan rancangan kegiatan statistik kepada BPS Provinsi perlu terlebih dahulu melihat informasi kegiatan statistik sektorال pada *website* SiRusa. Hal ini dimaksudkan untuk mengecek bahwa survei yang akan dilakukan oleh instansi pemerintah provinsi tersebut sudah atau belum pernah dilakukan oleh instansi lainnya.

2. Mengirim rancangan survei statistik sektorال

Jika survei yang akan dilakukan oleh instansi pemerintah provinsi sudah pernah dilakukan oleh instansi lainnya, maka disarankan untuk menggunakan hasil survei yang dilakukan oleh instansi lain tersebut dengan menghubungi *contact person*-nya atau memperluas cakupan sampel dari survei yang sudah pernah dilakukan oleh instansi lain tersebut.

Jika survei yang akan dilakukan oleh instansi pemerintah provinsi belum pernah dilakukan oleh instansi lainnya, maka instansi pemerintah provinsi tersebut dapat mengisi formulir pemberitahuan rancangan survei statistik sektorال (formulir FS3) yang dapat diperoleh di kantor BPS Provinsi atau mengunduh

dari *website* SIRuSa. Kemudian kirimkan formulir tersebut kepada Kepala BPS Provinsi up. Kepala Bidang IPDS.

3. Menerima dan meneruskan rancangan survei

Formulir pemberitahuan rancangan survei statistik sektoral yang diterima oleh Kepala Bidang IPDS BPS Provinsi kemudian akan diteruskan kepada Seksi Jaringan dan Rujukan Statistik.

4. Melakukan pengecekan data pada SIRuSa

Formulir pemberitahuan rancangan survei statistik sektoral yang diterima oleh Seksi Jaringan dan Rujukan Statistik akan dicek dengan informasi kegiatan statistik sektoral pada *website* SiRusa. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya duplikasi kegiatan statistik sektoral.

Apakah rancangan sudah ada di SIRuSa?

Jika rancangan survei belum ada di SIRuSa maka proses dilanjutkan dengan meneliti dan mengevaluasi rancangan survei tersebut.

Jika rancangan survei sudah ada di SIRuSa maka BPS Provinsi akan memberikan saran kepada instansi pemerintah provinsi yang mengirimkan rancangan survei tersebut untuk melakukan perubahan terhadap rancangan surveinya. Perubahan dapat dilakukan pada cakupan wilayah survei, variabel yang akan disurvei, dan lainnya. Namun jika instansi pemerintah provinsi tersebut tidak ingin melakukan perubahan rancangan surveinya maka BPS Provinsi akan memberikan saran untuk menggunakan hasil survei yang dilakukan oleh instansi lain tersebut dengan menghubungi *contact person*-nya.

Apakah ingin melakukan perubahan rancangan?

Pemberitahuan perubahan rancangan survei dikirimkan kembali kepada BPS Provinsi untuk diteliti dan dievaluasi kembali oleh Seksi Jaringan dan Rujukan Statistik.

5. Meneliti dan mengevaluasi rancangan survei statistik sektoral dan Konsultasi Seksi Jaringan dan Rujukan Statistik meneliti dan mengevaluasi rancangan survei statistik sektoral berkoordinasi dengan unit kerja terkait di BPS Provinsi (*subject matter* BPS Provinsi) dan Subdirektorat Rujukan Statistik BPS. Jika hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa rancangan survei tersebut layak untuk dilakukan maka Seksi Jaringan dan Rujukan Statistik akan memberikan identitas nomor rekomendasi pada formulir FS3 dan membuat surat rekomendasi.

Jika hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa rancangan survei tersebut tidak layak untuk dilakukan maka Seksi Jaringan dan Rujukan Statistik akan memberikan catatan mengenai ketidaklayakan survei tersebut dan membuat surat rekomendasi.

6. Menyerahkan hasil pengecekan rancangan

Seksi Jaringan dan Rujukan Statistik menyerahkan surat rekomendasi dan formulir FS3 yang sudah diberi nomor registrasi rekomendasi kepada Kepala BPS Provinsi untuk ditandatangani.

7. Pengecekan Ulang

Kepala BPS Provinsi melakukan pengecekan ulang rancangan survei pada informasi kegiatan statistik sektoral pada *website* SiRusa dan meneliti formulir FS3.

Apakah rancangan layak?

Surat rekomendasi yang menyatakan suatu survei layak untuk dilakukan selanjutnya akan ditandatangani oleh Kepala BPS Provinsi. Surat rekomendasi dan formulir FS3 dikembalikan kepada instansi pemerintah penyelenggara survei.

Surat rekomendasi yang menyatakan suatu survei tidak layak untuk dilakukan selanjutnya akan ditandatangani oleh Kepala BPS Provinsi. Surat rekomendasi, laporan hasil pemeriksaan, dan formulir FS3 dikembalikan kepada instansi pemerintah penyelenggara survei.

Apakah ingin melakukan perubahan?

Survei direkomendasikan layak akan memperoleh nomor registrasi rekomendasi yang wajib dicantumkan pada kuesioner dan buku pedoman yang digunakan pada survei. Survei tidak dapat dilakukan sebelum surat rekomendasi diterima oleh instansi penyelenggara survei.

Survei yang direkomendasikan tidak layak tidak bisa dilanjutkan. Surat rekomendasi akan dilampirkan laporan hasil pemeriksaan BPS Provinsi mengenai kriteria pemeriksaan dan permasalahannya. Survei yang direkomendasikan tidak layak dapat diajukan kembali formulir pemberitahuan surveinya setelah diperbaiki sesuai kriteria layak pada laporan hasil pemeriksaan BPS Provinsi.

8. Menerbitkan surat rekomendasi survei statistik sektoral

Kepala BPS Provinsi akan menerbitkan surat rekomendasi untuk survei yang dinyatakan layak untuk dilakukan.

9. Pengiriman surat rekomendasi

Surat rekomendasi survei statistik sektoral dikirimkan ke instansi penyelenggara survei statistik sektoral yang bersangkutan.

10. Pengiriman tembusan surat rekomendasi

Tembusan surat rekomendasi dikirimkan kepada instansi penyelenggara survei statistik sektoral yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala BAPPEDA Provinsi sesuai peraturan yang berlaku.

Surat rekomendasi disampaikan kepada instansi pemerintah provinsi yang bersangkutan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah penerimaan secara lengkap pemberitahuan rancangan survei.

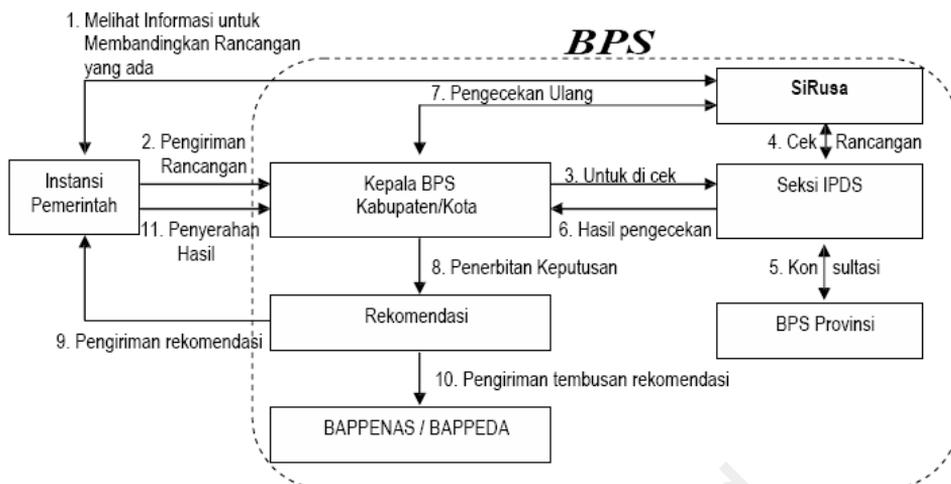
Instansi pemerintah provinsi menyelenggarakan survei statistik sektoral dan hasilnya akan disebarluaskan atau dapat dimanfaatkan oleh pihak lain maka wajib menyerahkan hasil survei tersebut kepada BPS Provinsi dengan melampirkan formulir FS3 yang sudah disempurnakan. Hasil survei yang wajib diserahkan kepada BPS Provinsi berupa publikasi dalam bentuk hardcopy atau softcopy. Hasil survei diserahkan kepada BPS Provinsi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum disebarluaskan kepada pihak lain. Prosedur penyampaian hasil survei sama dengan prosedur penyampaian pemberitahuan rancangan survei.

3.2.3. Prosedur Rekomendasi Survei Statistik Sektoral di BPS Kabupaten/Kota

Prosedur pemberitahuan dan rekomendasi survei statistik sektoral adalah

1. Melihat informasi pada *website* SIRuSa

Instansi pemerintah kabupaten/kota yang akan melakukan survei statistik sektoral di satu kabupaten/kota, sebelum mengirimkan rancangan kegiatan statistik kepada BPS Kabupaten/Kota perlu terlebih dahulu melihat informasi kegiatan statistik sektoral pada *website* SiRusa. Hal ini dimaksudkan untuk mengecek bahwa survei yang akan dilakukan oleh instansi pemerintah kabupaten/kota tersebut sudah atau belum pernah dilakukan oleh instansi lainnya.



Gambar 3. Alur Rekomendasi Survei Statistik Sektoral di BPS Kabupaten/Kota

2. Mengirim rancangan survei statistik sektoral

Jika survei yang akan dilakukan oleh instansi pemerintah kabupaten/kota sudah pernah dilakukan oleh instansi lainnya, maka disarankan untuk menggunakan hasil survei yang dilakukan oleh instansi lain tersebut dengan menghubungi *contact person*-nya atau memperluas cakupan sampel dari survei yang sudah pernah dilakukan oleh instansi lain tersebut.

Jika survei yang akan dilakukan oleh instansi pemerintah kabupaten/kota belum pernah dilakukan oleh instansi lainnya, maka instansi pemerintah kabupaten/kota tersebut dapat mengisi formulir pemberitahuan rancangan survei statistik sektoral (formulir FS3) yang dapat diperoleh di kantor BPS Kabupaten/Kota atau mengunduh dari *website* SiRusa. Kemudian kirimkan formulir tersebut kepada Kepala BPS Kabupaten/Kota up. Kepala Seksi IPDS.

3. Menerima dan meneruskan rancangan survei

Formulir pemberitahuan rancangan survei statistik sektoral yang diterima oleh Kepala BPS Kabupaten/Kota kemudian akan diteruskan kepada Seksi IPDS.

4. Melakukan pengecekan data pada SiRusa

Formulir pemberitahuan rancangan survei statistik sektoral yang diterima oleh Seksi IPDS akan dicek dengan informasi kegiatan statistik sektoral pada *website* SiRusa. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya duplikasi kegiatan statistik sektoral.

Apakah rancangan sudah ada di SiRusa?

Jika rancangan survei belum ada di SIRuSa maka proses dilanjutkan dengan meneliti dan mengevaluasi rancangan survei tersebut.

Jika rancangan survei sudah ada di SIRuSa maka BPS Kabupaten/Kota akan memberikan saran kepada instansi pemerintah kabupaten/kota yang mengirimkan rancangan survei tersebut untuk melakukan perubahan terhadap rancangan surveinya. Perubahan dapat dilakukan pada cakupan wilayah survei, variabel yang akan disurvei, dan lainnya. Namun jika instansi pemerintah kabupaten/kota tersebut tidak ingin melakukan perubahan rancangan surveinya maka BPS Kabupaten/Kota akan memberikan saran untuk menggunakan hasil survei yang dilakukan oleh instansi lain tersebut dengan menghubungi *contact person*-nya.

Apakah ingin melakukan perubahan rancangan?

Pemberitahuan perubahan rancangan survei dikirimkan kembali kepada BPS Kabupaten/Kota untuk diteliti dan dievaluasi kembali oleh Seksi IPDS.

5. Meneliti dan mengevaluasi rancangan survei statistik sektoral dan Konsultasi Seksi IPDS meneliti dan mengevaluasi rancangan survei statistik sektoral berkoordinasi dengan unit kerja terkait di BPS Kabupaten/Kota (*subject matter* BPS Kabupaten/Kota), Seksi IPDS BPS Provinsi, dan Subdirektorat Rujukan Statistik BPS. Jika hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa rancangan survei tersebut layak untuk dilakukan maka Seksi IPDS akan memberikan identitas nomor rekomendasi pada formulir FS3 dan membuat surat rekomendasi.

Jika hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa rancangan survei tersebut tidak layak untuk dilakukan maka Seksi IPDS akan memberikan catatan mengenai ketidaklayakan survei tersebut dan membuat surat rekomendasi.

6. Menyerahkan hasil pengecekan rancangan

Seksi IPDS menyerahkan surat rekomendasi dan formulir FS3 yang sudah diberi nomor registrasi rekomendasi kepada Kepala BPS Kabupaten/Kota untuk ditandatangani.

7. Pengecekan Ulang

Kepala BPS Kabupaten/Kota melakukan pengecekan ulang rancangan survei pada informasi kegiatan statistik sektoral pada *website* SiRusa dan meneliti formulir FS3.

Apakah rancangan layak?

Surat rekomendasi yang menyatakan suatu survei layak untuk dilakukan selanjutnya akan ditandatangani oleh Kepala BPS Kabupaten/Kota. Surat rekomendasi dan formulir FS3 dikembalikan kepada instansi pemerintah penyelenggara survei.

Surat rekomendasi yang menyatakan suatu survei tidak layak untuk dilakukan selanjutnya akan ditandatangani oleh Kepala BPS Kabupaten/Kota. Surat rekomendasi, laporan hasil pemeriksaan, dan formulir FS3 dikembalikan kepada instansi pemerintah penyelenggara survei.

Apakah ingin melakukan perubahan?

Survei direkomendasikan layak akan memperoleh nomor registrasi rekomendasi yang wajib dicantumkan pada kuesioner dan buku pedoman yang digunakan pada survei. Survei tidak dapat dilakukan sebelum surat rekomendasi diterima oleh instansi penyelenggara survei.

Survei yang direkomendasikan tidak layak tidak bisa dilanjutkan. Surat rekomendasi akan dilampirkan laporan hasil pemeriksaan BPS Kabupaten/Kota mengenai kriteria pemeriksaan dan permasalahannya. Survei yang direkomendasikan tidak layak dapat diajukan kembali formulir pemberitahuan surveinya setelah diperbaiki sesuai kriteria layak pada laporan hasil pemeriksaan BPS Kabupaten/Kota.

8. Menerbitkan surat rekomendasi survei statistik sektoral

Kepala BPS Kabupaten/Kota akan menerbitkan surat rekomendasi untuk survei yang dinyatakan layak untuk dilakukan.

9. Pengiriman surat rekomendasi

Surat rekomendasi survei statistik sektoral dikirimkan ke instansi penyelenggara survei statistik sektoral yang bersangkutan.

10. Pengiriman tembusan surat rekomendasi

Tembusan surat rekomendasi dikirimkan kepada Kepala BAPPEDA Kabupaten/Kota sesuai peraturan yang berlaku.

Surat rekomendasi disampaikan kepada instansi pemerintah provinsi yang bersangkutan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah penerimaan secara lengkap pemberitahuan rancangan survei.

Instansi pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan survei statistik sektoral dan hasilnya akan disebarluaskan atau dapat dimanfaatkan oleh pihak lain maka wajib menyerahkan hasil survei tersebut kepada BPS Kabupaten/Kota dengan melampirkan formulir FS3 yang sudah disempurnakan. Hasil survei yang wajib diserahkan kepada BPS Kabupaten/Kota berupa publikasi dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy*. Hasil survei diserahkan kepada BPS Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum disebarluaskan kepada pihak lain. Prosedur penyampaian hasil survei sama dengan prosedur penyampaian pemberitahuan rancangan survei.

4.1. Pengertian

Metadata sering diartikan informasi mengenai data atau data tentang data. Batasan tersebut tampaknya tidak lagi tepat untuk memberikan pemahaman tentang metadata. Dalam berbagai referensi, metadata kemudian dapat diartikan sebagai informasi terstruktur yang menggambarkan, menjelaskan, menunjukkan tempat, atau lainnya yang membuat proses pengambilan, penggunaan, dan pengelolaan sumber informasi menjadi lebih mudah.

Istilah metadata saat ini digunakan oleh berbagai kalangan sehingga batasan metadata yang digunakan dapat berbeda dalam komunitas yang berbeda. Sebagian menggunakan untuk merujuk pada informasi yang dapat dipahami tentang suatu peralatan atau mesin. Sementara yang lain menggunakan hanya untuk menggambarkan perekaman sumber elektronik. Dalam kepustakaan lingkungan misalnya, metadata biasanya digunakan untuk berbagai skema formal yang berkaitan dengan deskripsi sumber daya yang penerapannya untuk berbagai jenis objek, baik digital maupun non digital. Dalam katalog perpustakaan tradisional, bentuk metadata standar seperti *Machine-Readable Cataloguing 21 (MARC 21)* dan berbagai rangkaian aturan yang digunakannya seperti *Anglo-American Cataloging Rules versi 2 (AACR2)*. Metadata yang lain dikembangkan untuk menggambarkan berbagai jenis objek tekstual maupun non tekstual termasuk buku-buku yang dipublikasikan, dokumen-dokumen elektronik, objek seni, materi pendidikan dan pelatihan, dan serangkaian data ilmiah.

Dalam *Generic Statistical Business Process Model (GSBPM)*, metadata perlu ada mulai perencanaan hingga diseminasi. Adapun metadata statistik merupakan informasi yang menggambarkan atau mendokumentasikan tentang data statistik. Metadata statistik memfasilitasi pembagian, pencarian, dan pemahaman data statistik. Dengan metadata statistik akan diperoleh gambaran yang lebih detail seperti terminologi dan definisi, klasifikasi, lokasi data statistik, metodologi, dan publikasinya.

4.2. Metadata Kegiatan Statistik

Kegiatan statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya-upaya yang mengarah pada berkembangnya Sistem Statistik Nasional. Kegiatan statistik diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional; mengembangkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien; meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik; dan mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, di Indonesia kegiatan statistik dibagi menjadi tiga yaitu kegiatan Statistik Dasar, Sektoral, dan Khusus. Dengan demikian, metadata kegiatan statistik yang dikumpulkan juga dapat dikelompokkan menjadi tiga mengikuti pembagiannya, yaitu:

4.2.1. Metadata Kegiatan Statistik Dasar

Kegiatan Statistik Dasar merupakan kegiatan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional maupun regional, makro dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab BPS. Dalam kegiatan statistik dasar, terdapat tiga kegiatan utama yaitu sensus, survei, dan kompilasi produk administrasi.

Statistik Dasar mencakup statistik bidang ekonomi, bidang kesejahteraan rakyat, dan bidang-bidang lainnya yang jenis dan ragamnya telah dan akan dikembangkan oleh BPS. Statistik dasar dapat dilakukan secara berkala, terus menerus, dan atau sewaktu-waktu yang periode pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala BPS dengan memperhatikan kebutuhan data baik dari pemerintah maupun masyarakat.

Metadata Statistik Dasar memuat informasi mengenai penyelenggaraan kegiatan Statistik Dasar, pengumpulan metadata dilakukan melalui kuesioner Q-Metadata Dasar. Q-Metadata Dasar diisi oleh *subject matter* BPS yang dilaporkan kepada Kepala Subdirektorat Rujukan Statistik. Pada tahun 2015, kuesioner Q-Metadata Dasar mengumpulkan variabel-variabel terkait kegiatan statistik yang dilaksanakan BPS, sebagai berikut:

1. Nama kegiatan

Nama kegiatan merupakan nama dari kegiatan statistik yang dilakukan oleh *subject matter*, baik berupa sensus, survei, atau kegiatan kompilasi statistik.

2. Tahun kegiatan

Tahun kegiatan adalah tahun dilaksanakannya kegiatan yang bersangkutan.

3. Sektor kegiatan

Kegiatan statistik yang dilakukan dibagi dalam beberapa kategori sektor, yaitu pertanian; industri, pertambangan, energi, dan konstruksi; keuangan, niaga, dan jasa; neraca nasional dan regional; sosial dan kesejahteraan rakyat; kependudukan dan ketenagakerjaan; harga; teknologi informasi dan komunikasi; serta sektor lain selain kategori tersebut diatas.

4. Status kegiatan

Status kegiatan digunakan untuk membedakan apakah kegiatan statistik tersebut merupakan kegiatan baru atau kegiatan lanjutan.

5. Penanggung jawab kegiatan

Penanggung jawab kegiatan mencakup penyelenggara, penanggung jawab masalah teknis, penanggung jawab metode pengumpulan data, penanggung jawab metode pengolahan data, penanggung jawab sumber dana, serta sumber pendanaan dari kegiatan statistik terkait.

6. Perencanaan dan persiapan kegiatan

Perencanaan dan persiapan kegiatan mencakup perencanaan dan persiapan kegiatan secara umum, antara lain latar belakang, tujuan, riwayat, perubahan yang terjadi, referensi yang digunakan, klasifikasi/master yang digunakan, serta jadwal kegiatan. Selain itu perencanaan dan persiapan ini mencakup variabel utama yang dikumpulkan; desain kegiatan; serta rancangan sampel khusus untuk kegiatan statistik dengan cara survei.

7. Pengumpulan data

Pengumpulan data memberikan informasi terkait petugas serta metode untuk mengetahui pengumpulan data, serta penyesuain non respon.

8. Pengolahan data

Pengolahan data merupakan keseluruhan informasi dari kegiatan statistik terkait pengolahan datanya, antara lain metode yang digunakan dalam melakukan pengolahan, unit kerja yang melakukan pengolahan, serta teknologi/aplikasi yang digunakan dalam pengolahan. Untuk kegiatan yang dilakukan dengan cara survei juga termasuk estimasi datanya.

9. Analisis data

Analisis mencakup metode dan unit dalam melakukan analisis. Juga termasuk penggunaan data sekunder dalam analisis serta pemanfaatan data oleh unit kerja atau instansi lain.

10. Diseminasi

Diseminasi dibedakan menjadi diseminasi publikasi serta diseminasi data mikro, yang masing-masing mencakup nama, jadwal rilis, level data, perbedaan wilayah perkotaan dan perdesaan, serta perbedaan dalam jenis kelamin. Diseminasi juga mencakup dokumentasi kegiatan terkait kuesioner dan pedoman yang digunakan.

11. Evaluasi

Evaluasi kegiatan ingin melihat apakah melakukan studi evaluasi serta apa rekomendasi yang dihasilkan untuk kegiatan yang akan datang.

12. Indikator dan variabel kegiatan

Indikator merupakan indikator apa saja yang dihasilkan oleh kegiatan tersebut, yang nantinya dapat dijadikan sebagai metadata indikator. Variabel kegiatan dalam hal ini merupakan variabel yang membentuk indikator tersebut, yang bisa dihasilkan oleh kegiatan tersebut maupun kegiatan lain.

4.2.2. Metadata Kegiatan Statistik Sektoral

Kegiatan statistik sektoral merupakan kegiatan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan yang dimaksud tidak termasuk kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan intern, yaitu kegiatan yang hasilnya tidak dipublikasikan atau disebarluaskan kepada pihak lain di luar instansi pemerintah yang bersangkutan.

Kegiatan statistik sektoral mencakup semua kegiatan statistik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, baik kementerian maupun lembaga pemerintah non kementerian, termasuk juga survei yang dilaksanakan oleh konsultan yang bekerja sama dengan instansi pemerintah. Suatu survei dikategorikan sebagai dilaksanakan oleh instansi pemerintah apabila kegiatan survei tersebut:

1. Dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah
2. Di subkontrakkan kepada pihak lain (konsultan)
3. Didanai 50% atau lebih oleh pemerintah (APBN/APBD)

Jenis kegiatan yang tercakup dalam kegiatan sektoral meliputi kegiatan statistik yang berupa kegiatan pendataan, survei, maupun kompilasi produk administrasi.

Metadata kegiatan statistik sektoral memuat informasi mengenai penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral, yang diperoleh dari Formulir Pemberitahuan Survei Statistik Sektoral (FS3) yang kurang lebih memuat variabel sebagai berikut:

1. Judul
2. Identifikasi penyelenggara survei
3. Penanggungjawab jawab survei (sebagai *contact person*)
4. Tujuan survei dan variabel yang dikumpulkan
5. Rancangan pengumpulan data
6. Rancangan sampel
7. Pengolahan data, estimasi, dan analisis

4.2.3. Metadata Kegiatan Statistik Khusus

Kegiatan statistik khusus meliputi kegiatan statistik yang diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya, secara mandiri atau bersama-sama dengan pihak lain, termasuk dengan BPS. Dalam penyelenggaraan statistik khusus, lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya memperoleh data melalui survei, kompilasi statistik, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik dan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, bahwa penyelenggaraan survei

statistik khusus wajib memberitahukan sinopsis hasil survei yang diselenggarakan kepada BPS.

Dalam Pasal 36 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, bahwa batas waktu dan tata cara pemberitahuan sinopsis diatur lebih lanjut oleh Kepala BPS. Ketentuan tentang tata cara pemberitahuan sinopsis survei statistik khusus dimaksudkan agar setiap kegiatan survei yang dipublikasikan dapat direkam melalui suatu metadata yang dapat digunakan sebagai rujukan informasi statistik yang lengkap dan bermanfaat bagi penyelenggara kegiatan statistik, dan responden.

Penyelenggara survei statistik khusus wajib memberitahukan sinopsis hasil survei statistik khusus yang diselenggarakannya kepada BPS dengan kriteria:

1. Hasilnya dipublikasikan
2. Menggunakan metode statistik
3. Merupakan data primer

Kewajiban memberitahukan sinopsis sebagaimana dimaksud, tidak berlaku bagi survei yang digunakan untuk intern.

Metadata statistik khusus memuat informasi mengenai penyelenggaraan kegiatan Statistik Khusus, yang diperoleh dari Formulir Pemberitahuan Sinopsis Survei Statistik Khusus (FS2K). Formulir tersebut memuat informasi sebagai berikut:

1. Judul survei
2. Identifikasi penyelenggara survei
3. Penanggungjawab survei (sebagai *contact person*)
4. Tujuan survei dan variabel yang dikumpulkan
5. Rancangan pengumpulan data
6. Waktu pelaksanaan survei dan abstraksi

4.3. Manfaat

Metadata kegiatan statistik yang tercatat dengan baik akan bermanfaat bagi banyak pihak, yaitu:

1. Pengembang data

Metadata dapat menghindari duplikasi, membagikan informasi yang sebenarnya, mempublikasikan usaha, mengurangi beban kerja, dan menjadi dokumentasi informasi data.

2. Pengguna data

Metadata dapat memudahkan pencarian maupun evaluasi informasi baik dari dalam maupun luar organisasi, memudahkan dalam menggunakan data agar sesuai dengan yang diperlukan, memudahkan dalam mengidentifikasi bagaimana data tersebut diperoleh, dihitung, dan diestimasi.

3. Organisasi/institusi

Metadata berguna untuk memudahkan pengelolaan data sebagai investasi organisasi; dokumentasi tahapan pengolahan data, pengendalian mutu, definisi, penggunaan data, keterbatasan, dan sebagainya; memudahkan mengingat keberadaan data sehingga menghemat waktu dan biaya media promosi yang menjelaskan serangkaian data dalam sebuah katalog referensi pembagian data keluar yaitu sebagai penjelasan untuk dimengerti orang lain secara benar; dan membantu instansi lain yang berpotensi menggunakan data.

5. 1. Formulir FS3

Blok I. Identifikasi Penyelenggaraan Survei

1.1. Instansi Pemerintah Penyelenggara

Tuliskan nama instansi pemerintah (kementerian/lembaga non kementerian/dinas). Penyelenggara survei ini dan dituliskan setingkat dengan eselon II, Misal: Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian

1.2. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara

Tuliskan dengan lengkap alamat instansi pemerintah penyelenggara (termasuk nomor telepon, faksimile, dan email).

Contoh : Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian

Jl. Harsono RM No.3, Gedung E Lantai IV, Ragunan

Kabupaten/Kota: Jakarta Selatan

Provinsi: DKI Jakarta

Blok II. Penanggung Jawab Survei (sebagai *Contact Person*)

2.1. Penanggung Jawab di Instansi

Tuliskan nama, jabatan, nomor telepon, nomor fax dan alamat email penanggung jawab survei di instansi penyelenggara survei. Penanggung jawab instansi disini sebaiknya yang mengetahui tentang informasi umum mengenai survei. Informasi umum adalah keterangan mengenai latar belakang, tujuan, cakupan dan lain-lainnya tentang survei ini.

2.2. Manajer Survei

Tuliskan nama, jabatan, alamat surat, nomor telepon, nomor fax, dan alamat email manajer survei.

Blok III. Informasi Umum

1.1. Survei ini dilakukan

Lingkari kode 1 jika survei dilakukan hanya sekali dan lingkari kode 2 jika survei ini dilakukan berulang kali.

1.2. Jika “Berulang” frekuensi penyelenggaraan Rincian 3.1. (selanjutnya akan ditulis R.3.1.) berkode 2

Lingkari kode yang sesuai dengan frekuensi dilakukannya survei ini.

1.3. Tipe pengumpulan data

Lingkari kode 1 jika tipe pengumpulan data pada survei ini *longitudinal*, kode 2 jika *cross sectional*, dan kode 3 jika gabungan *longitudinal* dan *cross sectional*.

1. *Longitudinal*, yaitu data dikumpulkan pada waktu yang berbeda (dari waktu ke waktu) dan dilakukan secara terus menerus untuk melihat perubahan yang terjadi, biasanya ada analisis secara deskriptif.
 - a. *Trend studies*: (1) dilakukan secara berkala; (2) setiap sampel mewakili populasi untuk waktu yang berbeda; (3) populasi sama, anggota mungkin berubah; (4) ada kemungkinan mengkaitkan antar variabel, tetapi tidak rinci.
 - b. *Cohort studies*: (1) fokusnya adalah spesifik populasi; (2) dilakukan secara berkala; (3) populasi keadaan awal dan diikuti.
 - c. *Parallel studies*: (1) dilakukan secara berkala; (2) sampel sama dan diikuti secara terus menerus; (3) analisa populasi tidak dimungkinkan dan rumit; (4) mahal dan membutuhkan waktu.
2. *Cross Sectional*, yaitu data dikumpulkan pada saat tertentu dari sampel terpilih dan menggambarkan suatu parameter pada saat itu (suatu saat) juga digunakan untuk mengaitkan suatu peubah dengan peubah lainnya (kajian mengaitkan antar variabel).

Blok IV. Tujuan Survei dan Peubah yang Dikumpulkan

1.1. Tujuan survei

Tuliskan tujuan diselenggarakannya survei ini secara ringkas dan jelas pada tempat yang telah disediakan.

1.2. Peubah (variabel) yang dikumpulkan pada survei ini dan periode enumerasi (referensi waktu)

Tuliskan peubah yang akan dikumpulkan dan periode enumerasi (referensi waktu) yang digunakan dalam survei ini.

Contoh :

Besarnya biaya untuk pekerja, pembelian bahan baku, bahan penolong, sewa tempat, dan lain-lain pada perusahaan industri elektronika, dengan periode enumerasi adalah setahun yang lalu.

Blok V. Rancangan Pengumpulan Data

5.1. Cara pengumpulan data

Tuliskan cara pengumpulan data yang akan dilakukan. Lingkari kode 1 jika pengumpulan data hanya pada sebagian populasi (sampel) dan lingkari kode 2 jika pengumpulan data pada seluruh populasi.

5.2. Survei dilakukan di

Tuliskan wilayah atau daerah dimana survei ini akan dilakukan. Lingkari kode 1 jika survei akan dilakukan di seluruh wilayah Indonesia dan lingkari kode 2 jika survei akan dilakukan di sebagian wilayah Indonesia.

Pengertian di seluruh wilayah Indonesia adalah bila survei tersebut dilakukan di semua provinsi dan mencakup semua kabupaten/kota yang ada di Indonesia, tetapi tidak harus mencakup seluruh kecamatan atau desa/kelurahan yang ada. Bila ada responden atau unit wilayah di satu kabupaten/kota yang terambil dalam suatu survei, maka kabupaten/kota tersebut sudah diartikan tercakup dalam survei yang dimaksud. Sehingga bila di semua kabupaten/kota ada sebagian wilayahnya yang terambil survei yang akan dilakukan, sudah diartikan mencakup seluruh wilayah Indonesia.

5.3. Bila disebagian wilayah Indonesia, survei dilakukan di

Tuliskan nama provinsi dan nama kabupaten/kota yang akan dicakup bila survei akan dilakukan disebagian wilayah Indonesia (tidak mencakup semua provinsi atau tidak mencakup semua kabupaten/kota yang ada di Indonesia). Bila dalam satu provinsi semua kabupaten/kota tercakup dalam survei yang akan dilakukan, tidak perlu ditulis nama-nama kabupaten/kota yang ada tetapi cukup ditulis "semua". Jika ruang yang tersedia tidak mencukupi gunakan kertas tambahan.

5.4. Metode pengumpulan data

Tentukan metode pengumpulan data yang dilakukan pada survei ini. Lingkari kode yang sesuai (bisa lebih dari satu). Jika isian lebih dari satu, jumlahkan kode yang terpilih dan pindahkan ke kotak yang tersedia. Misal, jika metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara langsung dan juga melalui pengamatan (observasi), maka kode 1 dan 8 dilingkari dan pada kotak terisi angka 9.

1. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.
2. Wawancara langsung adalah wawancara yang dilaksanakan secara langsung kepada responden dengan cara menanyakan secara langsung (tatap muka) atas setiap rincian pertanyaan yang ada dalam kuesioner yang sudah disiapkan untuk penyelenggaraan pengumpulan data.
3. Wawancara melalui sarana komunikasi adalah wawancara yang dilakukan tidak secara langsung tetapi dengan menggunakan sarana komunikasi (alat penghubung atau media) seperti telepon.
4. Swacaca adalah responden mengisi sendiri kuesioner yang diberikan.
5. Observasi adalah metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala/fenomena yang diselidiki. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan bantuan alat-alat seperti pemotret, alat perekam suara, pencatat kecepatan, dan sebagainya.
6. Lainnya bila tidak termasuk dalam definisi di atas.

5.5. Metode penelitian

Tentukan metode penelitian pada survei ini apakah sampel probabilitas atau sampel non probabilitas. Sampel probabilitas adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Sampel non probabilitas adalah teknik yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.

5.6. Metode untuk Sampel Non Probabilitas (bila R.5.5. berkode 2)

Jika P.5.5 kode yang dilingkari adalah kode 2 (sampel Non Probabilitas) jelaskan metode yang digunakan dan komposisi sampelnya. Teknik sampel non probabilitas meliputi:

1. Sampling sistematis (*systematic sampling*); teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Misalkan suatu populasi berisi 100 anggota diberi nomor urut 1 sampai dengan 100. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan nomor ganjil saja, genap saja, atau kelipatan dari bilangan tertentu.
2. Sampling kuota (*quota sampling*); teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan, jumlah subjek yang akan diselidiki ditetapkan terlebih dahulu.

Biasanya teknik ini juga disebut *judgement sampling* karena teknik pengambilan sampelnya berdasarkan pendapat atau pertimbangan-pertimbangan tertentu. Sampel yang terambil tidak selalu mewakili populasi.

3. Sampling aksidental (*accidental sampling*); teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, sangat subyektif, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.
4. *Sampling purposive*; teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, dengan catatan bahwa sampel tersebut mewakili populasi. Sering juga disebut *judgement sampling*. Dalam *purposive* pemilihan sekelompok subyek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Misalnya akan melakukan penelitian tentang disiplin pegawai, maka sampel yang dipilih adalah orang yang ahli dalam bidang kepegawaian saja.
5. Sampling jenuh; teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel.
6. *Snowball sampling*; teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak. Ibarat bola salju yang menggelinding, makin lama semakin besar. Biasanya diterapkan pada penelitian kualitatif.

5.7. Apakah melakukan Uji Coba (*Pilot Study*)

Lingkari kode 1 jika pada survei ini dilakukan pilot studi dan lingkari kode 2 jika tidak dilakukan uji coba. Jika kode 1, jelaskan secara singkat pelaksanaan uji coba tersebut, seperti jumlah responden, tempat pelaksanaan uji coba, frekuensi uji coba, dan lain-lain.

5.8. Petugas pengumpul data

Sebutkan petugas pengumpul data survei ini. Lingkari kode yang sesuai (bisa lebih dari satu)

5.9. Persyaratan pendidikan terendah petugas pengumpul data

Sebutkan persyaratan pendidikan terendah seluruh petugas pengumpul data survei ini, baik staf sendiri, mitra/kontrak, maupun lainnya. Lingkari kode yang sesuai (bisa lebih dari satu).

5.10. Apakah melakukan pelatihan petugas

Lingkari kode 1 jika petugas pelaksana survei ini mengikuti pelatihan terlebih dahulu atau lingkari kode 2 jika tidak. Jika “ya”, jelaskan secara ringkas tentang kegiatan pelatihan petugas tersebut. Misal antara lain berapa lama waktu pelatihan dan materi pokok pelatihan.

5.11. Jumlah petugas

Isikan jumlah petugas yang pelaksana survei ini sesuai dengan tugasnya, yaitu supervisi/penyelia dan petugas pengumpul data.

Blok VI. Rancangan Sampel (diisi bila R.5.1. berkode 1 dan R.5.5. berkode 1)

6.1. Jenis rancangan sampel

Tuliskan secara ringkas jenis rancangan sampel yang digunakan pada survei ini. Lingkari kode 1 jika rancangan sampel adalah *single stage/phase*, dan kode 2 jika rancangan sampel *multi stage/phase* atau rancangan sampel lebih dari satu tahap dan jelaskan.

1. *Single stage* adalah penarikan sampel langsung pada unit-unit yang terdaftar pada kerangka sampel (penarikan sampel hanya satu kali).
2. *Multi stage* adalah metode pengambilan sampel melalui dua tahap atau lebih dimana metode tiap tahapnya bisa berbeda. Baik digunakan bila populasi secara geografis tersebar dan tidak ada informasi untuk menyusun kerangka sampel.

Misal:

Tahap I: Populasi pertama terdiri dari seluruh kecamatan yang dipilih secara pps dari seluruh kabupaten yang ada;

Tahap II: Dari kecamatan terpilih diambil beberapa kelurahan/desa secara pps;

Tahap III: Dari desa terpilih dibuat daftar seluruh unit sampel yang akan digunakan.

6.2. Kerangka sampel

Tulis dan jelaskan secara rinci kerangka sampel yang digunakan. Jika bertahap tuliskan kerangka sampel untuk setiap tahap.

Yang dimaksud dengan kerangka sampel adalah daftar dari semua unsur sampel dalam populasi sampel, berisi seluruh unit dalam populasi yang akan dijadikan dasar penarikan sampel (dibentuk dari kerangka induk). Kerangka sampel dapat berupa daftar mengenai jumlah penduduk, jumlah bangunan, mungkin pula sebuah peta yang unit-unitnya tergambar secara jelas.

Sebaiknya kerangka sampel memenuhi syarat, sebagai berikut :

1. Meliputi seluruh unsur sampel, tersedia sampai satuan unit terkecil sebagai dasar penarikan sampel.
2. Unsur sampel tidak dihitung dua kali, tidak tumpang tindih atau terlewat.
3. *Up to date*
4. Mempunyai batas jelas
5. Mempunyai korelasi dengan data yang diteliti
6. Dapat dilacak di lapangan

Contoh :

Untuk satu tahap: Direktori Perusahaan Industri Besar dan Sedang di Tahun 1998.

Untuk dua tahap: Tahap I. Daftar Blok Sensus di DKI Jakarta 1999 Tahap II. Daftar Rumah Tangga pada tiap Blok Sensus di DKI Jakarta.

6.3. Metode pemilihan sampel

Tuliskan secara ringkas metode pemilihan sampel yang digunakan pada survei ini, misalnya *simple random sampling*, *stratified sampling*, *systematic sampling*, *quota sampling*, *synchronized sampling*. Jika survei ini menggunakan rancangan sampling *multi stage/phase*, jelaskan pemilihan sample pada tiap *stage/phase*.

1. *Simple random sampling*; pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.
2. *Stratified sampling*; pengambilan sampel dengan cara membagi populasi ke dalam kelompok-kelompok yang homogen (strata), dan kemudian sampel diambil secara acak dari setiap strata tersebut.
3. *Systematic sampling*; metode pengambilan sampel secara sistematis dengan interval tertentu dari suatu kerangka sampel yang telah diurutkan.

6.4. Keseluruhan fraksi sampel (*overall sampling fraction*)

Tuliskan fraksi sampel (n/N) secara keseluruhan. Jika rancangan sampel *multi stage/phase*, fraksi sampel yang ditulis adalah untuk seluruh tahap.

6.5. Unit sampel

Tuliskan unit sampel terkecil dan tuliskan jumlah seluruh sampel survei ini.

Unit sampel adalah unit yang dijadikan dasar penarikan sampel baik berupa elemen atau kumpulan elemen (klaster). Sebagai contoh rumah tangga dapat dijadikan unit sampel dan atau kumpulan rumah tangga pada wilayah tertentu yaitu blok sensus. Contoh lain dari unit sampel adalah daftar individu perusahaan/usaha.

6.6. Perkiraan *sampling error*

Tuliskan perkiraan *sampling error* pada survei ini.

Sampling error adalah penyimpangan yang terjadi karena adanya kesalahan dalam pemakaian sampel. Semakin besar sampel yang diambil maka semakin kecil terjadinya penyimpangan.

6.7. Responden

Tuliskan responden dan jumlah responden survei ini. Isian rincian ini bisa sama dengan rincian 6.5.

Responden survei yang dimaksud adalah orang yang terpilih untuk diwawancarai dalam kegiatan pengumpulan data baik langsung maupun tidak langsung.

Blok VII. Pengolahan Data, Estimasi, dan Analisis

7.1. Metode pengolahan

Prosedur dan metode pengolahan data yang dilakukan untuk mengolah data hasil survei ini, antara lain meliputi penyuntingan (*editing*), penyandian (*coding*), dan penyahihan (validasi). Lingkari kode 1 jika “Ya” dan kode 2 jika “Tidak”. Adapun yang dimaksud dengan

1. Penyuntingan adalah melakukan pengecekan terhadap kemungkinan kesalahan pengisian daftar pertanyaan dan ketidakserasian informasi (*inconsistency*)
2. Penyandian adalah kegiatan pemberian kode-kode tertentu untuk mempermudah pengolahan, terutama jika akan diolah dengan media komputer

3. Penyahihan adalah proses pemeriksaan terhadap data dan proses perbaikan data yang salah menjadi data yang benar dan valid. Tingkat validitas data sangat berpengaruh terhadap kualitas keluaran (*output*) yang dihasilkan. Proses penyahihan ada dua cara yakni penyahihan manual dan penyahihan komputer.

7.2. Tingkat estimasi yang diharapkan

Lingkari kode tingkat estimasi yang diharapkan, kode yang dilingkari bisa lebih dari satu.

7.3. Metode analisis hasil survei

Tuliskan secara ringkas metode analisis yang akan digunakan pada survei ini. Misal regresi, regresi logistik.

7.4. Produk data yang tersedia untuk umum

Sebutkan produk data dari survei ini yang didiseminasikan/ disebarluaskan kepada umum. Lingkari kode 1 jika “Ya” tersedia dan 2 jika “Tidak” tersedia.

Keterangan:

1. Publikasi dalam *hardcopy* adalah hasil survei yang dipublikasikan dalam bentuk buku.
2. Publikasi dalam *softcopy* adalah hasil survei yang dipublikasikan dalam media komputer (disket, *compact disc*, optical disk).
3. Macro data adalah hasil survei yang tersedia bagi umum dalam bentuk file-file *summary* (agregat).
4. Micro data/raw data adalah hasil survei yang tersedia bagi umum dalam bentuk *individual record*.

7.5. Waktu pelaksanaan survei (lampirkan)

Tuliskan tanggal, bulan dan tahun perencanaan, pelaksanaan lapangan, pengolahan, penyajian, dan analisis survei ini.

7.6. Waktu ketersediaan hasil survei untuk umum

Tuliskan tanggal, bulan dan tahun ketersediaan hasil survei ini untuk umum.

Pengertian “ketersediaan” disini adalah bahwa hasil survei ini menjadi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum (*publicly available*).

5. 2. Formulir FS2K

Blok I. Identifikasi Penyelenggara Survei

1.1 Penyelenggara

Tuliskan nama penyelenggara survei ini.

Penyelenggara adalah orang atau instansi yang menyelenggarakan survei statistik khusus. Statistik khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan untuk kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsure masyarakat lainnya. Contoh: Lembaga Penelitian SMERU

1.2 Alamat lengkap penyelenggara

Tuliskan dengan lengkap alamat penyelenggara (termasuk nomor telepon, faksimile, dan *e-mail*).

Contoh: Lembaga Penelitian SMERU

Jl. Cikini Raya No 10A, Telp: (021) 31936336

Fax: (021) 31930850

Kabupaten/Kota: Jakarta Pusat

Provinsi: DKI Jakarta

Blok II. Penanggung Jawab Survei (sebagai *Contact Person*)

2.1 Nama penanggung jawab (Penyelenggara Survei)

Tuliskan dengan lengkap nama, jabatan, nomor telepon, nomor fax, dan alamat *e-mail* penanggung jawab umum survei.

2.2 Nama manajer survei

Manajer survei adalah orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan survei, termasuk urusan administrasi, pelaksanaan teknis, dan pelaksanaan survei di lapangan. Tuliskan dengan lengkap nama, jabatan, nomor telepon, nomor fax, dan alamat *e-mail* manajer survei.

Blok III. Informasi Umum

3.1 Survei ini dilakukan

Lingkari kode 1 jika survei dilakukan hanya sekali dan lingkari kode 2 jika survei ini dilakukan berulang kali.

3.2 Jika 'Berulang', frekuensi penyelenggara

Lingkari kode yang sesuai dengan frekuensi dilakukannya survei ini.

3.3 Tipe pengumpulan data

Tipe pengumpulan data:

1. *Longitudinal*, yaitu data dikumpulkan pada waktu yang berbeda untuk melihat perubahan yang terjadi (biasanya ada analisis secara deskriptif). Variabel yang digunakan pada tipe pengumpulan data ini umumnya sedikit.
2. *Cross sectional*, yaitu data dikumpulkan pada saat tertentu dari sampel terpilih dan menggambarkan suatu parameter pada saat itu (suatu saat) juga digunakan untuk mengaitkan suatu peubah dengan peubah lainnya. Variabel yang digunakan pada tipe pengumpulan data ini umumnya banyak.
3. Gabungan *longitudinal* dan *cross sectional*.
Lingkari kode 1 jika tipe pengumpulan data pada survei ini *longitudinal*.
Kode 2 jika tipe pengumpulan data pada survei ini *cross sectional*. Kode 3 jika tipe pengumpulan data pada survei ini gabungan *longitudinal* dan *cross sectional*.

Blok IV. Tujuan Survei dan Peubah yang Dikumpulkan

4.1 Tujuan survei

Tuliskan tujuan diselenggarakannya survei ini secara ringkas dan jelas pada tempat yang telah disediakan.

Contoh:

1. Untuk mendapatkan data tentang penggunaan tenaga kerja, biaya produksi, *volume*, dan nilai produksi batu bata di Indonesia.
2. Untuk memperoleh data yang digunakan untuk memproduksi pertumbuhan ekonomi yang digambarkan PDB triwulanan.

4.2 Peubah (variabel) yang dikumpulkan pada survei ini dan periode enumerasi (referensi waktu)

Tuliskan peubah yang dikumpulkan dan periode enumerasi (referensi waktu) yang digunakan dalam survei ini.

Peubah adalah sesuatu yang dapat diukur dan memiliki nilai yang berubah-ubah (tidak konstan).

Periode enumerasi (*time reference*) adalah batasan waktu pada variabel yang ditanyakan dari waktu pelaksanaan survei.

Contoh:

Jumlah, kewarganegaraan, jenis kelamin, pendidikan, jenjang kedudukan, keahlian, dan umur tenaga kerja yang digunakan pada perusahaan batu bata, periode enumerasi adalah pada saat enumerasi.

Besarnya biaya untuk pekerja, pembelian bahan baku, bahan penolong, sewa tempat dan lain-lain untuk produksi batu bata, periode enumerasi setahun yang lalu.

Banyaknya produk utama dan produk sampingan yang dihasilkan perusahaan batu bata, periode enumerasi sebulan yang lalu.

Blok V. Rancangan Pengumpulan Data

5.1 Cara pengumpulan data

1. Sebagian populasi (sampel) : informasi diperoleh dari sebagian unit populasi dengan cara mengambil sampel kemudian dilakukan estimasi terhadap populasi, pengumpulan datanya disebut survei.
2. Seluruh populasi : informasi diperoleh dari seluruh unit populasi sehingga didapat nilai yang sebenarnya dari populasi tersebut (parameter), pengumpulan datanya disebut sensus.

Lingkari kode 1 jika pengumpulan data hanya pada sebagian populasi (sampel).
Lingkari kode 2 jika pengumpulan data pada seluruh unit populasi.

5.2 Survei dilakukan di

Tuliskan wilayah atau daerah di mana survei ini dilakukan. Lingkari kode 1 jika survei dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Lingkari kode 2 jika survei dilakukan di sebagian wilayah Indonesia.

Pengertian di seluruh wilayah Indonesia adalah bila survei tersebut dilakukan di semua provinsi dan mencakup semua kabupaten/kota yang ada di Indonesia, tetapi tidak harus mencakup seluruh kecamatan atau desa/kelurahan yang ada. Bila ada responden atau unit wilayah di satu kabupaten/kota yang terambil dalam suatu survei, maka kabupaten/kota tersebut sudah diartikan dalam survei yang dimaksud. Sehingga bila di semua kabupaten/kota ada sebagian wilayahnya yang terambil survei yang dilakukan, sudah diartikan mencakup seluruh wilayah Indonesia.

5.3 Bila di sebagian wilayah Indonesia, survei dilakukan di

Tuliskan nama provinsi dan nama kabupaten/kota yang dicakup bila survei dilakukan di sebagian wilayah Indonesia (tidak mencakup semua provinsi atau tidak mencakup semua kabupaten/kota yang ada di Indonesia). Bila dalam satu provinsi semua kabupaten/kota tercakup dalam survei yang dilakukan, tidak perlu ditulis nama-nama kabupaten/kota yang ada tetapi cukup ditulis "semua". Jika ruang yang tersedia tidak mencukupi, gunakan kertas tambahan.

5.4 Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data terdiri dari wawancara langsung dengan responden, wawancara melalui sarana komunikasi (telepon, surat, *e-mail*, dll), responden mengisi kuesioner sendiri (swacacah), pengamatan (observasi), dan lainnya.

Lingkari kode metode pengumpulan data yang digunakan pada survei ini (isian bisa lebih dari satu).

5.5 Metode penelitian

Metode penelitian:

1. Sampel probabilitas (*probability sampling*), yaitu metode penelitian dimana unit populasi memiliki peluang untuk terpilih sebagai sampel.
2. Sampel non-probabilitas (*non-probability sampling*), yaitu metode penelitian dimana unit populasi bisa tidak memiliki peluang untuk terpilih sebagai sampel. Metode non-probabilitas dilakukan jika tidak tersedia kerangka sampel, informasi dari populasi kurang tersedia, dan biaya penelitian terbatas.

Lingkari kode metode penelitian yang digunakan pada survei ini.

5.6 Metode untuk sampel non-probabilitas

Metode untuk sampel non-probabilitas antara lain *purposive sampling*, *quota*, dan *snow bowling*.

Jika pertanyaan 5.5 kode yang dilingkari adalah kode 2 (sampel non-probabilitas), jelaskan metode yang digunakan dan komposisi sampelnya.

Contoh:

Purposive sampling dengan komposisi 10 persen rumah tangga kelas atas, 20 persen kelas menengah, dan 70 persen kelas bawah. (Sampel dari metode *purposive sampling* diperoleh berdasarkan pengalaman peneliti)

Blok VI. Rancangan Sampel (Diisi Bila Pertanyaan 5.1 Berkode 1 dan Pertanyaan 5.5 Berkode 1)

6.1 Jenis rancangan sampel

Tuliskan secara ringkas jenis rancangan sampel yang digunakan pada survei ini. Lingkari kode 1 jika rancangan sampel adalah *single stage/phase*, yaitu rancangan sampel satu tahap. Kode 2 jika rancangan sampel adalah *multi stage/phase*, yaitu rancangan sampel lebih dari satu tahap dan jelaskan, misalnya *two stage/phase*, *three stage/phase*, dsb.

6.2 Kerangka sampel

Kerangka sampel memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tersedia sampai unit yang terkecil
2. *Up to date*
3. Tidak tumpang tindih

Tulis dan jelaskan kerangka sampel yang digunakan pada survei ini. Jika bertahap tuliskan kerangka sampel untuk setiap tahap.

Contoh:

Untuk satu tahap: Direktori Perusahaan Industri Besar dan Sedang,
Daftar Perusahaan Perdagangan.

Untuk dua tahap:

Tahap I, Daftar Blok Sensus di DKI Jakarta;

Tahap II Daftar Rumah Tangga pada tiap Blok Sensus di DKI Jakarta

6.3 Metode pemilihan sampel

Tuliskan secara ringkas metode pemilihan sampel yang digunakan pada survei ini. Misalnya *simple random sampling* yaitu metode pemilihan sampel dimana unit populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel dan umumnya unit populasinya homogen. Jika survei ini menggunakan rancangan sampling *multi stage/phase*, jelaskan pemilihan sample pada setiap *stage/phase*.

Contoh metode pemilihan sampel *multi stage/phase*:

Stage/phase I pemilihan sampel menggunakan *simple random sampling (SRS)*;

Stage/phase II pemilihan sample menggunakan *probability proportional to size (PPS)*.

6.4 Keseluruhan fraksi sampel (*overall sampling fraction*)

Fraksi sampel adalah perbandingan antara jumlah sampel dengan jumlah populasi.

Tuliskan fraksi sampel (n/N) secara keseluruhan jika rancangan sampel *multi stage/phase*, fraksi sampel yang ditulis adalah untuk seluruh tahap.

Contoh two stage:

<u>Stage</u>	<u>populasi</u>	<u>sampel</u>	<u>fraksi</u>
1. Blok sensus	N	n	n/N
2. Rumah tangga	M_i	m_i	m_i/M_i

6.5 Unit sampel

Tuliskan unit sampel terkecil dan tuliskan jumlah seluruh sampel survei ini.

Contoh:

1. Unit sampel adalah rumah tangga sebanyak 3.000 yang distratifikasikan menurut pendapatan.
2. Unit sampel adalah perusahaan sebanyak 2.500

6.6 Perkiraan *sampling error*

Sampling error adalah kesalahan yang terjadi dari segi teknis, misalnya kesalahan penggunaan metode pemilihan sampel.

Tuliskan perkiraan *sampling error* pada survei ini.

6.7 Responden

Tuliskan responden dan jumlah responden survei ini. Isian rincian ini bisa sama dengan rincian 6.5

Contoh: Responden survei adalah perorangan/individu pada rumahtangga terpilih sampel.

6.8 Tingkat estimasi yang diharapkan

Lingkari kode tingkat estimasi yang diharapkan, kode yang dilingkari bisa lebih dari satu.

Blok VII. Waktu Pelaksanaan Survei dan Abstraksi

7.1 Waktu pelaksanaan survei

Tuliskan tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan survei pada tempat yang tersedia.

7.2 Waktu ketersediaan hasil untuk umum

Tuliskan tanggal, bulan, dan tahun ketersediaan hasil survei ini untuk umum.

Pengertian “ketersediaan” di sini adalah bahwa hasil survei menjadi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum (*public available*).

7.3 Abstraksi

Abstraksi adalah ringkasan dari hasil survei yang telah dilakukan.

Tuliskan secara ringkas dari hasil survei yang telah dilakukan. Jika ruang yang tersedia tidak mencukupi, lampirkan abstraksi tersebut dengan menggunakan kertas terpisah.

5. 3. Q-Metadata

Blok I. Identifikasi Penyelenggara Kegiatan

Penyelenggara kegiatan statistik adalah instansi pemerintah, lembaga organisasi, perorangan dan unsur masyarakat lainnya.

1.1 Penyelenggara

Tuliskan instansi/institusi penyelenggara kegiatan setingkat dengan eselon II/direktur/biro/pusat atau universitas/perguruan tinggi atau akademi.

Misal: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan; Departemen Statistik Bank Indonesia; Divisi Bisnis Umum Bank Rakyat Indonesia; Lembaga Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

1.2 Alamat lengkap penyelenggara

Tuliskan dengan lengkap alamat instansi/institusi penyelenggara kegiatan statistik.

Contoh :

Menara Sjafrudin Prawiranegara Lt.14 Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350

Kabupaten/Kota: Jakarta Pusat

Provinsi: DKI Jakarta

Blok II. Penanggung Jawab Kegiatan (sebagai *Contact Person*)

2.1 Penanggung jawab kegiatan

Penanggung jawab kegiatan adalah pihak yang menjadi koordinator utama penyelenggaraan kegiatan statistik.

Tuliskan nama, jabatan, alamat, nomor telepon, nomor faximile, dan alamat email penanggung jawab kegiatan di instansi/institusi penyelenggara kegiatan statistik.

2.2 Penanggung jawab teknis kegiatan

Penanggung jawab teknis kegiatan adalah pihak yang menjadi koordinator teknis penyelenggaraan kegiatan. Penanggung jawab teknis kegiatan ini bisa pegawai atau pihak ketiga (konsultan).

Tuliskan nama, jabatan, alamat, nomor telepon, nomor faximile, dan alamat *e-mail* penanggung jawab teknis kegiatan.

Blok III. Informasi Umum Kegiatan

3.1 Tujuan dan manfaat kegiatan

Tuliskan tujuan dan manfaat penyelenggaraan kegiatan.

3.2 Kegiatan ini dilakukan

Lingkari kode 1 jika kegiatan dilakukan hanya sekali atau baru dilakukan.

Lingkari kode 2 jika kegiatan dilakukan berulang kali, kegiatan rutin, atau sudah beberapa kali dilakukan.

3.3 Jika “Berulang” frekuensi penyelenggaraan

Frekuensi penyelenggaraan merupakan periode waktu penyelenggaraan kegiatan statistik.

Contoh: Kegiatan Survei Penjualan Eceran, frekuensi penyelenggaraan kegiatannya adalah bulanan.

Lingkari kode yang sesuai dengan frekuensi penyelenggaraan kegiatan statistik.

3.4 Frekuensi pengumpulan data

Frekuensi pengumpulan data merupakan periode waktu pengumpulan data.

Contoh: Survei Penjualan Eceran, pengumpulan data dilakukan dengan dua periode waktu yaitu:

1. Mingguan untuk kategori makanan, minuman, dan tembakau
2. Bulanan untuk kategori suku cadang dan aksesoris; bahan bakar kendaraan; peralatan informasi dan komunikasi; perlengkapan rumah tangga lainnya; barang budaya dan rekreasi; dan barang lainnya.

Lingkari kode yang sesuai, pemilihan kode bisa lebih dari satu. Jika kode yang dipilih lebih dari satu, maka jumlahkan kode yang terpilih lalu pindahkan ke kotak yang tersedia.

3.5 Tipe pengumpulan data

Tipe pengumpulan data mencakup cara pengumpulan dan analisis data yang akan dilakukan, apakah dalam satu waktu atau lebih dari satu waktu. Penentuan pilihan dimensi waktu sangat tergantung tujuan penelitian yang ingin dicapai. Tipe pengumpulan data terdiri dari:

1. *Longitudinal* adalah pengumpulan data beberapa variabel pada periode waktu tertentu untuk mengetahui perubahan kondisi atau hubungan dari populasi yang diamatinya dalam periode waktu yang berbeda. Pengumpulan data longitudinal meliputi:
 - a. *Panel Studies*: pengumpulan data sejumlah individu yang sama pada interval waktu yang tetap.
 - b. *Cohort Studies*: pengumpulan data sejumlah individu untuk kategori yang sama pada interval waktu yang tetap.

Contoh: orang yang lahir pada tahun yang sama (*birth cohort*), orang yang lulus pada tahun yang sama.

2. *Cross Sectional* adalah pengumpulan data beberapa variabel pada satu waktu untuk mengetahui hubungan satu variabel dengan variabel lain pada satu waktu tersebut.
3. *Cross Sectional* dan *Longitudinal* adalah pengumpulan data beberapa variabel pada periode waktu tertentu untuk mengetahui hubungan satu variabel dengan variabel lain dan perubahan variabel tersebut dari populasi yang diamatinya dalam periode waktu yang berbeda. Contoh: *time series studies*.

Lingkari kode yang sesuai dengan tipe pengumpulan data.

Blok IV. Variabel yang Dikumpulkan

Variabel utama yang dikumpulkan dan referensi waktu pengumpulan data masing-masing variabel

Tuliskan variabel utama yang dikumpulkan dan referensi waktu pengumpulan data masing-masing variabel.

Contoh:

No.	Nama Variabel	Referensi Waktu
1	Besarnya biaya untuk pekerja	Sebulan yang lalu
2	Besarnya pembelian bahan baku, bahan penolong, sewa tempat, dan lain-lain	Setahun yang lalu

Blok V. Metodologi

5.1 Cara pengumpulan data

1. Sensus adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan semua unit populasi untuk memperoleh karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
2. Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
3. Kompilasi produk administrasi adalah cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah, swasta, dan atau masyarakat.

Lingkari kode yang sesuai dengan cara pengumpulan data.

5.2 Cakupan wilayah survei

Cakupan wilayah survei di seluruh kabupaten/kota adalah survei dilakukan di semua kabupaten/kota yang ada di Indonesia.

Jika terpilih satu unit sampel saja pada kabupaten/kota, maka sudah diartikan bahwa cakupan wilayah survei adalah seluruh kabupaten/kota.

Lingkari kode yang sesuai dengan cakupan wilayah survei.

5.3 Bila di sebagian wilayah kabupaten/kota, survei dilakukan di

Tuliskan nama provinsi dan nama kabupaten/kota yang dicakup pada survei, sesuai dengan kode yang terisi pada rincian 5.2.

Jika ruang yang tersedia tidak mencukupi gunakan kertas tambahan.

5.4 Jenis rancangan sampel

1. *Single Stage/Phase* adalah pengambilan sampel hanya satu tahap yang dilakukan langsung pada unit populasi.

Contoh:

- a. Direktori Perusahaan Industri Besar dan Sedang, dipilih beberapa perusahaan industri besar dan sedang. Perusahaan industri besar dan sedang yang terpilih merupakan unit sampel yang akan disurvei.
- b. Pengambilan sampel pada populasi ibu yang melahirkan di Rumah Sakit, dilakukan dengan memilih ibu yang melahirkan pada periode waktu tertentu.

2. *Multi Stage/Phase* adalah pengambilan sampel melalui dua tahap atau lebih dimana metode tiap tahapnya bisa berbeda.

Contoh:

Tahap I: Pemilihan kelurahan/desa menggunakan metode *probability proportional to size* (pps) dengan size jumlah rumah tangga di setiap kelurahan/desa.

Tahap II: Setiap kelurahan/desa yang terpilih pada tahap I kemudian dilakukan pendataan/listing secara lengkap selanjutnya diambil beberapa rumah tangga dengan menggunakan metode *systematic sampling*. Rumah tangga yang terpilih merupakan unit sampel yang akan disurvei.

Lingkari kode yang sesuai dengan jenis rancangan sampel.

5.5 Metode pemilihan sampel stage terakhir

1. Sampel probabilitas adalah metode pemilihan sampel dengan peluang yang sama bagi setiap unit populasi untuk dipilih sebagai sampel.

Contoh: *Simple random sampling, Stratified sampling, dan Systematic sampling.*

2. Sampel non probabilitas adalah teknik yang tidak memberi peluang sama bagi setiap unit populasi untuk dipilih sebagai sampel.

Contoh: *Purposive Sampling, Snowball sampling, Quota sampling, dan Accidental sampling.*

Lingkari kode yang sesuai dengan metode pemilihan sampel.

5.6 Kerangka sampel

Kerangka sampel adalah daftar semua unit dalam populasi yang akan dijadikan sampel untuk disurvei. Kerangka sampel ini menjadi dasar penarikan sampel.

Contoh: Daftar penduduk, daftar bangunan, dan daftar rumah tangga.

Tulis dan jelaskan secara rinci kerangka sampel yang digunakan. Jika jenis rancangan sampelnya *Multi Stage/Phase*, jelaskan kerangka sampel untuk setiap tahapan.

Contoh:

Kerangka sampel satu tahap: Direktori Perusahaan Industri Besar dan Sedang.

Kerangka sampel dua tahap:

Tahap I : Daftar kelurahan/desa di seluruh kabupaten/kota;

Tahap II: Daftar rumah tangga di setiap kelurahan/desa.

5.7 Keseluruhan fraksi sampel (*overall sampling fraction*)

Tuliskan fraksi sampel (n/N) secara keseluruhan. Jika rancangan sampel *multi stage/phase*, jelaskan fraksi sampel pada setiap tahapannya.

5.8 Perkiraan *sampling error*

Sampling error adalah penyimpangan yang terjadi karena adanya kesalahan dalam pemakaian sampel. Semakin besar sampel yang diambil maka semakin kecil terjadinya *sampling error*.

Tuliskan perkiraan *sampling error* pada survei ini.

5.9 Unit sampel

Unit sampel adalah unit terkecil dari populasi yang akan diambil sebagai sampel.

Contoh: Kelurahan/desa, rumah tangga, dan pedagang.

Tuliskan unit sampel dan jumlah seluruh sampel survei ini.

5.10 Unit observasi

Unit observasi adalah unit pengamatan yang digunakan pada pengumpulan data. Unit sampel dan unit observasi bisa sama dan bisa berbeda.

Contoh:

Unit Sampel	Unit Observasi
Kelurahan/desa	Lurah/kepala desa
Rumah tangga	Kepala/anggota rumah tangga
Pedagang	Pedagang

Tuliskan unit observasi dan jumlah seluruh unit observasi pada pengumpulan data ini

5.11 Metode pengumpulan data

Lingkari kode yang sesuai, pemilihan kode bisa lebih dari satu. Jika kode yang dipilih lebih dari satu, maka jumlahkan kode yang terpilih lalu pindahkan ke kotak yang tersedia.

5.12 Apakah melakukan uji coba (*pilot study*)

Lingkari kode 1 jika dilakukan *pilot study* atau lingkari kode 2 jika tidak. Jika kode 1 yang dipilih, jelaskan secara singkat pelaksanaan *pilot study* tersebut. Penjelasan pelaksanaan *pilot study* mencakup lokasi pelaksanaan *pilot study*, jumlah unit observasi, waktu pelaksanaan *pilot study*, berapa kali *pilot study* dilakukan.

5.13 Petugas pengumpulan data

Lingkari kode yang sesuai, pemilihan kode bisa lebih dari satu. Jika kode yang dipilih lebih dari satu, maka jumlahkan kode yang terpilih lalu pindahkan ke kotak yang tersedia.

5.14 Persyaratan pendidikan terendah petugas pengumpulan data

Lingkari kode pendidikan terendah dari seluruh petugas pengumpulan data, sesuaikan dengan isian pada rincian 5.13.

5.15 Apakah melakukan pelatihan petugas

Lingkari kode 1 jika dilakukan pelatihan petugas atau lingkari kode 2 jika tidak. Jika kode 1 yang dipilih, jelaskan secara singkat pelaksanaan pelatihan petugas tersebut. Penjelasan pelatihan petugas mencakup waktu pelaksanaan pelatihan dan materi pokok pelatihan.

5.16 Jumlah petugas

Isikan jumlah petugas berdasarkan tugasnya, yaitu supervisor/penyelia/pengawas dan enumerator/pencacah/pengumpul data.

Blok VI. Pengolahan Data, Penyajian, dan Analisis

6.1 Metode pengolahan

Metode pengolahan data yang dicakup meliputi:

1. Penyuntingan (*editing*), yaitu kegiatan pemeriksaan hasil pengumpulan data. *Editing* dilakukan pada kesalahan dan ketidakkonsistenan pengisian rincian pertanyaan.
2. Penyandian (*coding*), yaitu kegiatan pemberian kode-kode pada rincian pertanyaan. *Coding* ini dilakukan untuk memudahkan entry data.
3. Input data (*Data entry*), yaitu kegiatan memasukkan data ke dalam “*form data entry*”. *Data entry* bisa dilakukan dengan aplikasi excel atau aplikasi yang dibuat tersendiri.
4. Pemindaian (*Scan*), yaitu kegiatan memasukkan data dengan cara memindai dokumen *hardcopy* menjadi *softcopy*.
5. Penyahihan (*validasi*), yaitu kegiatan pemeriksaan dan perbaikan data hasil entri data.

Lingkari kode 1 jika “Ya” dan kode 2 jika “Tidak”, pada setiap metode pengolahan data.

6.2 Tingkat penyajian yang diharapkan

Tingkat penyajian adalah kemampuan data hasil kegiatan statistik untuk menyajikan data/informasi karakteristik unit sampel/observasi.

Contoh:

1. Survei nasional menghasilkan data mikro individu dengan level estimasi kabupaten/kota maka tingkat penyajian yang dilingkari adalah kode 1, 2, dan 4.
2. Kompilasi produk administrasi yang dilakukan di provinsi menggunakan data bersumber dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Provinsi, maka tingkat penyajian yang dilingkari bisa kode 2 saja atau kode 2 dan 4.

Lingkari kode yang sesuai, pemilihan kode bisa lebih dari satu. Jika kode yang dipilih lebih dari satu, maka jumlahkan kode yang terpilih lalu pindahkan ke kotak yang tersedia.

6.3 Metode analisis

Analisis adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Metode analisis terdiri dari:

1. Analisis deskriptif adalah analisis yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik data menggunakan metode statistik sederhana, seperti *mean*, median, modus, *range*, *variance*, standar deviasi, tabel kontingensi, dan analisis kuadran.
2. Analisis inferensia adalah analisis yang bertujuan untuk menarik kesimpulan pada sampel, yang digunakan untuk digeneralisir ke populasi.

Analisis yang bertujuan untuk menarik kesimpulan berdasarkan data hasil pengolahan menggunakan metode statistik yang lebih mendalam, seperti anova, korelasi, regresi, *chi-square*, faktor, *cluster*, dan diskriminan.

Tuliskan metode analisis dan metode statistik yang digunakan.

6.4 Unit analisis

Unit analisis adalah unit data yang akan dianalisis. Unit analisis bisa sama dan bisa berbeda dengan unit sampel, unit observasi, dan tingkat penyajian.

Contoh:

1. Kegiatan Survei Rumah Tangga Pengguna HP

Unit Sampel	Unit Observasi	Tingkat Penyajian	Unit Analisis
Rumah tangga	Kepala/anggota rumah tangga	Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional	Rumah tangga dan Kabupaten/ kota

2. Kegiatan Survei komoditas 10 bahan pokok

Unit Sampel	Unit Observasi	Tingkat Estimasi	Unit Analisis
Pedagang Besar	Pedagang Besar	Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota

6.5 Produk data yang tersedia untuk umum

Produk data yang tersedia untuk masyarakat umum merupakan produk data kegiatan statistik yang didiseminasikan/disebarluaskan kepada masyarakat umum. Bentuk produk data tersebut antara lain:

1. Media Cetak, yaitu produk data yang dipublikasikan dalam bentuk buku/publikasi tercetak.
2. Media Elektronik, yaitu produk data yang dipublikasikan dalam bentuk file elektronik/ *softcopy* publikasi.
3. Data Mikro, yaitu produk data dalam bentuk *individual record*.

Lingkari kode 1 jika “Ya” dan 2 jika “Tidak” pada setiap produk data yang tersedia untuk masyarakat umum.

6.6 Judul publikasi

Tuliskan judul publikasi yang tersedia untuk masyarakat umum.

Contoh: Laporan Perekonomian Indonesia

6.7 Waktu pelaksanaan kegiatan

Tuliskan tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan kegiatan. Waktu pelaksanaan tersebut mencakup 5 (lima) tahapan kegiatan, yaitu:

1. Perencanaan/Persiapan
2. Pengumpulan data
3. Pengolahan
4. Penyajian
5. Analisis

6.8. Rencana penerbitan publikasi untuk umum:

Tuliskan rencana penerbitan publikasi dari hasil kegiatan statistik yang dilakukan

Blok VII. Abstraksi

Abstraksi merupakan ringkasan isi dari penyelenggaraan kegiatan statistik. Abstraksi ditujukan sebagai informasi awal sehingga memudahkan masyarakat umum untuk mengetahui tujuan penyelenggaraan kegiatan statistik. Abstraksi mencakup 4 (empat) bagian empiris yaitu:

1. Penjelasan ringkas mengenai tujuan penyelenggaraan kegiatan statistik agar masyarakat umum memahami apa yang diamati oleh kegiatan statistik tersebut.
2. Gambaran ringkas desain/metode penelitian yang digunakan.
3. Penjelasan ringkas mengenai hasil temuannya.
4. Kesimpulan sebagai bagian akhir dari abstraksi. Pada bagian ini kadangkala disisipkan rekomendasi untuk penyelenggaraan kegiatan statistik yang serupa.

Tuliskan secara ringkas abstraksi hasil kegiatan statistik yang telah dilakukan.

Jika ruang yang tersedia tidak mencukupi, lampirkan abstraksi tersebut dengan menggunakan kertas terpisah.

6. 1. Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa)

Tuntutan transparansi dan keterbukaan lembaga publik tampaknya terus berlanjut dalam era reformasi ini. Kegiatan statistik yang dibiayai oleh dana masyarakat semakin dirasa perlu untuk disebarluaskan kepada masyarakat. Dengan didukung perkembangan teknologi informasi, BPS membangun sebuah sistem informasi yang disebut dengan Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa). Sistem tersebut diharapkan dapat menjembatani antara penyelenggara kegiatan statistik dengan pengguna data statistik.

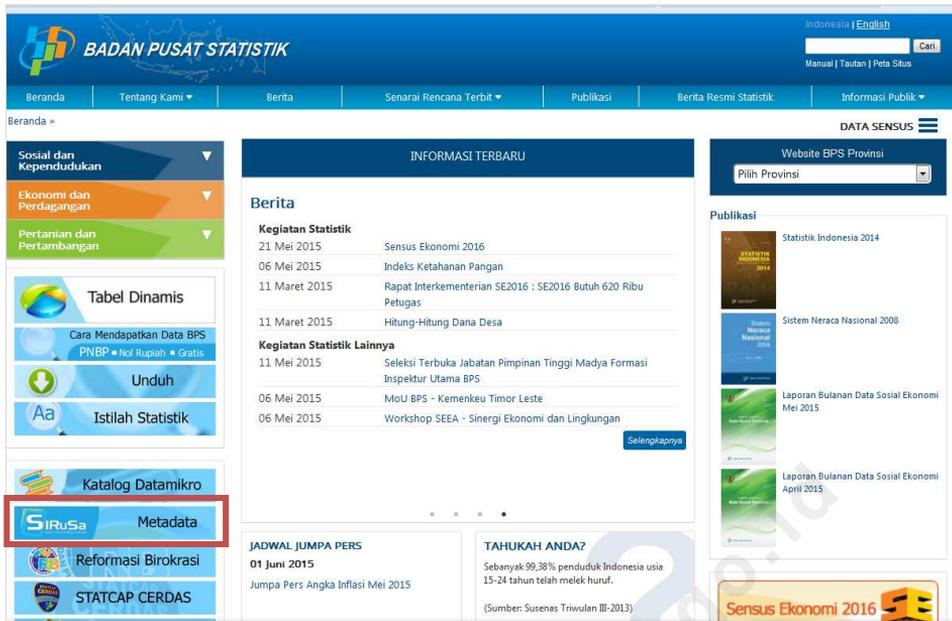
SIRuSa berisi metadata kegiatan statistik. Berdasarkan metadata yang ada, diharapkan pengguna akan semakin mudah melakukan penelusuran informasi kegiatan statistik yang ada di berbagai lembaga, baik pemerintah maupun nonpemerintah.

6. 2. Panduan Penggunaan SIRuSa

SIRuSa dapat diakses dengan pertama kali menjalankan *web browser* terlebih dahulu. Sebagai contoh, dalam panduan penggunaan ini, *web browser* yang digunakan adalah Mozilla Firefox, sedangkan *default browser* pada komputer yang menggunakan sistem operasi Windows, biasanya Internet Explorer (IE).

Setelah *web browser* dijalankan, langkah berikutnya adalah melakukan akses ke *homepage* BPS dengan mengetikkan alamat URL <http://www.bps.go.id> pada *address* di *web browser*.

Untuk mengakses *website* SIRuSa, klik menu Metadata yang berada pada menu bar sebelah kiri seperti yang terlihat pada gambar 4. Selain mengakses melalui portal web BPS, SIRuSa dapat diakses melalui alamat subdomain yaitu <http://sirusa.bps.go.id>.



Gambar 4. Homepage BPS

1. Beranda

a. Beranda bagian atas

Pada beranda bagian atas terdapat menu utama untuk mengakses isi *website* SIRuSa. Selain melalui menu utama, pengguna juga dapat mengakses isi *website* SIRuSa melalui fitur pencarian yang berada di *header* sebelah kanan. Hasil pencarian akan menampilkan metadata kegiatan statistik, indikator, variabel, kuesioner, pedoman, dsb. Di bawah *header* (menu utama), terdapat *slider* bergerak yang menampilkan penjelasan statistik dasar, sektoral, dan khusus. Fitur lainnya adalah metadata terbaru yang menampilkan empat metadata terbaru di SIRuSa. Adapun tampilan beranda bagian atas dapat dilihat pada gambar 5.



Gambar 5. Tampilan Beranda Bagian Atas

b. Beranda bagian tengah

Beranda bagian tengah menampilkan informasi mengenai penjelasan SIRuSa dan tiga jenis kegiatan statistik. Adapun tampilan beranda bagian tengah dapat dilihat pada gambar 6.

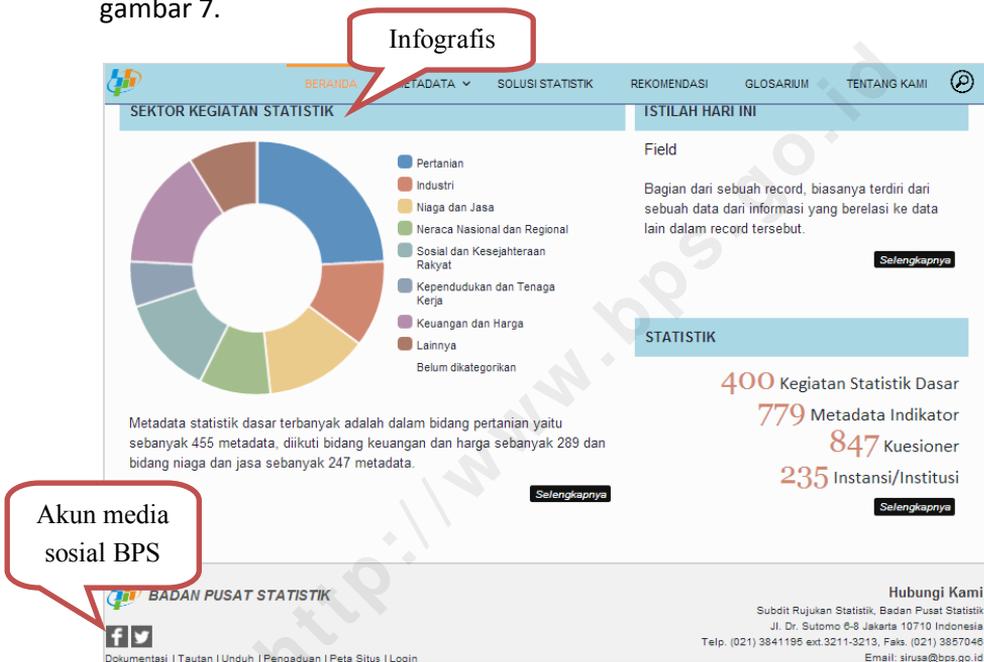


Gambar 6. Tampilan Beranda Bagian Tengah

c. Beranda bagian bawah

Beranda bagian bawah terdapat infografis yang menampilkan banyaknya metadata statistik dasar menurut sektornya. Terdapat juga istilah beserta definisinya yang berganti setiap harinya. Selain itu, terdapat statistik jumlah kegiatan statistik dasar, metadata indikator, kuesioner, dan instansi.

Pada bagian *footer*, terdapat *icon* media sosial untuk mengakses akun resmi media sosial BPS. Di sebelah kanan *footer*, terdapat alamat Subdit Rujukan Statistik, BPS, beserta nomor telepon dan *e-mail* yang dapat dihubungi oleh pengguna. Adapun tampilan beranda bagian bawah dapat dilihat pada gambar 7.



Gambar 7. Tampilan Beranda Bagian Bawah

2. Metadata

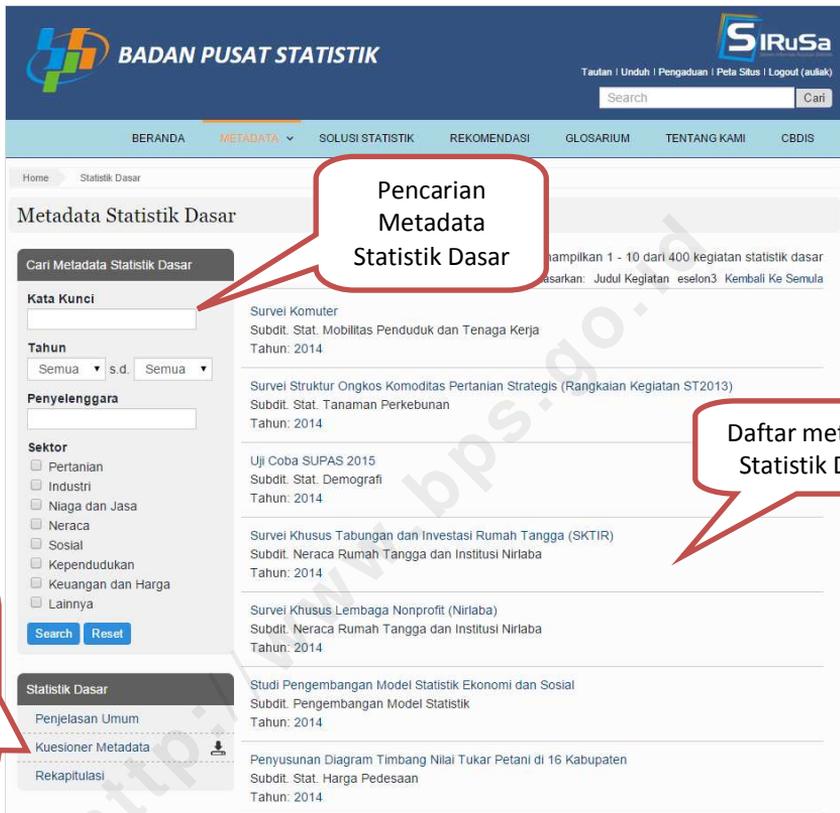
a. Metadata Statistik Dasar

1) Metadata Kegiatan

a) Daftar Metadata Statistik Dasar

Halaman SIRuSa yang menampilkan daftar metadata statistik dasar dapat diakses melalui menu utama, yaitu menu metadata, submenu statistik dasar untuk metadata kegiatan. Pada halaman ini, terdapat *form* untuk melakukan pencarian statistik dasar berdasarkan kata kunci, tahun kegiatan, penyelenggara, dan sektor. Di bagian bawah

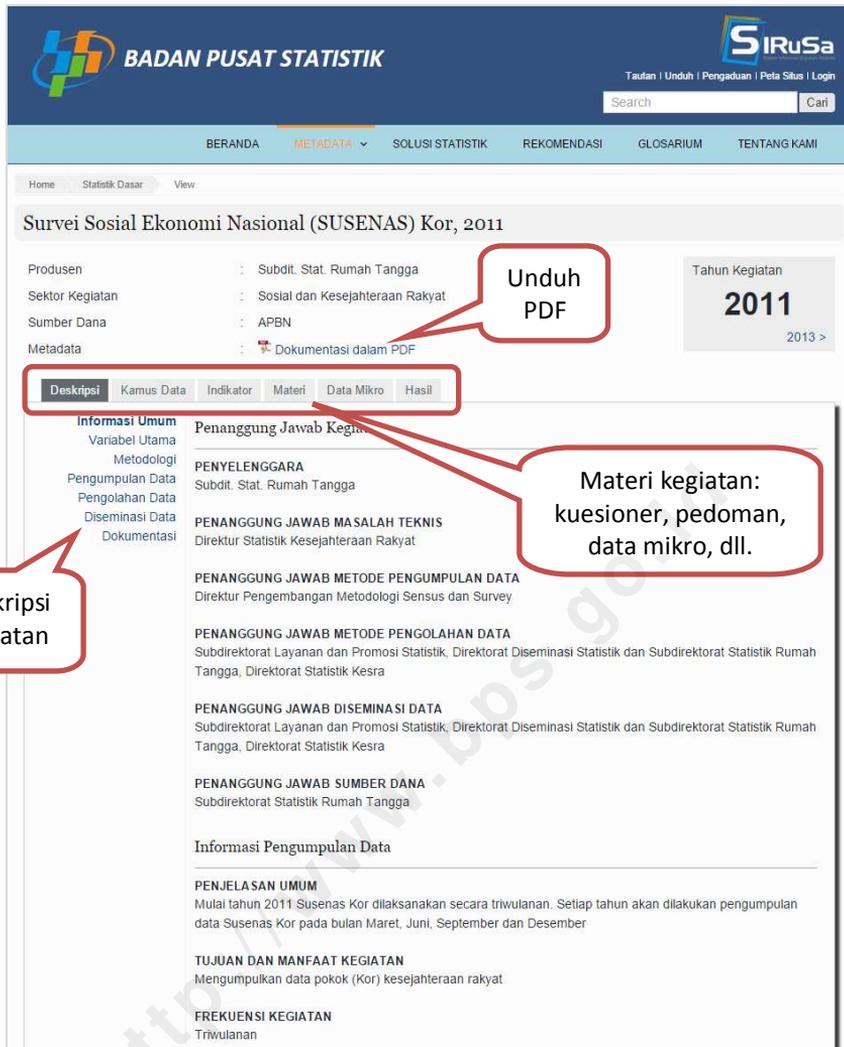
form pencarian, terdapat menu statistik dasar. Melalui menu ini, pengguna dapat menampilkan halaman penjelasan umum statistik dasar, mengunduh kuesioner metadata statistik dasar, dan menampilkan halaman rekapitulasi statistik dasar. Adapun tampilan daftar metadata statistik dasar dapat dilihat pada gambar 8.



Gambar 8. Tampilan Daftar Metadata Statistik Dasar

b) Tampilan Metadata Statistik Dasar

Dengan mengklik salah satu kegiatan di halaman daftar metadata statistik dasar, pengguna dapat melihat secara rinci deskripsi metadata untuk kegiatan tersebut. Di halaman ini terdapat rincian metadata kegiatan yaitu, deskripsi, kamus data, indikator, materi (kuesioner dan pedoman), data mikro, dan hasil dari kegiatan tersebut. Pengguna juga dapat mengunduh metadata dalam bentuk PDF dengan mengklik *link* "Dokumentasi dalam PDF". Adapun tampilan metadata statistik dasar dapat dilihat pada gambar 9.

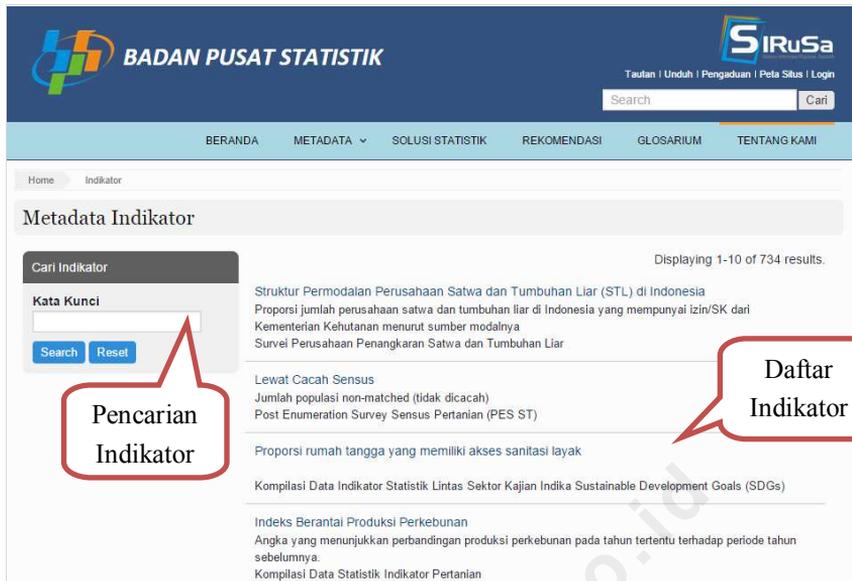


Gambar 9. Tampilan Metadata Statistik Dasar

2) Metadata Indikator

a) Daftar Indikator

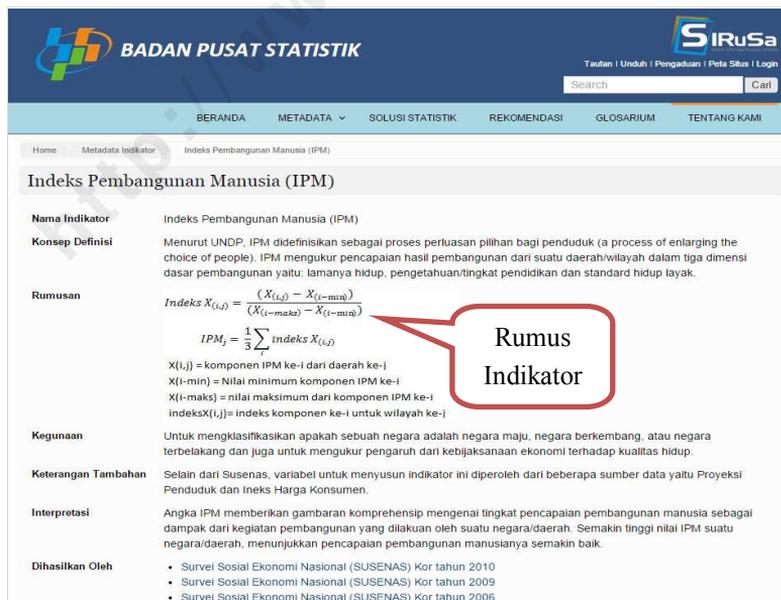
Pada halaman ini, pengguna dapat melihat daftar metadata indikator yang ada di SIRuSa. Pengguna dapat mencari indikator di fitur pencarian indikator berdasarkan kata kunci. Untuk menampilkan metadata indikator secara rinci, pengguna dapat mengklik judul indikator tersebut. Adapun tampilan daftar indikator dapat dilihat pada gambar 10.



Gambar 10. Tampilan Daftar Indikator

b) Tampilan Indikator

Halaman ini menampilkan metadana indikator secara rinci, yaitu nama indikator, konsep definisi, rumusan, kegunaan, dsb. Adapun tampilan indikator dapat dilihat pada gambar 11.



Gambar 11. Tampilan Indikator

3) Metadata Variabel

a) Daftar Variabel

Pengguna dapat melihat daftar metadata variabel di halaman ini. Fitur pencarian di sebelah kiri memungkinkan pengguna mencari metadata variabel yang diinginkan. Apabila judul variabel diklik, maka akan membuka halaman metadata variabel secara rinci untuk variabel tersebut. Adapun tampilan daftar variabel dapat dilihat pada gambar 12.



Gambar 12. Tampilan Daftar Variabel

b) Tampilan Metadata Variabel

Halaman ini menampilkan metadata variabel secara rinci pada kegiatan tertentu. Klik *link* "pilih kegiatan lainnya" untuk melihat rincian variabel yang sama di kegiatan lainnya. Adapun tampilan metadata variabel dapat dilihat pada gambar 13.

BADAN PUSAT STATISTIK SIRuSa

Tautan | Unduh | Pengaduan | Peta Situs | Login

BERANDA METADATA SOLUSI STATISTIK REKOMENDASI GLOSARIUM TENTANG KAMI

Home Metadata Variabel Pendidikan tertinggi yang ditamatkan

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan

Konsep Definisi Variabel

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi sesuai tingkatan sekolah dengan mendapatkan tanda tamat sekolah (ijazah).

Detail Variabel

Berikut ini merupakan detail dari variabel *Pendidikan tertinggi yang ditamatkan* pada kegiatan **Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), 2010** [pilih kegiatan lainnya]

Nama Variabel	Pendidikan tertinggi yang ditamatkan
Kode Variabel	B5AP1A
Kegiatan	Survei Angkatan Kerja Nasional
Kuesioner	SURVEI ANGKATAN KERJA NASIONAL 2010 - KETERANGAN RUMAH TANGGA [AGUSTUS 2010] (SAK10-AK)
Domain Value	<p>Kode 1: Tidak/Belum Pernah Bersekolah Tidak/belum pernah sekolah adalah status dari mereka yang sama sekali belum pernah sekolah, termasuk mereka yang telah tamat atau belum tamat Taman Kanak- Kanak dan tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar.</p> <p>Kode 10: D4/S1 Tamat Program Diploma IV/S1 adalah kategori bagi mereka yang tamat program pendidikan Diploma IV dan Sarjana pada suatu Universitas/Institut/Sekolah Tinggi, sedangkan Program Akta IV sejajar dengan jenjang Diploma IV</p> <p>Kode 11: S2/S3 Tamat Program S2/S3 adalah kategori bagi mereka yang tamat program pendidikan Pasca Sarjana dan Doktor atau Spesialisasi I dan II pada suatu Universitas atau Perguruan tinggi</p> <p>Kode 3: SD/Ibtidaiyah/Paket A Tamat Sekolah Dasar (SD)/Ibtidaiyah adalah kategori bagi mereka yang tamat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atau sekolah yang setara misalnya: Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar, Sekolah Dasar Kecil, Sekolah Dasar Pamong, Paket A dan memperoleh ijazah persamaan SD, SD Proyek Perintis Sekolah Pembangunan dan SD Indonesia (di Luar Negeri)</p> <p>Kode 4: SMP/Tsanawiyah/Paket B Tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Tsanawiyah adalah kategori bagi mereka yang tamat Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah atau sekolah yang setara misalnya: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, MULO, HBS 3 tahun, Sekolah Luar Biasa Lanjutan Tingkat Pertama, SLTP Proyek Perintis Sekolah Pembangunan, SLTP Indonesia (di Luar Negeri) dan SLTP Olahraga</p>

Klik untuk melihat metadata variabel di kegiatan lain

Gambar 13. Tampilan Metadata Variabel

4) Kuesioner

a) Daftar Kuesioner

Pada halaman ini, pengguna dapat melihat daftar kuesioner kegiatan statistik dasar. Pengguna juga dapat melakukan pencarian kuesioner pada *form* pencarian. Dengan mengklik judul kuesioner pengguna, akan menuju halaman tampilan kuesioner. Adapun tampilan daftar kuesioner dapat dilihat pada gambar 14.

Gambar 14. Tampilan Daftar Kuesioner

b) Tampilan Kuesioner

Di halaman tampilan kuesioner, pengguna dapat melihat rincian kuesioner dan fisik kuesioner. Selain itu pengguna juga dapat mengunduh kuesioner dalam format pdf. Adapun tampilan kuesioner dapat dilihat pada gambar 15.

BADAN PUSAT STATISTIK **SIRuSa**
Tautan | Unduh | Pengaduan | Peta Situs | Login
Search Cari

BERANDA METADATA SOLUSI STATISTIK REKOMENDASI GLOSARIUM TENTANG KAMI

Home Kuesioner PENDATAAN POTENSI DESA/KELURAHAN 2011 - DESA

PENDATAAN POTENSI DESA/KELURAHAN 2011 - DESA

Judul Kuesioner: PENDATAAN POTENSI DESA/KELURAHAN 2011 - DESA
Kegiatan Statistik: Pendataan Potensi Desa (Podes), 2011
Tahun: 2011
Unduh:

Unduh Kuesioner

Tampilan Kuesioner

**REPUBLIC INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK
PENDATAAN POTENSI DESA/KELURAHAN 2011**

Rahasia

I. PENGENALAN TEMPAT

NO	RINCIAN	NAMA	Kode (Podes 2008)	Kode (SP 2010)	Kode (Sat Pencacahan)
101	Provinsi		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
102	Kabupaten/Kota (*)		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
103	Kecamatan		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
104	Desa/Kelurahan (*)		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
105	Status Daerah	Perkotaan - 1	<input type="checkbox"/>	Perdesaan - 2	<input type="checkbox"/>
106	Alamat lengkap kantor kepala desa (kurah)				

II. KETERANGAN PETUGAS

NO	RINCIAN	PENCACAH	NO	RINCIAN	PENGAWAS/PEMERIKSA
201	Nama Pencacah		205	Nama Pengawas/ Pemeriksa	
202	NIP	<input type="text"/>	206	NIP	<input type="text"/>
203	Tanda Tangan Pencacah		207	Kunjungan	I II III
204	Kunjungan	I II III		Tanggal Pengawasan	
	Tanggal			Tanggal Pemeriksaan	
	Narasumber Utama (NU)				
	Jabatan				

Gambar 15. Tampilan Kuesioner

b. Metadata Statistik Sektoral

1) Daftar Metadata Statistik Sektoral

Halaman ini menampilkan daftar metadata statistik sektoral. Pengguna dapat melakukan pencarian metadata statistik sektoral di *form* pencarian dengan memasukkan kata kunci, tahun kegiatan, provinsi, instansi penyelenggara, atau sektor. Di halaman ini juga terdapat menu statistik sektoral yang berisi penjelasan umum, formulir FS3, kuesioner metadata sektoral, dan rekapitulasi. Adapun tampilan daftar metadata statistik sektoral dapat dilihat pada gambar 16.

Pencarian Metadatabase of Sectoral Statistics

Daftar Metadatabase of Sectoral Statistics

Menu Questionnaire of Sectoral Metadatabase

Gambar 16. Tampilan Daftar Metadatabase Statistik Sektoral

2) Tampilan Metadatabase Statistik Sektoral

Apabila salah satu judul kegiatan di halaman daftar metadatabase statistik sektoral diklik, maka akan membuka halaman tampilan metadatabase statistik sektoral untuk kegiatan tersebut. Pada halaman ini, terdapat deskripsi lengkap metadatabase statistik sektoral yaitu informasi umum, variabel utama, metodologi, pengumpulan data, dan pengolahan data. Pengguna juga dapat mengunduh dokumentasi metadatabase sektoral dalam format PDF dengan mengklik tautan dokumentasi dalam PDF. Adapun tampilan metadatabase statistik sektoral dapat dilihat pada gambar 17.

BADAN PUSAT STATISTIK SIRuSa

Tautan | Unduh | Pengaduan | Peta Situs | Login

BERANDA METADATA SOLUSI STATISTIK REKOMENDASI GLOSARIUM TENTANG KAMI

Home Statistik Sektoral View

Survei Kesejahteraan Petani, 2011

Tahun Kegiatan : 2011
 Produsen : Pusdatin (Kementerian Pertanian)
 Sektor Kegiatan : Pertanian
 Metadata : Dokumentasi dalam PDF

Unduh PDF Metadata Statistik Sektoral

Deskripsi Metadata Statistik Sektoral

Informasi Umum
 Variabel Utama
 Metodologi
 Pengumpulan Data
 Pengolahan Data

Identifikasi Penyelenggara Kegiatan

PENYELENGGARA
 Pusdatin (Kementerian Pertanian)

ALAMAT LENGKAP PENYELENGGARA
 Jl. Harsono RM no. 3 Gedung D Lt. 4
 Kabupaten/Kota: KODYA JAKARTA SELATAN
 Provinsi: DKI JAKARTA

Penanggung Jawab Kegiatan (Contact Person)

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

Nama	: ir. Dewa N Cakrabawa, MM
Jabatan	: Kabid data Non Komoditas
Alamat	: Jl. harsono RM No 3 Gd. D Lt. IV Kementan
Telepon	: 7805305
Fax	: 7805305
Email	: cakra@pertanian.go.id

PENANGGUNG JAWAB TEKNIS KEGIATAN

Nama	: Ir. Sabarella, M.Si
Jabatan	: Kasub Data sosek pertanian
Alamat	: Jl. Harsono RM no 3 Gd. D Lt. IV Ragunan
Telepon	: 7805305
Fax	: 7805305
Email	: sabarella@pertanian.go.id

Gambar 17. Tampilan Metadata Statistik Sektoral

c. Metadata Statistik Khusus

1) Daftar Metadata Statistik Khusus

Menu metadata statistik khusus menampilkan daftar metadata statistik khusus yang ada di SIRuSa. Pada halaman ini, pengguna dapat melakukan pencarian metadata statistik khusus berdasarkan kata kunci, tahun kegiatan, provinsi, penyelenggara, dan sektor. Selain itu, pengguna juga dapat melihat penjelasan umum statistik khusus, mengunduh formulir FS2K, mengunduh kuesioner metadata, dan membuka halaman rekapitulasi statistik khusus. Adapun tampilan daftar metadata statistik khusus dapat dilihat pada gambar 18.

The screenshot shows the BPS website interface. At the top, there is a navigation bar with 'BERANDA', 'METADATA', 'SOLUSI STATISTIK', 'REKOMENDASI', 'GLOSARIUM', and 'TENTANG KAMI'. Below this is a search bar and a 'Cari' button. The main content area is titled 'Metadana Statistik Khusus' and 'Pencarian Metadata Statistik Khusus'. It includes a search form with fields for 'Kata Kunci', 'Tahun' (with dropdowns for 'Semua' and 's.d. Semua'), 'Provinsi', and 'Penyelenggara'. There is also a 'Sektor' section with checkboxes for 'Pertanian', 'Industri', 'Niaga dan Jasa', 'Neraca', 'Sosial', 'Kependudukan', 'Keuangan dan Harga', and 'Lainnya'. Below the search form are 'Search' and 'Reset' buttons. To the right of the search form is a list of search results, each with a title and a brief description. Three callout boxes are present: one pointing to the search form area, one pointing to the list of results, and one pointing to a 'Statistik Khusus' menu on the left side of the page.

Gambar 18. Tampilan Daftar Metadata Statistik Khusus

2) Tampilan Metadata Statistik Khusus

Halaman tampilan metadata statistik khusus dapat dibuka dengan mengklik salah satu judul kegiatan di daftar metadata statistik khusus. Pada halaman ini, terdapat deskripsi metadata berupa informasi umum, variabel utama, metodologi, pengumpulan data, dan pengolahan data. Pengguna juga dapat mengunduh dokumentasi metadata statistik khusus dengan format PDF. Adapun tampilan metadata statistik khusus dapat dilihat pada gambar 19.

BADAN PUSAT STATISTIK SIRuSa

Tautan | Unduh | Pengaduan | Peta Situs | Login

Search Cari

BERANDA METADATA SOLUSI STATISTIK REKOMENDASI GLOSARIUM TENTANG KAMI

Home Statistik Khusus View

Fungsi Coob-Douglas dalam memahami konsep produksi pertanian, 2012

Tahun Kegiatan	:	2012
Produsen	:	Universitas Islam Sumatera
Sektor Kegiatan	:	Pertanian
Metadata	:	Dokumentasi dalam PDF

Deskripsi

Informasi Umum

- Variabel Utama
- Metodologi
- Pengumpulan Data
- Pengolahan Data

Identifikasi Penyelenggara Kegiatan

PENYELENGGARA
Universitas Islam Sumatera

ALAMAT LENGKAP PENYELENGGARA
Jl. Sisingamangaraja teladan medan
Kabupaten/Kota: KOTA MEDAN
Provinsi: SUMATERA UTARA

Penanggung Jawab Kegiatan (Contact Person)

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

Nama	:	edi.sopian, SE, MSi
Jabatan	:	Dekan Fakultas Ekonomi UISU
Alamat	:	Jl. Sisingamangaraja Teladan Medan
Telepon	:	0617869880
Fax	:	
Email	:	feisumdn@nusa.net.id

PENANGGUNG JAWAB TEKNIS KEGIATAN

Nama	:	edi.sopian
Jabatan	:	
Alamat	:	
Telepon	:	
Fax	:	
Email	:	

Informasi Umum Kegiatan

TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN
Sarana berkarya/berkreasi dalam rangka mewujudkan kualitas sumber daya dosen dan sekaligus sebagai saluran informasi serta komunikasi ilmiah.

Gambar 19. Tampilan Metadata Statistik Khusus

3. Solusi Statistik

Menu Solusi Statistik menyediakan dua layanan, yaitu materi tata cara pelaksanaan survei dan konsultasi pelaksanaan survei. Materi tata cara pelaksanaan survei terdiri dari konsep dasar survei, tata cara pengambilan sampel, pemanfaatan data hasil survei, dan analisis hasil survei. Klik tautan untuk melihat penjelasan lebih lanjut. Adapun tampilan solusi statistik dapat dilihat pada gambar 20.

Instansi anda berencana melakukan survei?

Bingung dengan tata cara pelaksanaan survei yang baik dan benar?

Kami Siap Membantu Anda

- Materi Tatacara Pelaksanaan Survei
- Konsultasi tentang Pelaksanaan Survei

Materi Tatacara Pelaksanaan Survei

- 1** Konsep Dasar Survei
- 2** Tata Cara Pengambilan Sampel
- 3** Pemanfaatan Data Hasil Survei
- 4** Analisis Hasil Survei

Konsultasi tentang Pelaksanaan Survei

BPS menyediakan fasilitas untuk instansi yang ingin berkonsultasi tentang survei yang akan dilaksanakan. Konsultasi ini tidak dipungut biaya apapun. Langkah-langkahnya:

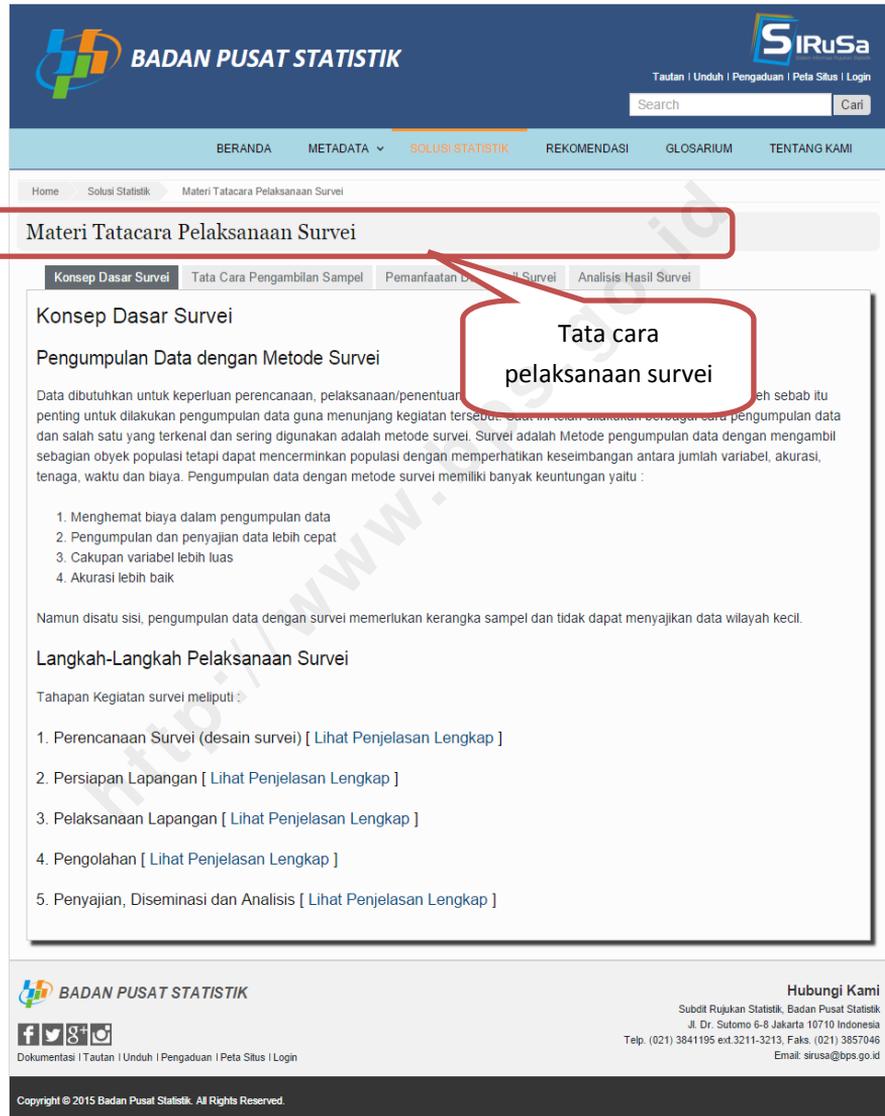
- 1** Mendaftar ke sistem solusi statistik
Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah dan cepat
- 2** Mengisi formulir rencana survei
Isikan informasi tentang rencana kegiatan survei seperti tujuan survei, target sampel, dsb.
- 3** Mendapatkan rekomendasi tentang survei
Konsultasi kami akan memberikan rekomendasi berdasarkan formulir yang diisi
- 4** Konsultasi lebih lanjut dan mendalam
Konsultasi lebih lanjut bisa dilakukan dengan konsultasi kami melalui media online.

Klik tautan untuk melihat penjelasan

Gambar 20. Tampilan Solusi Statistik

a. Tata Cara Pelaksanaan Survei

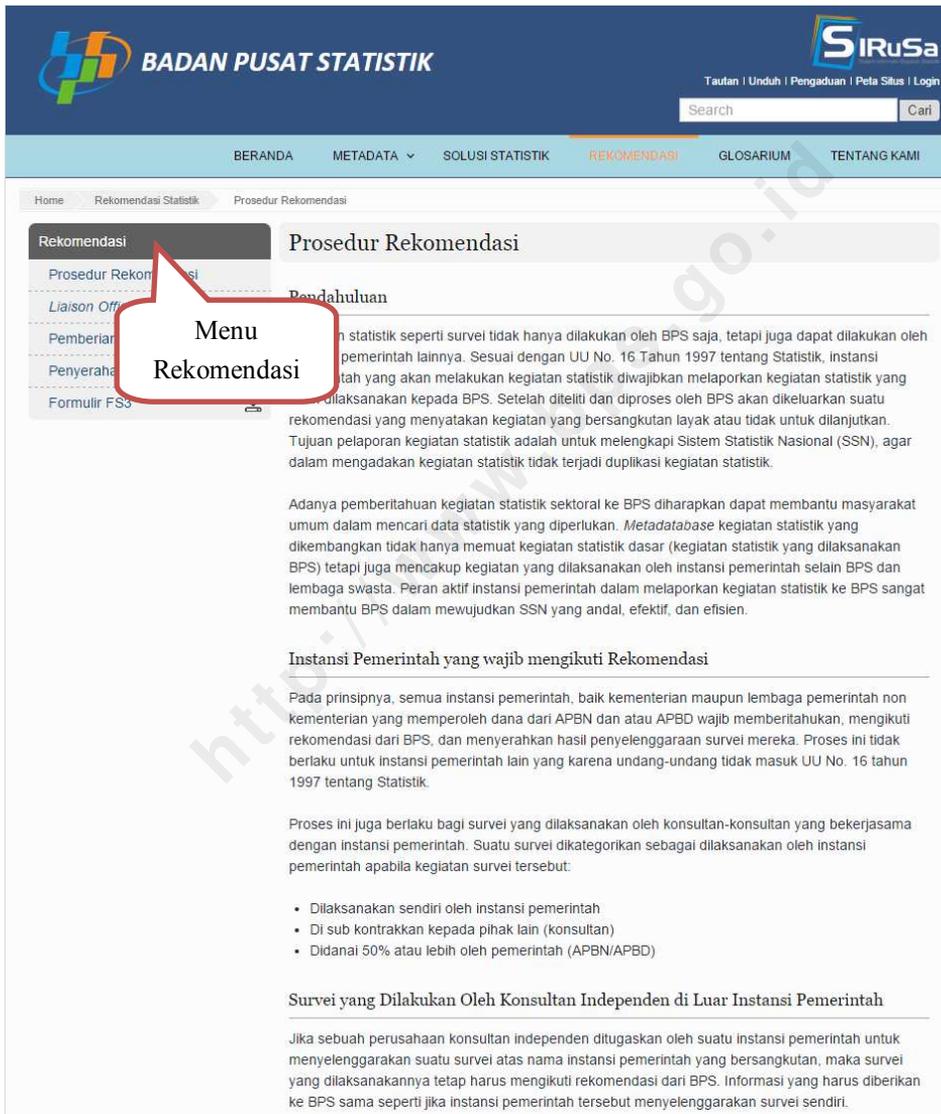
Dari halaman Solusi Statistik, pengguna dapat membuka halaman materi tata cara pelaksanaan survei. Tata cara pelaksanaan survei yang ditampilkan meliputi konsep dasar survei, tata cara pengambilan sampel, pemanfaatan data hasil survei, dan analisis hasil survei. Adapun tampilan tata cara pelaksanaan survei dapat dilihat pada gambar 21.



Gambar 21. Tampilan Tata Cara Pelaksanaan Survei

4. Rekomendasi

Instansi sektoral dapat meminta rekomendasi kegiatan statistik ke Subdit Rujukan Statistik, BPS. Tata cara permintaan rekomendasi dijelaskan pada menu rekomendasi di SIRuSa, yaitu prosedur rekomendasi, Liaison Officer, pemberian rekomendasi, dan penyerahan hasil. Selain itu, pengguna juga dapat mengunduh formulir permintaan rekomendasi, formulir FS3, di halaman ini. Adapun tampilan rekomendasi dapat dilihat pada gambar 22.



Gambar 22. Tampilan Rekomendasi

5. Glosarium

SIRuSa menyediakan beberapa istilah dan deskripsinya. Pengguna dapat melakukan pencarian istilah berdasarkan kata kunci, kategori istilah, dan inisial istilah. Kategori istilah meliputi statistik, komputer, pertanian, ekonomi, sosial kependudukan, dan geografi. Adapun tampilan glosarium dapat dilihat pada gambar 23.

Istilah	Deskripsi
Bidang Lahan	Bidang Lahan adalah sehemparan tanah yang dikuasai oleh suatu rumahtangga/badan yang dibatasi oleh sungai, jalan umum, hutan, selokan umum dan semacamnya atau dibatasi oleh lahan yang dikuasai pihak lain atau jenis lain. Yang dimaksud badan di sini seperti lembaga berbadan hukum, desa dan adat.
Budidaya	Budidaya adalah kegiatan memelihara binatang/tanaman mulai dari pembenihan sampai pemungutan/pemanenan hasil
Hutan	Hutan adalah suatu lapangan bertumbuh pohon-pohonan yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. (UU Ketentuan Pokok Kehutanan, Pasal 1)
Jasa Kehutanan	Jasa kehutanan adalah kegiatan yang dilakukan baik oleh perorangan maupun badan usaha atas dasar balas jasa atau kontrak seperti kegiatan penanaman hutan, penghijauan, pengamanan hutan, dan kegiatan jasa kehutanan lainnya
Jasa Perikanan adalah	Jasa perikanan adalah kegiatan yang dilakukan baik oleh perorangan maupun badan usaha atas dasar balas jasa atau kontrak yang meliputi kegiatan pengolahan lahan, penyelenggaraan irigasi, pemupukan, penyewaan alat perikanan dengan operatornya, penebaran benih, pendederan benih, pemberantasan hama, panen, sortasi dan gradasi, pengepakan, penyewaan induk, dan pemeliharaan dan perawatan alat pertanian
Jasa Pertanian dan Peternakan	Jasa pertanian dan peternakan adalah kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha atas dasar balas jasa atau kontrak yang meliputi kegiatan pengolahan lahan, penyelenggaraan irigasi, pemupukan, penyewaan alat pertanian dengan operatornya, penyebaran bibit/benih, penyemaian tanaman, penyemprotan/pembasmian jasad pengganggu, pemangkasan, pemanenan/pemetikan, pengupasan, sortasi dan gradasi, pengepakan, pelayanan pencari rumput untuk makanan ternak, pengembalaan ternak, pelayanan kesehatan terhadap kesehatan ternak, pencukuran bulu ternak, penyewaan pejantan, pelayanan penetasan telur, dan pemeliharaan dan perawatan alat pertanian
Kehutanan	Kehutanan adalah Kegiatan-kegiatan yang bersangkutan paut dengan hutan dan kepengurusannya
Lahan Bukan Sawah	Lahan bukan sawah adalah semua lahan selain lahan sawah seperti lahan pekarangan, huma, ladang, tegalan/kebun, lahan perkebunan, kolam, tambak, danau, rawa, dan lainnya
Lahan Hutan Negara	Lahan hutan negara adalah lahan kawasan hutan dan hutan yang tumbuh di atas tanah yang tidak dibebani hak milik.
Lahan Perkebunan	Lahan Perkebunan adalah lahan untuk budidaya tanaman perkebunan baik ditanam secara tunggal, campuran maupun tumpang sari baik yang diusahakan oleh rakyat maupun perkebunan besar (onderneming).

Gambar 23. Tampilan Glosarium

6. Tentang Kami

Penjelasan mengenai SIRuSa terdapat di halaman ini. Pada halaman ini, juga dijelaskan tiga metadada kegiatan statistik, yaitu statistik dasar, sektoral, dan khusus. Selain itu, pengguna juga dapat melihat alamat dan peta lokasi BPS. Adapun tampilan tentang kami dapat dilihat pada gambar 24.

BADAN PUSAT STATISTIK SIRuSa

Tautan | Unduh | Pengaduan | Peta Situs | Login

Search Cari

BERANDA METADATA SOLUSI STATISTIK REKOMENDASI GLOSARIUM TENTANG KAMI

Home Tentang Kami

Penjelasan SIRuSa

Sistem Informasi Rujukan Statistik

SIRuSa sebagai suatu website yang menyediakan informasi metadada kegiatan statistik yang ada di Indonesia, dalam rangka menunjang terbentuknya Sistem Statistika Nasional (SSN). Dengan adanya SIRuSa, diharapkan duplikasi kegiatan statistik dapat dihindari. SIRuSa merupakan salah satu bagian dari website BPS. Untuk bisa mengakses website BPS bisa dengan mengklik di menu atas Website BPS atau dengan mengetikkan alamat URL www.bps.go.id.

Metadada kegiatan statistik dalam SIRuSa dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu Statistik Dasar, Sektoral, dan Khusus.

- Statistik Dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional maupun regional, makro, dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab BPS.
- Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan. Meskipun program pelaksanaannya menjadi tanggung jawab instansi pemerintah terkait, dalam praktek pelaksanaan dapat bekerja sama dengan BPS.
- Statistik Khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan intern dari suatu instansi/perusahaan swasta dalam rangka penyelenggaraan riset atau penelitian. Meskipun pelaksanaannya menjadi tanggung jawab instansi/perusahaan terkait, dalam praktek pelaksanaan dapat bekerja sama dengan BPS.

Informasi yang dapat diperoleh melalui SIRuSa antara lain:

- Siapa penyelenggara kegiatan
- Tahun pelaksanaan kegiatan
- Metodologi pengumpulan data dan estimasi
- Hasil utama kegiatan
- Diseminasi kegiatan
- dan lain-lain

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Jl. Dr. Sutomo 6-8 Jakarta 10710 Indonesia
Telp. (021) 3841195, 3842508, 3810291
Faks. (021) 3857046
<http://www.bps.go.id>

Alamat BPS

Peta Lokasi BPS

Gambar 24. Tampilan Tentang Kami

7. Tautan

Halaman ini berisi tautan yang dikelompokkan menjadi tiga, tautan internal BPS, instansi sektoral, dan BPS provinsi. Tautan internal BPS meliputi beberapa *website* yang dimiliki BPS, tautan instansi sektoral merupakan alamat *website* instansi sektoral, sedangkan tautan BPS Provinsi merupakan alamat *website* BPS provinsi. Adapun tampilan tautan dapat dilihat pada gambar 25.

The screenshot shows the 'Tautan' page on the BPS website. The header includes the BPS logo and 'BADAN PUSAT STATISTIK' name, along with the 'SIRuSa' logo and navigation links like 'Tautan | Unduh | Pengaduan | Peta Situs | Login'. A search bar is present. The main content is divided into three sections: 'Internal BPS' (6 results), 'Instansi Sektoral' (3 results), and 'BPS Provinsi' (34 results). Each section lists specific links with external icons. The 'Internal BPS' section includes links to the BPS website, BPS Education and Training Center, Statistics Science High School, 2010 Census Results, 2013 Agriculture Census Results, and Microdata Catalog. The 'Instansi Sektoral' section includes links to the Ministry of Health, Ministry of Agriculture, and Ministry of Forestry. The 'BPS Provinsi' section includes links for BPS in Aceh, North Sumatra, West Sumatra, Jambi, Riau, South Sumatra, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, and Riau Islands. The page also features a pagination control at the bottom.

Gambar 25. Tampilan Tautan

8. Unduh

Pengguna dapat mengunduh *file* berupa kode klasifikasi, peraturan pemerintah, publikasi metadata, panduan, dan kuesioner metadata. Halaman unduh dapat diakses melalui tautan di bagian *header*. Adapun tampilan unduh dapat dilihat pada gambar 26.

The screenshot shows the 'Download' page of the Badan Pusat Statistik (BPS) website. The page is divided into two main sections. The first section, titled 'Download', has a sub-section 'Klasifikasi' with a dropdown menu labeled 'Kategori: --Pilih Kategori--'. A red callout bubble points to this menu with the text 'Pilih kategori klasifikasi'. Below the dropdown is a list of classification codes: 'Correspondence of CPC', 'COICOP', 'CPC ver 1.0', 'Harmonised System', and 'ISIC', each with a download icon. The second section, titled 'PP, Publikasi, Kuesioner, dll.', has a similar dropdown menu labeled 'Kategori: --Pilih Kategori--'. A red callout bubble points to this menu with the text 'Pilih kategori file unduh'. Below the dropdown is a list of legal documents: 'UU No. 16/1997 tentang Statistik', 'PP No. 51/1999 tentang Penyelenggaraan Statistik', 'Kepka BPS No.5 tentang Sistem Statistik Nasional', 'Kepka BPS No.6 tentang Penyelenggaraan Statistik Dasar', and 'Kepka BPS No.7 tentang Penyelenggaraan Survei Statistik Sektoral', each with a download icon. The page includes a search bar, navigation menu, and footer with contact information for Badan Pusat Statistik.

Gambar 26. Tampilan Unduh

9. Pengaduan

SIRuSa menyediakan *form* pengaduan sebagai media pengguna dalam menyampaikan kritik dan saran SIRuSa yang lebih baik. Tautan pengaduan berada di bagian *header*. Pengguna dapat mengirimkan pengaduan mengenai konten *website*, tampilan *website*, atau lainnya sesuai pilihan di isian subjek. Adapun tampilan pengaduan dapat dilihat pada gambar 27.

The image shows a web form for reporting issues on the SIRuSa platform. The form is located on the 'Hubungi Kami' (Contact Us) page of the Badan Pusat Statistik website. The form fields are: 'Nama *' (Name), 'Email *', 'Subjek *' (Subject), and 'Isi *' (Content). A red callout box points to the 'Subjek *' dropdown menu, which currently shows '--Pilih Subjek--'. The text 'Subjek Pengaduan' is written inside this callout box. Below the form fields is a CAPTCHA verification section with the 'gmero' logo and a text input field for the verification code. A 'Submit' button is located at the bottom of the form. The page header includes the Badan Pusat Statistik logo and the SIRuSa logo, along with navigation links like 'Tautan | Unduh | Pengaduan | Peta Situs | Login' and a search bar. The footer contains social media icons, contact information, and a copyright notice for 2015.

Gambar 27. Tampilan Pengaduan

10. Peta Situs

Halaman peta situs menampilkan menu dan sub menu yang ada di SIRuSa dalam bentuk *treeview*. Peta situs membantu pengguna dalam memahami struktur isi *website* sehingga memudahkan dalam menggunakan *website*. Pengguna juga dapat membuka halaman tertentu dengan mengklik tautan di peta situs. Adapun tampilan peta situs dapat dilihat pada gambar 28.



Gambar 28. Tampilan Peta Situs

11. Login

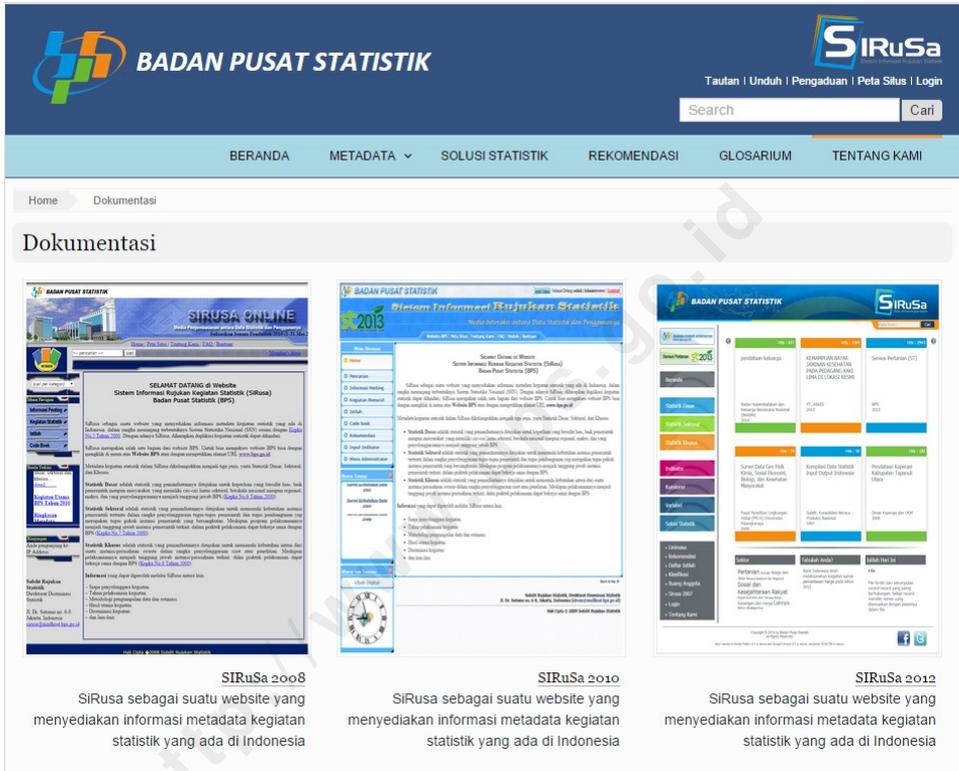
Halaman *login* digunakan untuk verifikasi petugas di Subdit Rujukan Statistik, BPS yang akan masuk ke dalam sistem *backend* SIRuSa. Sistem *backend* SIRuSa memungkinkan petugas mengelola metadata seperti entri, *update*, dan verifikasi metadata. Adapun tampilan daftar *login* dapat dilihat pada gambar 29.



Gambar 29. Tampilan Login

12. Dokumentasi

Halaman dokumentasi dapat diakses melalui tautan dokumentasi di dalam footer. Halaman ini menampilkan gambaran SIRuSa versi-versi sebelumnya, yaitu SIRuSa 2008, 2010, dan 2012. Adapun tampilan dokumentasi dapat dilihat pada gambar 30.



Gambar 30. Tampilan Dokumentasi

LAMPIRAN

<http://www.kms.go.id>



Badan Pusat Statistik

FS3

FORMULIR PEMBERITAHUAN
SURVEI STATISTIK SEKTORAL

Judul Survei :

Identitas Rekomendasi (diisi oleh BPS)

Pedoman Pengisian Kuesioner Statistik Sektoral (FS3)

Tuliskan judul survei yang akan dilaksanakan secara lengkap pada tempat yang disediakan.

Blok I. Identifikasi Penyelenggaraan Survei

1.1. Instansi Pemerintah Penyelenggara

Tuliskan nama instansi pemerintah (departemen/lembaga non departemen) penyelenggara survei ini dan dituliskan setingkat dengan eselon II, misal *Badan Perencanaan dan Pengembangan Tenaga Kerja, Departemen Tenaga Kerja RI*.

1.2. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara

Tuliskan dengan lengkap alamat instansi pemerintah penyelenggara (termasuk nomor telepon, faksimile, dan email). Contoh :

Departemen Tenaga Kerja RI, Badan Perencanaan dan Pengembangan Tenaga Kerja

Jl. Gatot Subroto Kav 51, Jakarta 12950, Telp. 525688

Kabupaten/Kota: Jakarta Selatan

Provinsi : DKI Jakarta

Blok II. Penanggung Jawab Survei (sebagai *Contact Person*)

2.1. Penanggung Jawab di Instansi

Tuliskan nama, jabatan, nomor telepon, nomor fax dan alamat email penanggung jawab survei di instansi penyelenggara survei. Penanggung jawab instansi disini sebaiknya yang mengetahui tentang informasi umum mengenai survei. Informasi umum adalah keterangan mengenai latar belakang, tujuan, cakupan dan lain-lainnya tentang survei ini.

2.2. Manajer Survei

Tuliskan nama, jabatan, alamat surat, nomor telepon, nomor fax, dan alamat email manajer survei.

Blok III. Informasi Umum

3.2. Survei ini dilakukan

Lingkari kode 1 jika survei dilakukan hanya sekali dan lingkari kode 2 jika survei ini dilakukan berulang kali.

3.3. Jika “Berulang” frekuensi penyelenggaraan Rincian 3.1. (selanjutnya akan ditulis R.3.1.) berkode 2. Lingkari kode yang sesuai dengan frekuensi dilakukannya survei ini.

3.4. Tipe pengumpulan data

Lingkari kode 1 jika tipe pengumpulan data pada survei ini *longitudinal*, kode 2 jika *cross sectional*, dan kode 3 jika gabungan *longitudinal* dan *cross sectional*.

1. *Longitudinal*, yaitu data dikumpulkan pada waktu yang berbeda (dari waktu ke waktu) dan dilakukan secara terus menerus untuk melihat perubahan yang terjadi, biasanya ada analisis secara deskriptif.

- *Trend studies*: (1) dilakukan secara berkala; (2) setiap sampel mewakili populasi untuk waktu yang berbeda; (3) populasi sama, anggota mungkin berubah; (4) ada kemungkinan mengkaitkan antar variabel, tetapi tidak rinci.
- *Cohort studies*: (1) fokusnya adalah spesifik populasi; (2) dilakukan secara berkala; (3) populasi keadaan awal dan diikuti.
- *Parallel studies*: (1) dilakukan secara berkala; (2) sampel sama dan diikuti secara terus menerus; (3) analisa populasi tidak dimungkinkan dan rumit; (4) mahal dan membutuhkan waktu.

2. *Cross Sectional*, yaitu data dikumpulkan pada saat tertentu dari sampel terpilih dan menggambarkan suatu parameter pada saat itu (suatu saat) juga digunakan untuk mengaitkan suatu peubah dengan peubah lainnya (kajian mengaitkan antar variabel).

I. Identifikasi Penyelenggara Survei	
1.1. Instansi Pemerintah Penyelenggara :	
1.2. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara :	
Kabupaten/Kota : (Coref salah satu)	
Provinsi :	
II. Penanggung Jawab Survei (Sebagai Contact Person)	
2.1. Nama Penanggung Jawab di Instansi :	
Jabatan :	
Telepon :	Fax :
E-mail :	
2.2. Nama Manajer Survei :	
Jabatan :	
Alamat :	
Telepon :	Fax :
E-mail :	
III. Informasi Umum	
3.1. Survei ini dilakukan:	
<i>Hanya sekali</i> - 1 ----> langsung ke R.3.3.	<i>Berulang</i> - 2 <input type="checkbox"/>
3.2. Jika "Berulang" frekuensi penyelenggaraan (R.3.1. berkode 2)	
<i>Harian</i> - 1	<i>Empat Bulanan</i> - 5
<i>Mingguan</i> - 2	<i>Semesteran</i> - 6
<i>Bulanan</i> - 3	<i>Tahunan</i> - 7 <input type="checkbox"/>
<i>Triwulanan</i> - 4	<i>> Dua Tahunan</i> - 8
<i>Lainnya (sebutkan)</i>	- 9
3.3. Tipe pengumpulan data:	
<i>Longitudinal</i>	- 1
<i>Cross Sectional</i>	- 2 <input type="checkbox"/>
<i>Longitudinal dan Cross Sectional</i>	- 3

Blok IV. Tujuan Survei dan Peubah yang Dikumpulkan

4.1. Tujuan survei

Tuliskan tujuan diselenggarakannya survei ini secara ringkas dan jelas pada tempat yang telah disediakan.

4.2. Peubah (*variable*) yang dikumpulkan pada survei ini dan periode enumerasi (referensi waktu)

Tuliskan peubah yang akan dikumpulkan dan periode enumerasi (referensi waktu) yang digunakan dalam survei ini. Contoh :

Besarnya biaya untuk pekerja, pembelian bahan baku, bahan penolong, sewa tempat, dan lain-lain pada perusahaan industri elektronika, dengan periode enumerasi adalah setahun yang lalu.

Blok V. Rancangan Pengumpulan Data

5.1. Cara pengumpulan data

Tuliskan cara pengumpulan data yang akan dilakukan. Lingkari kode 1 jika pengumpulan data hanya pada sebagian populasi (sampel) dan lingkari kode 2 jika pengumpulan data pada seluruh populasi.

5.2. Survei dilakukan di

Tuliskan wilayah atau daerah dimana survei ini akan dilakukan. Lingkari kode 1 jika survei akan dilakukan di seluruh wilayah Indonesia dan lingkari kode 2 jika survei akan dilakukan di sebagian wilayah Indonesia.

Pengertian di seluruh wilayah Indonesia adalah bila survei tersebut dilakukan di semua provinsi dan mencakup semua kabupaten/kota yang ada di Indonesia, tetapi tidak harus mencakup seluruh kecamatan atau desa/kelurahan yang ada. Bila ada responden atau unit wilayah di satu kabupaten/kota yang terambil dalam suatu survei, maka kabupaten/kota tersebut sudah diartikan tercakup dalam survei yang dimaksud. Sehingga bila di semua kabupaten/kota ada sebagian wilayahnya yang terambil survei yang akan dilakukan, sudah diartikan mencakup seluruh wilayah Indonesia.

5.3. Bila disebagian wilayah Indonesia, survei dilakukan di

Tuliskan nama provinsi dan nama kabupaten/kota yang akan dicakup bila survei akan dilakukan disebagian wilayah Indonesia (tidak mencakup semua propinsi atau tidak mencakup semua kabupaten/kota yang ada di Indonesia). Bila dalam satu provinsi semua kabupaten/kota tercakup dalam survei yang akan dilakukan, tidak perlu ditulis nama-nama kabupaten/kota yang ada tetapi cukup ditulis "semua". Jika ruang yang tersedia tidak mencukupi gunakan kertas tambahan.

IV. Tujuan Survei dan Peubah yang Dikumpulkan	
4.1. Tujuan Survei :	
4.2. Peubah (<i>variable</i>) yang dikumpulkan pada survei ini dan periode enumerasi (<i>referensi waktu</i>)	
V. Rancangan Pengumpulan Data	
5.1. Cara pengumpulan data :	
<i>Sebagian populasi (sampel)</i>	- 1 <input type="checkbox"/>
<i>Seluruh populasi</i>	- 2 <input type="checkbox"/>
5.2. Survei dilakukan di :	
<i>Seluruh wilayah Indonesia</i>	- 1 -----> langsung ke R. 5.4. <input type="checkbox"/>
<i>Sebagian wilayah Indonesia</i>	- 2
5.3. Bila di sebagian wilayah Indonesia, survei dilakukan di :	
<i>No.</i>	<i>Provinsi</i>
<i>Kabupaten/Kota</i>	
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

5.4. Metode pengumpulan data

Tentukan metode pengumpulan data yang dilakukan pada survei ini. Lingkari kode yang sesuai (bisa lebih dari satu). Jika isian lebih dari satu, jumlahkan kode yang terpilih dan pindahkan ke kotak yang tersedia.

5.5. Metode penelitian

Tentukan metode penelitian pada survei ini apakah sampel probabilitas atau sampel non probabilitas.

Sampel probabilitas adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.

Sampel non probabilitas adalah teknik yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.

5.6. Metode untuk Sampel Non Probabilitas (bila R.5.5. berkode 2)

Jika P.5.5 kode yang dilingkari adalah kode 2 (sampel Non Probabilitas) jelaskan metode yang digunakan dan komposisi sampelnya.

Teknik sampel non probabilitas meliputi:

1. Sampling sistematis (*systematic sampling*); teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Misalkan suatu populasi berisi 100 anggota diberi nomor urut 1 sampai dengan 100. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan nomor ganjil saja, genap saja, atau kelipatan dari bilangan tertentu.
2. Sampling kuota (*quota sampling*); teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan, jumlah subjek yang akan diselidiki ditetapkan terlebih dahulu. Biasanya teknik ini juga disebut *judgement sampling* karena teknik pengambilan sampelnya berdasarkan pendapat atau pertimbangan-pertimbangan tertentu. Sampel yang terambil tidak selalu mewakili populasi.
3. Sampling aksidental (*accidental sampling*); teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, sangat subyektif, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.
4. *Purposive Sampling*; teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, dengan catatan bahwa sampel tersebut mewakili populasi. Dalam purposive pemilihan sekelompok subyek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Misalnya akan melakukan penelitian tentang disiplin pegawai, maka sampel yang dipilih adalah orang yang ahli dalam bidang kepegawaian saja.
5. Sampling jenuh; teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang.
6. *Snowball sampling*; teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak. Ibarat bola salju yang menggelinding, makin lama semakin besar.

5.7. Apakah melakukan Uji Coba (*Pilot Study*)

Lingkari kode 1 jika pada survei ini dilakukan pilot studi dan lingkari kode 2 jika tidak dilakukan uji coba. Jika kode 1, jelaskan secara singkat pelaksanaan uji coba tersebut, seperti jumlah responden, tempat pelaksanaan uji coba, frekuensi uji coba, dan lain-lain.

5.8. Petugas pengumpul data

Sebutkan petugas pengumpul data survei ini. Lingkari kode yang sesuai (bisa lebih dari satu).

5.9. Persyaratan pendidikan terendah petugas pengumpul data

Sebutkan persyaratan pendidikan terendah seluruh petugas pengumpul data survei ini, baik staf sendiri, mitra/kontrak, maupun lainnya. Lingkari kode yang sesuai (bisa lebih dari satu)

5.10. Apakah melakukan pelatihan petugas

Lingkari kode 1 jika petugas pelaksana survei ini mengikuti pelatihan terlebih dahulu atau lingkari kode 2 jika tidak. Jika "ya", jelaskan secara ringkas tentang kegiatan pelatihan petugas tersebut. Misal antara lain berapa lama waktu pelatihan dan materi pokok pelatihan.

5.11. Jumlah petugas

Isikan jumlah petugas yang pelaksana survei ini sesuai dengan tugasnya, yaitu supervisi/penyelia dan petugas pengumpul data.

5.4. Metode pengumpulan data :		
<i>Wawancara langsung</i>	- 1	
<i>Wawancara melalui sarana komunikasi</i>	- 2	
<i>Mengisi kuesioner sendiri (swacacah)</i>	- 4	<input type="checkbox"/>
<i>Pengamatan (observasi)</i>	- 8	
<i>Lainnya (sebutkan)</i>	- 16	
5.5. Metode penelitian :		
<i>Sampel Probabilitas</i>	- 1 -----> langsung ke R.5.7	<input type="checkbox"/>
<i>Sampel Non Probabilitas</i>	- 2	
5.6. Metode untuk <i>Sampel Non Probabilitas</i> (bila R.5.5. berkode 2) :		
5.7. Apakah melakukan Uji Coba (<i>Pilot Study</i>) :		
Ya	- 1	
Tidak	- 2	<input type="checkbox"/>
Jika "Ya", jelaskan :		
5.8. Petugas pengumpul data :		
<i>Staf sendiri</i>	- 1	
<i>Mitra/Tenaga Kontrak</i>	- 2	<input type="checkbox"/>
<i>Lainnya (sebutkan)</i>	- 4	
5.9. Persyaratan pendidikan terendah petugas pengumpul data :		
<i>SMP</i>	- 1	
<i>SMU/SMK</i>	- 2	<input type="checkbox"/>
<i>Akademi/Universitas</i>	- 4	
5.10. Apakah melakukan pelatihan petugas :		
Ya	- 1	
Tidak	- 2	<input type="checkbox"/>
Jika "Ya", jelaskan :		
5.11. Jumlah petugas :		
<i>Supervis/Penyelia/Pengawas</i>	Orang	
<i>Pengumpul Data/Enumerator</i>	Orang	

Blok VI. Rancangan Sampel (diisi bila R.5.1. berkode 1 dan R.5.5. berkode 1)

6.1. Jenis rancangan sampel

Tuliskan secara ringkas jenis rancangan sampel yang digunakan pada survei ini. Lingkari kode 1 jika rancangan sampel adalah *single stage/phase*, dan kode 2 jika rancangan sampel *multi stage/phase* atau rancangan sampel lebih dari satu tahap dan jelaskan.

Single stage adalah penarikan sampel langsung pada unit-unit yang terdaftar pada kerangka sampel (penarikan sampel hanya satu kali).

Multi stage adalah metode pengambilan sampel melalui dua tahap atau lebih dimana metode tiap tahapnya bisa berbeda.

Misal:

Tahap I: Populasi pertama terdiri dari seluruh kecamatan yang dipilih secara pps dari seluruh kabupaten.

Tahap II: Dari kecamatan terpilih diambil beberapa kelurahan/desa secara pps.

Tahap III: Dari desa terpilih dibuat daftar seluruh unit sampel yang akan digunakan.

6.2. Kerangka sampel

Tulis dan jelaskan secara rinci kerangka sampel yang digunakan. Jika bertahap tuliskan kerangka sampel untuk setiap tahap.

Yang dimaksud dengan kerangka sampel adalah daftar dari semua unsur sampel dalam populasi sampel, berisi seluruh unit dalam populasi yang akan dijadikan dasar penarikan sampel (dibentuk dari kerangka induk). Kerangka sampel dapat berupa daftar mengenai jumlah penduduk, jumlah bangunan, mungkin pula sebuah peta yang unit-unitnya tergambar secara jelas.

Sebaiknya kerangka sampel memenuhi syarat, sebagai berikut :

- Meliputi seluruh unsur sampel, tersedia sampai satuan unit terkecil sebagai dasar penarikan sampel
- Unsur sampel tidak dihitung dua kali, tidak tumpang tindih atau terlewat
- Up to date
- Mempunyai batas jelas
- Mempunyai korelasi dengan data yang diteliti
- Dapat dilacak di lapangan

Contoh : Untuk satu tahap: *Direktori Perusahaan Industri Besar dan Sedang di Tahun 1998.*

Untuk dua tahap: *Tahap I. Daftar Blok Sensus di DKI Jakarta 1999*

Tahap II. Daftar Rumah Tangga pada tiap Blok Sensus di DKI Jakarta.

6.3. Metode pemilihan sampel

Tuliskan secara ringkas metode pemilihan sampel yang digunakan pada survei ini, misalnya *simple random sampling, stratified sampling, systematic sampling, quota sampling, synchronized sampling*. Jika survei ini menggunakan rancangan sampling multi stage/phase, jelaskan pemilihan sampel pada tiap stage/phase.

- *Simple random sampling*; pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.
- *Stratified sampling*; pengambilan sampel dengan cara membagi populasi ke dalam kelompok-kelompok yang homogen (strata), dan kemudian sampel diambil secara acak dari setiap strata tersebut.
- *Systematic sampling*; metode pengambilan sampel secara sistematis dengan interval tertentu dari suatu kerangka sampel yang telah diurutkan.

6.4. Keseluruhan fraksi sampel (*overall sampling fraction*)

Tuliskan fraksi sampel (n/N) secara keseluruhan. Jika rancangan sampel multi stage/phase, fraksi sampel yang ditulis adalah untuk seluruh tahap.

6.5. Unit sampel

Tuliskan unit sampel terkecil dan tuliskan jumlah seluruh sampel survei ini.

Unit sampel adalah unit yang dijadikan dasar penarikan sampel baik berupa elemen atau kumpulan elemen (klaster). Sebagai contoh rumah tangga dapat dijadikan unit sampel dan atau kumpulan rumah tangga pada wilayah tertentu yaitu blok sensus. Contoh lain dari unit sampel adalah daftar individu perusahaan/usaha.

6.6. Perkiraan *sampling error*

Tuliskan perkiraan *sampling error* pada survei ini.

Sampling error adalah penyimpangan yang terjadi karena adanya kesalahan dalam pemakaian sampel. Semakin besar sampel yang diambil maka semakin kecil terjadinya penyimpangan.

6.7. Responden

Tuliskan responden dan jumlah responden survei ini. Isian rincian ini bisa sama dengan rincian 6.5.

Contoh : Responden survei adalah perorang/individu pada rumah tangga terpilih sampel

VI. Rancangan Sampel (diisi bila R.5.1. berkode 1 dan R.5.5. berkode 1)	
6.1. Jenis Rancangan Sampel:	
<i>Single Stage/Phase</i> - 1	<input type="checkbox"/>
<i>Multi Stage/Phase (sebutkan)</i> - 2	
6.2. Kerangka sampel:	
6.3. Metode pemilihan sampel:	
6.4. Keseluruhan fraksi sampel (<i>overall sampling fraction</i>):	
6.5. Units sampel :	
6.6. Perkiraan <i>sampling error</i> :	
6.7. Responden:	

Blok VII. Pengolahan Data, Estimasi, dan Analisis

7.1. Metode pengolahan

Prosedur dan metode pengolahan data yang dilakukan untuk mengolah data hasil survei ini, antara lain meliputi penyuntingan (*editing*), penyandian (*coding*), dan penyahihan (*validasi*). Lingkari kode 1 jika “Ya” dan kode 2 jika “Tidak”. Adapun yang dimaksud dengan

- Penyuntingan adalah melakukan pengecekan terhadap kemungkinan kesalahan pengisian daftar pertanyaan dan ketidakserasian informasi (*inconsistency*)
- Penyandian adalah kegiatan pemberian kode-kode tertentu untuk mempermudah pengolahan, terutama jika akan diolah dengan media komputer
- Penyahihan adalah proses pemeriksaan terhadap data dan proses perbaikan data yang salah menjadi data yang benar dan valid. Tingkat validitas data sangat berpengaruh terhadap kualitas keluaran (*output*) yang dihasilkan. Proses penyahihan ada dua cara yakni penyahihan manual dan penyahihan komputer.

7.2. Tingkat estimasi yang diharapkan

Lingkari kode tingkat estimasi yang diharapkan, kode yang dilingkari bisa lebih dari satu.

7.3. Metode analisis hasil survei

Tuliskan secara ringkas metode analisis yang akan digunakan pada survei ini. Misal regresi, regresi logistik.

7.4. Produk data yang tersedia untuk umum

Sebutkan produk data dari survei ini yang didiseminasikan/disebarluaskan kepada umum. Lingkari kode 1 jika “Ya” tersedia dan 2 jika “Tidak” tersedia.

Keterangan:

- Publikasi dalam hardcopy adalah hasil survei yang dipublikasikan dalam bentuk buku.
- Publikasi dalam softcopy adalah hasil survei yang dipublikasikan dalam media komputer (disket, compact disc, optical disk).
- Macro data adalah hasil survei yang tersedia bagi umum dalam bentuk file-file summary (agregat).
- Micro data/raw data adalah hasil survei yang tersedia bagi umum dalam bentuk individual record.

7.5. Waktu pelaksanaan survei (lampirkan)

Tuliskan tanggal, bulan dan tahun perencanaan, pelaksanaan lapangan, pengolahan, penyajian, dan analisis survei ini.

7.6. Waktu ketersediaan hasil survei untuk umum

Tuliskan tanggal, bulan dan tahun ketersediaan hasil survei ini untuk umum.

Pengertian “ketersediaan” disini adalah bahwa hasil survei ini menjadi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum (*publicly available*).

VII. Pengolahan Data, Estimasi, dan Analisis

7.1. Metode pengolahan :

<i>Penyuntingan (Editing)</i>	Ya - 1	Tidak - 2	<input type="checkbox"/>
<i>Penyandian (Coding)</i>	Ya - 1	Tidak - 2	<input type="checkbox"/>
<i>Penyahihan (Validasi)</i>	Ya - 1	Tidak - 2	<input type="checkbox"/>

7.2. Tingkat estimasi yang diharapkan :

<i>Nasional</i>	- 1	<i>Kecamatan</i>	- 8	<input type="checkbox"/>
<i>Provinsi</i>	- 2	<i>Lainnya</i>	- 16	
<i>Kabupaten/Kota</i>	- 4	<i>Tidak dilakukan estimasi</i>	- 32	

7.3. Metode analisis hasil survei :

7.4. Produk data yang tersedia untuk umum :

<i>Publikasi dalam Media Cetak</i>	Ya - 1	Tidak - 2	<input type="checkbox"/>
<i>Publikasi dalam Media Elektronik</i>	Ya - 1	Tidak - 2	<input type="checkbox"/>
<i>Macro Data</i>	Ya - 1	Tidak - 2	<input type="checkbox"/>
<i>Micro Data/Raw Data</i>	Ya - 1	Tidak - 2	<input type="checkbox"/>
<i>Lainnya (sebutkan)</i>	Ya - 1	Tidak - 2	<input type="checkbox"/>

7.5. Waktu pelaksanaan survei (lampirkan) :

	Tgl		Bln		Thn			Tgl		Bln		Thn	
<i>Perencanaan/Persiapan</i>							s. d.						
<i>Pelaksanaan Lapangan</i>							s. d.						
<i>Pengolahan</i>							s. d.						
<i>Penyajian</i>							s. d.						
<i>Analisis</i>							s. d.						

7.6. Waktu ketersediaan hasil survei untuk umum :

Tgl		Bln		Thn	



Badan Pusat Statistik

FS2K

**FORMULIR PEMBERITAHUAN SINOPSIS
SURVEI STATISTIK KHUSUS**

Judul Survei:

Kode (didisi oleh BPS)

**PEDOMAN PENGISIAN FORMULIR
PEMBERITAHUAN SINOPSIS SURVEI STATISTIK KHUSUS**

Blok I. Identifikasi Penyelenggara Survei

1.1 Penyelenggara

Tuliskan nama penyelenggara survei ini.

Penyelenggara adalah orang atau instansi yang menyelenggarakan survei statistik khusus. Statistik khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan untuk kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsure masyarakat lainnya.

Contoh: *Centre for Statistical Services*

1.2 Alamat lengkap penyelenggara

Tuliskan dengan lengkap alamat penyelenggara (termasuk nomor telepon, faksimile, dan email).

Contoh: *Centre for Statistical Services*

Jalan Dr. Sutomo No. 6-8 Gd. 3 Lt. 1, Jakarta 10710, Telp: (021) 3842508

Fax: (021) 3842509, E-mail: css@mailhost.bps.go.id

Kabupaten/Kota : Jakarta Pusat

Provinsi : DKI Jakarta

Blok II. Penanggung Jawab Survei (sebagai *Contact Person*)

2.1 Nama penanggung jawab (Penyelenggara Survei)

Tuliskan dengan lengkap nama, jabatan, nomor telepon, nomor fax, dan alamat email penanggung jawab umum survei.

2.2 Nama manajer survei

Manajer survei adalah orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan survei, termasuk urusan administrasi, pelaksanaan teknis, dan pelaksanaan survei di lapangan. Tuliskan dengan lengkap nama, jabatan, nomor telepon, nomor fax, dan alamat e-mail manajer survei.

Blok III. Informasi Umum

3.1 Survei ini dilakukan

Lingkari kode 1 jika survei dilakukan hanya sekali dan lingkari kode 2 jika survei ini dilakukan berulang kali.

3.2 Jika 'Berulang', frekuensi penyelenggara

Lingkari kode yang sesuai dengan frekuensi dilakukannya survei ini.

3.3 Tipe pengumpulan data

Tipe pengumpulan data:

1. *Longitudinal*, yaitu data dikumpulkan pada waktu yang berbeda untuk melihat perubahan yang terjadi (biasanya ada analisis secara deskriptif). Variabel yang digunakan pada tipe pengumpulan data ini umumnya sedikit.
2. *Cross sectional*, yaitu data dikumpulkan pada saat tertentu dari sampel terpilih dan menggambarkan suatu parameter pada saat itu (suatu saat) juga digunakan untuk mengaitkan suatu peubah dengan peubah lainnya. Variabel yang digunakan pada tipe pengumpulan data ini umumnya banyak.
3. Gabungan *longitudinal* dan *cross sectional*.

Lingkari kode 1 jika tipe pengumpulan data pada survei ini longitudinal. Kode 2 jika tipe pengumpulan data pada survei ini *cross sectional*. Kode 3 jika tipe pengumpulan data pada survei ini gabungan longitudinal dan *cross sectional*.

I. Identifikasi Penyelenggaraan Survei			
1.1. Penyelenggara:			
1.2. Alamat Lengkap Penyelenggara :			
Kabupaten/Kota : <i>(pilih salah satu)</i>			
Provinsi :			
II. Penanggung Jawab survei (Sebagai <i>Contact Person</i>)			
2.1. Nama Penanggung Jawab:			
Jabatan :			
Alamat :			
Telepon :		Fax:	
E-mail :			
2.2. Nama Manajer Survei :			
Jabatan :			
Alamat :			
Telepon :		Fax:	
E-mail :			
III. Informasi Umum			
3.1. Survei ini dilakukan:			
Hanya sekali	1. ----->	langsung ke R. 3.3.	Berulang -2 <input type="checkbox"/>
3.2. Jika "berulang" Frekuensi penyelenggaraan (R.3.1. berkode 2)			
Harian	-1	Empat Bulanan	-5
Mingguan	-2	Semesteran	-6
Bulanan	-3	Tahunan	-7
Triwulanan	-4	> Dua Tahunan	-8
3.3. Tipe Pengumpulan data:			
<i>Longitudinal</i>	-1		<input type="checkbox"/>
<i>Cross-Sectional</i>	-2		<input type="checkbox"/>
<i>Longitudinal dan Cross-sectional</i>	-3		

Blok IV. Tujuan Survei dan Peubah yang Dikumpulkan

4.1 Tujuan survei

Tuliskan tujuan diselenggarakannya survei ini secara ringkas dan jelas pada tempat yang telah disediakan.

Contoh:

1. Untuk mendapatkan data tentang penggunaan tenaga kerja, biaya produksi, volume, dan nilai produksi batu bata di Indonesia.
2. Untuk memperoleh data yang digunakan untuk memproduksi pertumbuhan ekonomi yang digambarkan PDB triwulanan.

4.2 Peubah (variabel) yang dikumpulkan pada survei ini dan periode enumerasi (referensi waktu)

Tuliskan peubah yang dikumpulkan dan periode enumerasi (referensi waktu) yang digunakan dalam survei ini.

Peubah adalah sesuatu yang dapat diukur dan memiliki nilai yang berubah-ubah (tidak konstan).

Periode enumerasi (*time reference*) adalah batasan waktu pada variabel yang ditanyakan dari waktu pelaksanaan survei.

Contoh:

Jumlah, kewarganegaraan, jenis kelamin, pendidikan, jenjang kedudukan, keahlian, dan umur tenaga kerja yang digunakan pada perusahaan batu bata, periode enumerasi adalah pada saat enumerasi.

Besarnya biaya untuk pekerja, pembelian bahan baku, bahan penolong, sewa tempat dan lain-lain untuk produksi batu bata, periode enumerasi setahun yang lalu.

Banyaknya produk utama dan produk sampingan yang dihasilkan perusahaan batu bata, periode enumerasi sebulan yang lalu.

Blok V. Rancangan Pengumpulan Data

5.1 Cara pengumpulan data

Cara pengumpulan data:

1. sebagian populasi (sampel) : informasi diperoleh dari sebagian unit populasi dengan cara mengambil sampel kemudian dilakukan estimasi terhadap populasi, pengumpulan datanya disebut survei.
2. seluruh populasi : informasi diperoleh dari seluruh unit populasi sehingga didapat nilai yang sebenarnya dari populasi tersebut (parameter), pengumpulan datanya disebut sensus.

Lingkari kode 1 jika pengumpulan data hanya pada sebagian populasi (sampel). Lingkari kode 2 jika pengumpulan data pada seluruh unit populasi.

5.2 Survei dilakukan di

Tuliskan wilayah atau daerah di mana survei ini dilakukan. Lingkari kode 1 jika survei dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Lingkari kode 2 jika survei dilakukan di sebagian wilayah Indonesia.

Pengertian di seluruh wilayah Indonesia adalah bila survei tersebut dilakukan di semua provinsi dan mencakup semua kabupaten/kota yang ada di Indonesia, tetapi tidak harus mencakup seluruh kecamatan atau desa/kelurahan yang ada. Bila ada responden atau unit wilayah di satu kabupaten/kota yang terambil dalam suatu survei, maka kabupaten/kota tersebut sudah diartikan dalam survei yang dimaksud. Sehingga bila di semua kabupaten/kota ada sebagian wilayahnya yang terambil survei yang dilakukan, sudah diartikan mencakup seluruh wilayah Indonesia.

5.3 Bila di sebagian wilayah Indonesia, survei dilakukan di

Tuliskan nama provinsi dan nama kabupaten/kota yang dicakup bila survei dilakukan di sebagian wilayah Indonesia (tidak mencakup semua provinsi atau tidak mencakup semua kabupaten/kota yang ada di Indonesia). Bila dalam satu provinsi semua kabupaten/kota tercakup dalam survei yang dilakukan, tidak perlu ditulis nama-nama kabupaten/kota yang ada tetapi cukup ditulis "semua". Jika ruang yang tersedia tidak mencukupi, gunakan kertas tambahan.

IV. Tujuan Survei dan Peubah yang Dikumpulkan	
4.1 Tujuan survei :	
4.2. Peubah (<i>variable</i>) yang dikumpulkan pada survei ini dan periode enumerasi (referensi waktu) :	
V. Rancangan Pengumpulan Data	
5.1. Cara pengumpulan data :	
Sebagian populasi (<i>sample</i>)	-1 <input type="checkbox"/>
Seluruh populasi	-2 <input type="checkbox"/>
5.2. Survei dilakukan di :	
Seluruh wilayah Indonesia	-1 -----> langsung ke R. 5.4. <input type="checkbox"/>
Sebagian wilayah Indonesia	-2
5.3. Bila di sebagian wilayah Indonesia, survei dilakukan di :	
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px; margin-right: 5px; text-align: center; line-height: 15px;">+</div> <div style="display: flex; flex-direction: column;"> <div style="margin-bottom: 5px;">No.</div> <div style="margin-bottom: 5px;">Provinsi</div> <div style="margin-bottom: 5px;">Kabupaten/Kota</div> </div> </div>	
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

5.4 Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data terdiri dari wawancara langsung dengan responden, wawancara melalui sarana komunikasi (telepon, surat, e-mail, dll), responden mengisi kuesioner sendiri (swacacah), pengamatan (observasi), dan lainnya.

Lingkari kode metode pengumpulan data yang digunakan pada survei ini (isian bisa lebih dari satu).

5.5 Metode penelitian

Metode penelitian:

1. sample probabilitas (*probability sampling*), yaitu metode penelitian dimana unit populasi memiliki peluang untuk terpilih sebagai sampel.
2. sample non-probabilitas (*non-probability sampling*), yaitu metode penelitian dimana unit populasi bisa tidak memiliki peluang untuk terpilih sebagai sampel. Metode non-probabilitas dilakukan jika tidak tersedia kerangka sampel, informasi dari populasi kurang tersedia, dan biaya penelitian terbatas.

Lingkari kode metode penelitian yang digunakan pada survei ini.

5.6 Metode untuk sample non-probabilitas

Metode untuk sample non-probabilitas antara lain *purposive sampling*, *quota*, dan *snow bowling*.

Jika pertanyaan 5.5 kode yang dilingkari adalah kode 2 (sampel non-probabilitas), jelaskan metode yang digunakan dan komposisi sampelnya.

Contoh:

Purposive sampling dengan komposisi 10 persen rumah tangga kelas atas, 20 persen kelas menengah, dan 70 persen kelas bawah. (*Sampel dari metode purposive sampling diperoleh berdasarkan pengalaman peneliti*)

Blok VI. Rancangan Sampel (Diisi Bila Pertanyaan 5.1 Berkode 1 dan Pertanyaan 5.5 Berkode 1)

6.1 Jenis rancangan sampel

Tuliskan secara ringkas jenis rancangan sampel yang digunakan pada survei ini. Lingkari kode 1 jika rancangan sampel adalah *single stage/phase*, yaitu rancangan sampel satu tahap. Kode 2 jika rancangan sampel adalah *multi stage/phase*, yaitu rancangan sampel lebih dari satu tahap dan jelaskan, misalnya *two stage/phase*, *three stage/phase*, dsb.

6.2 Kerangka sampel

Kerangka sampel memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

1. tersedia sampai unit yang terkecil
2. *up to date*
3. tidak tumpang tindih

Tulis dan jelaskan kerangka sampel yang digunakan pada survei ini. Jika bertahap tuliskan kerangka sampel untuk setiap tahap.

Contoh:

Untuk satu tahap: Direktori Perusahaan Industri Besar dan Sedang, Daftar Perusahaan Perdagangan.

Untuk dua tahap : Tahap I. Daftar Blok Sensus di DKI Jakarta

Tahap II. Daftar Rumah Tangga pada tiap Blok Sensus di DKI Jakarta

6.3 Metode pemilihan sampel

Tuliskan secara ringkas metode pemilihan sampel yang digunakan pada survei ini. Misalnya *simple random sampling* yaitu metode pemilihan sampel dimana unit populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel dan umumnya unit populasinya homogen. Jika survei ini menggunakan rancangan sampling *multi stage/phase*, jelaskan pemilihan sampel pada setiap *stage/phase*.

Contoh metode pemilihan sampel *multi stage*:

Stage/phase I pemilihan sampel menggunakan *simple random sampling (SRS)*

Stage/phase II pemilihan sampel menggunakan *probability proportional to size (PPS)*

5.4. Metode Pengumpulan data :		
Wawancara langsung	- 1	
Wawancara melalui sarana komunikasi	- 2	
Mengisi kuesioner sendiri (swacakah)	- 4	<input type="checkbox"/>
Pengamatan (observasi)	- 8	
Lainnya (sebutkan)	-16	
5.5. Metode penelitian:		
Sampel Probabilitas	-1 -----→ langsung ke R 6.1.	
Sampel Non-Probabilitas	-2	<input type="checkbox"/>
5.6. Metode untuk Sampel Non-Probabilitas (bila P.5.5. berkode 2) :		
VI. Rancangan Sampel (diisi bila R. 5.1. berkode 1 dan r. 5.5. berkode 1)		
6.1. Jenis Rancangan sample :		
Single stage/Phase	- 1	
Multi Stage/Phase (sebutkan)	- 2	
6.2. Kerangka sampel :		
6.3. Metode pemilihan sampel :		

6.4 Keseluruhan fraksi sampel (*overall sampling fraction*)

Fraksi sampel adalah perbandingan antara jumlah sample dengan jumlah populasi. Tuliskan fraksi sampel (n/N) secara keseluruhan jika rancangan sampel *multi stage/phase*, fraksi sampel yang ditulis adalah untuk seluruh tahap.

Contoh *two stage*:

Stage	populasi	sampel	fraksi
1. Blok sensus	N	n	n/N
2. Rumah tangga	M_i	m_i	m_i/M_i

6.5 Unit sampel

Tuliskan unit sampel terkecil dan tuliskan jumlah seluruh sampel survei ini.

Contoh:

- Unit sampel adalah rumah tangga sebanyak 3.000 yang distratifikasikan menurut pendapatan.
- Unit sampel adalah perusahaan sebanyak 2.500

6.6 Perkiraan *sampling error*

Sampling error adalah kesalahan yang terjadi dari segi teknis, misalnya kesalahan penggunaan metode pemilihan sampel.

Tuliskan perkiraan *sampling error* pada survei ini²

6.7 Responden

Tuliskan responden dan jumlah responden survei ini. Isian rincian ini bisa sama dengan rincian 6.5

Contoh: Responden survei adalah perorangan/individu pada rumahtangga terpilih sampel.

6.8 Tingkat estimasi yang diharapkan

Lingkari kode tingkat estimasi yang diharapkan, kode yang dilingkari bisa lebih dari satu.

Blok VII. Waktu Pelaksanaan Survei dan Abstraksi

7.1 Waktu pelaksanaan survei

Tuliskan tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan survei pada tempat yang tersedia.

7.2 Waktu ketersediaan hasil untuk umum

Tuliskan tanggal, bulan, dan tahun ketersediaan hasil survei ini untuk umum.

Pengertian “ketersediaan” di sini adalah bahwa hasil survei menjadi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum (*public available*).

6.4. Keseluruhan Fraksi Sampel (<i>Overall Sampling Fraction</i>)						
6.5. Unit Sampel :						
6.6. Perkiraan <i>Sampling Error</i> :						
6.7. Responden :						
6.8. tingkat estimasi yang diharapkan :						
Nasional	- 1	Kecamatan	- 8			
Provinsi	- 2	Lainnya	- 16	<input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>		
Kabupaten/Kota	- 4	Tidak dilakukan estimasi	- 32			
VII. Waktu Pelaksanaan Survei dan Abstraksi						
7.1. Waktu pelaksanaan survei :						
Tgl	Bln	Thn	s.d.	Tgl	Bln	Thn
<input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>		<input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>
7.2. Waktu ketersediaan hasil survey untuk umum :						
Tgl	Bln	Thn				
<input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>				

7.3 Abstraksi

Abstraksi adalah ringkasan dari hasil survei yang telah dilakukan.

Tuliskan secara ringkas dari hasil survei yang telah dilakukan. Jika ruang yang tersedia tidak mencukupi, lampirkan abstraksi tersebut dengan menggunakan kertas terpisah.

<http://www.bps.go.id>

7.3. Abstraksi:

<http://www.bps.go.id>

Lampiran 3. Kuesioner Metadata Kegiatan Statistik Sektoral/Khusus



BADAN PUSAT STATISTIK
REPUBLIK INDONESIA

Q-Metadata

METADATA KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL/KHUSUS

Judul kegiatan:

.....

.....

.....

Tahun kegiatan:

Sektor kegiatan : 01. Pertanian
02. Industri
03. Niaga dan Jasa
04. Neraca Nasional dan Regional
05. Sosial dan Kesejahteraan Rakyat
06. Kependudukan dan Ketenagakerjaan
07. Keuangan dan Harga
08. Lainnya (sebutkan.....)

Kegiatan yang dicakup pada metadata statistik sektoral/khusus adalah kegiatan yang dilakukan dengan cara sensus, survei, atau kompilasi produk administrasi yang memiliki keluaran untuk dipublikasikan.

Kegiatan statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangnya Sistem Statistik Nasional.

Statistik Dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik (BPS).

Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

Statistik Khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.

Pedoman Pengisian Metadata Kegiatan Statistik Sektor/Khusus

Blok I. Identifikasi Penyelenggara Kegiatan

Penyelenggara kegiatan statistik adalah instansi pemerintah, lembaga organisasi, perorangan dan unsur masyarakat lainnya

1.1. Penyelenggara

Tuliskan nama instansi/institusi penyelenggara kegiatan statistik setingkat eselon II/divisi/rektorat.

Misal: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan; Departemen Statistik Bank Indonesia; Divisi Bisnis Umum Bank Rakyat Indonesia; Lembaga Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

1.2. Alamat lengkap penyelenggara

Tuliskan dengan lengkap alamat instansi/institusi penyelenggara kegiatan statistik.

Contoh :

Menara Sjafrudin Prawiranegara Lt.14 Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350

Kabupaten/Kota: Jakarta Pusat

Provinsi: DKI Jakarta

Blok II. Penanggung Jawab Kegiatan (sebagai *Contact Person*)

2.3. Penanggung jawab kegiatan

Penanggung jawab kegiatan adalah pihak yang menjadi koordinator utama penyelenggaraan kegiatan statistik.

Tuliskan nama, jabatan, alamat, nomor telepon, nomor *faximile*, dan alamat *email* penanggung jawab kegiatan di instansi/institusi penyelenggara kegiatan statistik.

2.4. Penanggung jawab teknis kegiatan

Penanggung jawab teknis kegiatan adalah pihak yang menjadi koordinator teknis penyelenggaraan kegiatan. Penanggung jawab teknis kegiatan ini bisa pegawai atau pihak ketiga (konsultan).

Tuliskan nama, jabatan, alamat, nomor telepon, nomor *faximile*, dan alamat *email* penanggung jawab teknis kegiatan.

Blok III. Informasi Umum Kegiatan

3.1. Tujuan dan manfaat kegiatan

Tuliskan tujuan dan manfaat penyelenggaraan kegiatan.

3.5. Kegiatan ini dilakukan

Lingkari kode 1 jika kegiatan dilakukan hanya sekali atau baru dilakukan.

Lingkari kode 2 jika kegiatan dilakukan berulang kali, kegiatan rutin, atau sudah beberapa kali dilakukan.

Blok I. Identifikasi Penyelenggara Kegiatan <i>Tuliskan Instansi/Institusi penyelenggara kegiatan setingkat dengan eselon II/direktur/ektor</i>																
1.1. Penyelenggara:															
1.2. Alamat lengkap penyelenggara:															
Kabupaten/Kota ^{*)} : <small>*) coret yang tidak sesuai</small>															
Provinsi :															
Blok II. Penanggung Jawab Kegiatan (Sebagai Contact Person) <i>Penanggung jawab kegiatan merupakan pihak yang mengetahui informasi umum kegiatan</i>																
2.1. Penanggung jawab kegiatan:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Nama</td><td>:</td><td>.....</td></tr> <tr><td>Jabatan</td><td>:</td><td>.....</td></tr> <tr><td>Alamat</td><td>:</td><td>.....</td></tr> <tr><td>Telepon</td><td>:</td><td>..... Fax:</td></tr> <tr><td>Email</td><td>:</td><td>.....</td></tr> </table>	Nama	:	Jabatan	:	Alamat	:	Telepon	: Fax:	Email	:
Nama	:														
Jabatan	:														
Alamat	:														
Telepon	: Fax:														
Email	:														
2.2. Penanggung jawab teknis kegiatan:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Nama</td><td>:</td><td>.....</td></tr> <tr><td>Jabatan</td><td>:</td><td>.....</td></tr> <tr><td>Alamat</td><td>:</td><td>.....</td></tr> <tr><td>Telepon</td><td>:</td><td>..... Fax:</td></tr> <tr><td>Email</td><td>:</td><td>.....</td></tr> </table>	Nama	:	Jabatan	:	Alamat	:	Telepon	: Fax:	Email	:
Nama	:														
Jabatan	:														
Alamat	:														
Telepon	: Fax:														
Email	:														
Blok III. Informasi Umum Kegiatan																
3.1. Tujuan dan manfaat kegiatan:															
3.2. Kegiatan statistik ini dilakukan:	<p><i>Hanya sekali</i> - 1 → Lanjutkan ke R.3.3. <i>Berulang</i> - 2 <input type="checkbox"/></p>															

3.3. Jika “Berulang” frekuensi penyelenggaraan

Frekuensi penyelenggaraan merupakan periode waktu penyelenggaraan kegiatan statistik. Contoh: Kegiatan Survei Penjualan Eceran, frekuensi penyelenggaraan kegiatannya adalah bulanan.

Lingkari kode yang sesuai dengan frekuensi penyelenggaraan kegiatan statistik.

3.6. Frekuensi pengumpulan data

Frekuensi pengumpulan data merupakan periode waktu pengumpulan data.

Contoh: Survei Penjualan Eceran, pengumpulan data dilakukan dengan dua periode waktu yaitu:

1. Mingguan untuk kategori makanan, minuman, dan tembakau
2. Bulanan untuk kategori suku cadang dan aksesoris; bahan bakar kendaraan; peralatan informasi dan komunikasi; perlengkapan rumah tangga lainnya; barang budaya dan rekreasi; dan barang lainnya.

Lingkari kode yang sesuai, pemilihan kode bisa lebih dari satu. Jika kode yang dipilih lebih dari satu, maka jumlahkan kode yang terpilih lalu pindahkan ke kotak yang tersedia.

3.7. Tipe pengumpulan data

Tipe pengumpulan data mencakup cara pengumpulan dan analisis data yang akan dilakukan, apakah dalam satu waktu atau lebih dari satu waktu. Penentuan pilihan dimensi waktu sangat tergantung tujuan penelitian yang ingin dicapai. Tipe pengumpulan data terdiri dari:

- a. *Longitudinal* adalah pengumpulan data beberapa variabel pada periode waktu tertentu untuk mengetahui perubahan kondisi atau hubungan dari populasi yang diamatinya dalam periode waktu yang berbeda. Pengumpulan data *longitudinal* meliputi:

- 1) *Panel Studies*: pengumpulan data sejumlah individu yang sama pada interval waktu yang tetap.

- 2) *Cohort Studies*: pengumpulan data sejumlah individu untuk kategori yang sama pada interval waktu yang tetap.

Contoh: orang yang lahir pada tahun yang sama (*birth cohort*), orang yang lulus pada tahun yang sama.

- b. *Cross Sectional* adalah pengumpulan data beberapa variabel pada satu waktu untuk mengetahui hubungan satu variabel dengan variabel lain pada satu waktu tersebut.

- c. *Cross Sectional dan Longitudinal* adalah pengumpulan data beberapa variabel pada periode waktu tertentu untuk mengetahui hubungan satu variabel dengan variabel lain dan perubahan variabel tersebut dari populasi yang diamatinya dalam periode waktu yang berbeda. Contoh: *time series studies*.

Lingkari kode yang sesuai dengan tipe pengumpulan data.

Blok IV. Variabel yang Dikumpulkan

Tuliskan variabel utama yang dikumpulkan dan referensi waktu pengumpulan data masing-masing variabel. Contoh:

No.	Nama Variabel	Referensi Waktu
1	Besarnya biaya untuk pekerja	Sebulan yang lalu
2	Besarnya pembelian bahan baku, bahan penolong, sewa tempat, dan lain-lain	Setahun yang lalu

3.3. Jika "Berulang" frekuensi penyelenggaraan:

Bulanan	- 1	Lima Tahunan	- 5	<input type="checkbox"/>
Triwulanan	- 2	Sepuluh Tahunan	- 6	
Tahunan	- 3	Lainnya (sebutkan.....)	- 7	
Tiga Tahunan	- 4			

3.4. Frekuensi pengumpulan data

Harian	- 1	Semesteran	- 16	<input type="checkbox"/>
Mingguan	- 2	Tahunan	- 32	
Bulanan	- 4	Lainnya (Sebutkan.....)	- 64	
Triwulanan	- 8			

3.5. Tipe pengumpulan data :

Longitudinal	- 1	<input type="checkbox"/>
Cross Sectional	- 2	
Longitudinal dan Cross Sectional	- 3	

Blok IV. Variabel yang Dikumpulkan

Variabel utama yang dikumpulkan dan referensi waktu pengumpulan data masing-masing variabel (Tuliskan variabel utama dan referensi waktunya jika ada)

+	No.	Nama Variabel	Referensi Waktu

Blok V. Metodologi

5.12. Cara pengumpulan data

1. Sensus adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan semua unit populasi untuk memperoleh karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
2. Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
3. Kompilasi produk administrasi adalah cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah, swasta, dan atau masyarakat.

Lingkari kode yang sesuai dengan cara pengumpulan data.

5.2 Cakupan wilayah survei

Cakupan wilayah survei di seluruh kabupaten/kota adalah survei dilakukan di semua kabupaten/kota yang ada di Indonesia.

Jika terpilih satu unit sampel saja pada kabupaten/kota, maka sudah diartikan bahwa cakupan wilayah survei adalah seluruh kabupaten/kota.

Lingkari kode yang sesuai dengan cakupan wilayah survei.

5.3 Bila di sebagian wilayah kabupaten/kota, survei dilakukan di

Tuliskan nama provinsi dan nama kabupaten/kota yang dicakup pada survei, sesuai dengan kode yang terisi pada rincian 5.2.

Jika ruang yang tersedia tidak mencukupi gunakan kertas tambahan.

5.4 Jenis rancangan sampel

1. *Single Stage/Phase* adalah pengambilan sampel hanya satu tahap yang dilakukan langsung pada unit populasi.

Contoh: a. Direktori Perusahaan Industri Besar dan Sedang, dipilih beberapa perusahaan industri besar dan sedang. Perusahaan industri besar dan sedang yang terpilih merupakan unit sampel yang akan disurvei.

b. Pengambilan sampel pada populasi ibu yang melahirkan di Rumah Sakit, dilakukan dengan memilih ibu yang melahirkan pada periode waktu tertentu.

2. *Multi Stage/Phase* adalah pengambilan sampel melalui dua tahap atau lebih dimana metode tiap tahapnya bisa berbeda.

Contoh: Tahap I : Pemilihan kelurahan/desa menggunakan metode *probability proportional to size (pps)* dengan *size* jumlah rumah tangga di setiap kelurahan/desa.

Tahap II : Setiap kelurahan/desa yang terpilih pada tahap I kemudian dilakukan pendataan/ *listing* secara lengkap selanjutnya diambil beberapa rumah tangga dengan menggunakan metode *systematic sampling*. Rumah tangga yang terpilih merupakan unit sampel yang akan disurvei.

Lingkari kode yang sesuai dengan jenis rancangan sampel.

5.5. Metode pemilihan sampel *stage* terakhir

1. Sampel probabilitas adalah metode pemilihan sampel dengan peluang yang sama bagi setiap unit populasi untuk dipilih sebagai sampel.
Contoh: *Simple random sampling*, *Stratified sampling*, dan *Systematic sampling*.
2. Sampel non probabilitas adalah teknik yang tidak memberi peluang sama bagi setiap unit populasi untuk dipilih sebagai sampel.
Contoh: *Purposive Sampling*, *Snowball sampling*, *Quota sampling*, dan *Accidental sampling*.

Lingkari kode yang sesuai dengan metode pemilihan sampel.

5.6. Kerangka sampel

Kerangka sampel adalah daftar semua unit dalam populasi yang akan dijadikan sampel untuk disurvei. Kerangka sampel ini menjadi dasar penarikan sampel.

Contoh: Daftar penduduk, daftar bangunan, dan daftar rumah tangga.

Tulis dan jelaskan secara rinci kerangka sampel yang digunakan. Jika jenis rancangan sampelnya *Multi Stage/Phase*, jelaskan kerangka sampel untuk setiap tahapan. Contoh:

Kerangka sampel satu tahap: Direktori Perusahaan Industri Besar dan Sedang.

Kerangka sampel dua tahap:

Tahap I : Daftar kelurahan/desa di seluruh kabupaten/kota.

Tahap II: Daftar rumah tangga di setiap kelurahan/desa.

5.7. Keseluruhan fraksi sampel (*overal sampling fraction*)

Tuliskan fraksi sampel (n/N) secara keseluruhan. Jika rancangan sampel *multi stage/phase*, jelaskan fraksi sampel pada setiap tahapannya.

5.8. Perkiraan *sampling error*

Sampling error adalah penyimpangan yang terjadi karena adanya kesalahan dalam pemakaian sampel. Semakin besar sampel yang diambil maka semakin kecil terjadinya *sampling error*.

Tuliskan perkiraan *sampling error* pada survei ini.

5.9. Unit sampel

Unit sampel adalah unit terkecil dari populasi yang akan diambil sebagai sampel.

Contoh: Kelurahan/desa, rumah tangga, dan pedagang.

Tuliskan unit sampel dan jumlah seluruh sampel survei ini.

5.10. Unit observasi

Unit observasi adalah unit pengamatan yang digunakan pada pengumpulan data. Unit sampel dan unit observasi bisa sama dan bisa berbeda.

Contoh:

Unit Sampel	Unit Observasi
Kelurahan/desa	Lurah/kepala desa
Rumah tangga	Kepala/anggota rumah tangga
Pedagang	Pedagang

Tuliskan unit observasi dan jumlah seluruh unit observasi pada pengumpulan data ini.

<p>5.5. Metode pemilihan sampel <i>stage</i> terakhir: <input type="checkbox"/></p> <p style="padding-left: 40px;">Sampel Probabilitas - 1</p> <p style="padding-left: 40px;">Sampel Non Probabilitas (Sebutkan) - 2 → Lanjutkan ke R. 5.11</p>
<p>5.6 Kerangka sampel:</p>
<p>5.7. Keseluruhan fraksi sampel (<i>overall sampling fraction</i>):</p>
<p>5.8. Perkiraan <i>sampling error</i>.</p>
<p>5.9. Unit sampel:</p>
<p>5.10. Unit observasi:</p>

5.11. Metode pengumpulan data

Lingkari kode yang sesuai, pemilihan kode bisa lebih dari satu. Jika kode yang dipilih lebih dari satu, maka jumlahkan kode yang terpilih lalu pindahkan ke kotak yang tersedia.

5.12. Apakah melakukan uji coba (*pilot study*)

Lingkari kode 1 jika dilakukan *pilot study* atau lingkari kode 2 jika tidak. Jika kode 1 yang dipilih, jelaskan secara singkat pelaksanaan *pilot study* tersebut. Penjelasan pelaksanaan *pilot study* mencakup lokasi pelaksanaan *pilot study*, jumlah unit observasi, waktu pelaksanaan *pilot study*, berapa kali *pilot study* dilakukan.

5.13. Petugas pengumpulan data

Lingkari kode yang sesuai, pemilihan kode bisa lebih dari satu. Jika kode yang dipilih lebih dari satu, maka jumlahkan kode yang terpilih lalu pindahkan ke kotak yang tersedia.

5.14. Persyaratan pendidikan terendah petugas pengumpulan data

Lingkari kode pendidikan terendah dari seluruh petugas pengumpulan data, sesuaikan dengan isian pada rincian 5.13.

5.15. Apakah melakukan pelatihan petugas

Lingkari kode 1 jika dilakukan pelatihan petugas atau lingkari kode 2 jika tidak. Jika kode 1 yang dipilih, jelaskan secara singkat pelaksanaan pelatihan petugas tersebut. Penjelasan pelatihan petugas mencakup waktu pelaksanaan pelatihan dan materi pokok pelatihan.

5.16. Jumlah petugas

Isikan jumlah petugas berdasarkan tugasnya, yaitu *supervisor*/penyelia/pengawas dan *enumerator*/ pencacah/pengumpul data.

5.11. Metode pengumpulan data:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wawancara langsung	- 1		
Wawancara melalui sarana komunikasi	- 2		
Mengisi kuesioner sendiri (swacacah)	- 4		
Pengamatan (observasi)	- 8		
Lainnya (sebutkan)	- 16		
5.12. Apakah melakukan uji coba (<i>pilot study</i>):		<input type="checkbox"/>	
Ya	- 1	Tidak	- 2
Jika "Ya", jelaskan :			
5.13. Petugas pengumpulan data:		<input type="checkbox"/>	
Staf	- 1		
Mitra/Tenaga Kontrak	- 2		
Lainnya (sebutkan)	- 4		
5.14. Persyaratan pendidikan terendah petugas pengumpulan data:		<input type="checkbox"/>	
SMP	- 1		
SMA/SMK	- 2		
Akademi/Universitas	- 3		
5.15. Apakah melakukan pelatihan petugas:		<input type="checkbox"/>	
Ya	- 1	Tidak	- 2
Jika "Ya", jelaskan :			
5.15. Apakah melakukan pelatihan petugas:		<input type="checkbox"/>	
Ya	- 1	Tidak	- 2
Jika "Ya", jelaskan :			
5.16. Jumlah petugas:			
Supervisor/Penyelia/Pengawas	Orang		
Enumerator/Pencacah/Pengumpul Data	Orang		

Blok VI. Pengolahan Data, Penyajian, dan Analisis

6.1. Metode pengolahan

Metode pengolahan data yang dicakup meliputi:

1. Penyuntingan (*editing*), yaitu kegiatan pemeriksaan hasil pengumpulan data. *Editing* dilakukan pada kesalahan dan ketidakkonsistenan pengisian rincian pertanyaan.
2. Penyandian (*coding*), yaitu kegiatan pemberian kode-kode pada rincian pertanyaan. *Coding* ini dilakukan untuk memudahkan *entry data*.
3. *Input data (Data entry)*, yaitu kegiatan memasukkan data ke dalam “form *data entry*”. *Data entry* bisa dilakukan dengan aplikasi excel atau aplikasi yang dibuat tersendiri.
4. Pemindaian (*Scan*), yaitu kegiatan memasukkan data dengan cara memindai dokumen *hadr copy* menjadi *softcopy*.
5. Penyahihan (*validasi*), yaitu kegiatan pemeriksaan dan perbaikan data hasil *entry data*.

Lingkari kode 1 jika “Ya” dan kode 2 jika “Tidak”, pada setiap metode pengolahan data.

6.2. Tingkat penyajian yang diharapkan

Tingkat penyajian adalah kemampuan data hasil kegiatan statistik untuk menyajikan data/informasi karakteristik unit sampel/observasi.

Contoh:

1. Survei nasional menghasilkan data mikro individu dengan level estimasi kabupaten/kota maka tingkat penyajian yang dilingkari adalah kode 1, 2, dan 4.
2. Kompilasi produk administrasi yang dilakukan di provinsi menggunakan data bersumber dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Provinsi, maka tingkat penyajian yang dilingkari bisa kode 2 saja atau kode 2 dan 4.

Lingkari kode yang sesuai, pemilihan kode bisa lebih dari satu. Jika kode yang dipilih lebih dari satu, maka jumlahkan kode yang terpilih lalu pindahkan ke kotak yang tersedia.

6.3. Metode analisis

Analisis adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Metode analisis terdiri dari:

1. Analisis deskriptif adalah analisis yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik data menggunakan metode statistik sederhana, seperti *mean*, *median*, *modus*, *range*, *variance*, *standar deviasi*, tabel kontingensi, dan analisis kuadran.
2. Analisis inferensia adalah analisis yang bertujuan untuk menarik kesimpulan pada sampel, yang digunakan untuk digeneralisir ke populasi.

Analisis yang bertujuan untuk menarik kesimpulan berdasarkan data hasil pengolahan menggunakan metode statistik yang lebih mendalam, seperti *anova*, *korelasi*, *regresi*, *chi-square*, *faktor*, *cluster*, dan *diskriminan*.

Tuliskan metode analisis dan metode statistik yang digunakan.

Blok VI. Pengolahan Data, Penyajian, dan Analisis				
6.1. Metode pengolahan:				
<i>Penyuntingan (Editing)</i>	Ya - 1	Tidak - 2		<input type="checkbox"/>
<i>Penyandian (Coding)</i>	Ya - 1	Tidak - 2		<input type="checkbox"/>
<i>Input data (Data entry)</i>	Ya - 1	Tidak - 2		<input type="checkbox"/>
<i>Pemindaian (Scan)</i>	Ya - 1	Tidak - 2		<input type="checkbox"/>
<i>Penyahihan (Validasi)</i>	Ya - 1	Tidak - 2		<input type="checkbox"/>
6.2. Tingkat penyajian yang diharapkan:				
<i>Nasional</i>	- 1	<i>Kecamatan</i>	- 8	<input type="checkbox"/>
<i>Provinsi</i>	- 2	<i>Kelurahan/Desa</i>	- 16	<input type="checkbox"/>
<i>Kabupaten/Kota</i>	- 4	<i>Lainnya (sebutkan)</i>	- 32	
6.3. Metode analisis:				

6.4. Unit analisis

Unit analisis adalah unit data yang akan dianalisis. Unit analisis bisa sama dan bisa berbeda dengan unit sampel, unit observasi, dan tingkat penyajian.

Contoh:

3. Kegiatan Survei Rumah Tangga Pengguna HP

Unit Sampel	Unit Observasi	Tingkat Penyajian	Unit Analisis
Rumah tangga	Kepala/anggota rumah tangga	Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional	Rumah tangga dan Kabupaten/kota

4. Kegiatan Survei komoditas 10 bahan pokok

Unit Sampel	Unit Observasi	Tingkat Estimasi	Unit Analisis
Pedagang Besar	Pedagang Besar	Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota

6.8 Produk data yang tersedia untuk umum

Produk data yang tersedia untuk masyarakat umum merupakan produk data kegiatan statistik yang didiseminasikan/disebarluaskan kepada masyarakat umum. Bentuk produk data tersebut antara lain:

1. Media Cetak, yaitu produk data yang dipublikasikan dalam bentuk buku/publikasi tercetak.
2. Media Elektronik, yaitu produk data yang dipublikasikan dalam bentuk file elektronik/ *softcopy* publikasi.
3. Data Mikro, yaitu produk data dalam bentuk *individual record*.

Lingkari kode 1 jika “Ya” dan 2 jika “Tidak” pada setiap produk data yang tersedia untuk masyarakat umum.

6.9 Judul publikasi

Tuliskan judul publikasi yang tersedia untuk masyarakat umum.

Contoh: Laporan Perekonomian Indonesia

6.10 Waktu pelaksanaan kegiatan

Tuliskan tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan kegiatan. Waktu pelaksanaan tersebut mencakup 5 (lima) tahapan kegiatan, yaitu:

1. Perencanaan/Persiapan
2. Pengumpulan data
3. Pengolahan
4. Penyajian
5. Analisis

6.9. Rencana penerbitan publikasi untuk umum:

Tuliskan rencana penerbitan publikasi dari hasil kegiatan statistik yang dilakukan.

6.4. Unit analisis:

6.5. Produk data yang tersedia untuk umum:

Media Cetak	Ya - 1	Tidak - 2	<input type="checkbox"/>
Media Elektronik	Ya - 1	Tidak - 2	<input type="checkbox"/>
Data Mikro	Ya - 1	Tidak - 2 → Lanjutkan ke R. 6.7	<input type="checkbox"/>

6.6. Judul publikasi:

6.7. Waktu pelaksanaan kegiatan:

	Tahap			s.d	Tahap		
	Tanggal	Bulan	Tahun		Tanggal	Bulan	Tahun
Perencanaan/Persiapan	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Pengumpulan data	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Pengolahan	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Penyajian	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Analisis	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

6.8. Rencana penerbitan publikasi untuk umum:

Tanggal	Bulan	Tahun
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Blok VII. Abstraksi

Abstraksi merupakan ringkasan isi dari penyelenggaraan kegiatan statistik. Abstraksi ditujukan sebagai informasi awal sehingga memudahkan masyarakat umum untuk mengetahui tujuan penyelenggaraan kegiatan statistik. Abstraksi mencakup 4 (empat) bagian empiris yaitu:

1. Penjelasan ringkas mengenai tujuan penyelenggaraan kegiatan statistik agar masyarakat umum memahami apa yang diamati oleh kegiatan statistik tersebut.
2. Gambaran ringkas desain/metode penelitian yang digunakan.
3. Penjelasan ringkas mengenai hasil temuannya.
4. Kesimpulan sebagai bagian akhir dari abstraksi. Pada bagian ini kadangkala disisipkan rekomendasi untuk penyelenggaraan kegiatan statistik yang serupa.

Tuliskan secara ringkas abstraksi hasil kegiatan statistik yang telah dilakukan.

Jika ruang yang tersedia tidak mencukupi, lampirkan abstraksi tersebut dengan menggunakan kertas terpisah.

<http://www.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax.: (021) 3857046

Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpsdq@bps.go.id

ISBN. 978-979-064-802-9



9 789790 648029